

ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PEMILIHAN UMUM DI ERA REFORMASI

Dr. Komaruddin, M.Si.



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis**

Ketentuan Pidana

**Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK ISLAM
DALAM PEMILIHAN UMUM DI ERA REFORMASI**

Penulis : Dr. Komaruddin, M.Si.
Editor : Manah Rasmanah, M.Si.
Dr. Arwan, M.Pd.
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko, S.Kom.

Diterbitkan Oleh:
UIN Raden Fatah Press
Anggota IKAPI (No. Anggota 004/SMS/2003)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp: (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Juni 2023
14,8 x 21 cm
viii, 202 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-623-250-375-5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Politik Islam dalam Kancah Plotik Nasional dapat diselesaikan. Buku ini dirancang untuk memberikan informasi tentang bagaimana partai-partai politik pasca Reformasi berkiprah, utamanya partai Islam.

Sebagaimana kita ketahui bahwa politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Politik merupakan cara orang yang hidup berkelompok membuat keputusan. Politik adalah tentang membuat kesepakatan antar manusia sehingga mereka dapat hidup bersama dalam kelompok seperti suku, kota, atau negara. Dengan demikian hemat penulis merupakan keharusan setiap warga negara untuk memahami dengan baik makna politik. Harapannya dengan memahami secara benar makna politik akan memberi kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun bangsa melalui peranserta politik warga negara.

Untuk memahami dengan baik politik itu, maka perlu juga memahami ilmu politik itu sendiri. Ilmu politik adalah salah satu subjek yang bisa dimanfaatkan untuk memahami apa itu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mengkaji konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut dan segala konsekuensinya. Ilmu politik mempelajari pemerintahan dalam segala bentuk dan aspeknya, baik teoritis maupun praktis

Islam merupakan agama yang universal, agama membawa misi *rahmatan lil alamin* serta membawa konsep

kepada ummat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik, perekonomian, penegakan hukum, dan sebagainya. Kemudian dalam bidang politik misalnya, Islam mendudukannya sebagai sarana penjagaan urusan umat. Islam dan politik integratif terwujud pada beberapa pemikir dan politisi muslim yang hadir dari masa ke masa dengan pemikiran dan pola perjuangannya yang berbeda-beda. Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, mengutip Taufik Abdullah, bermula dari suatu kepribadian moral dan doktrin terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam.

Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, kerana Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, bahan, dan duniawi saja, kosong dari aspek moral dan spiritual. Oleh kerana itu, politik dalam Islam sangat penting bagi mengingatkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syariat Islam boleh diwadahi oleh politik.^{iv}

Buku ini, ditulis sebagai bagian dari informasi dan dokumentasi bagaimana kiprah partai-partai politik Islam di Indonesia, bagaimana partai-partai itu dipilih, dan bagaimana polarisasi politik Islam dalam tataran lokal dan nasional, dan bagaimana polarisasi umat Islam terhadap partai politik Islam. Penulis menyadari bahwa buku ini disusun sebagai hasil diskusi dengan berbagai pihak dan juga rekan-rekan sejawat,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik langsung maupun tidak langsung, para Tokoh-tokoh Politik dan para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk itu izinkan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan bangga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi Penulis dan kita semua yang memerlukan informasi tentang bagaimana kiprah partai politik Islam dari masa-kemasa dan perannya dalam demokrasi di Indonesia. Kiranya Allah Swt, meridhoi upaya dan pengabdian kita semua, *aamin ya robbal 'alamin*.

Palembang, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I - Pemilu dan Demokrasi	1
A. Realitas tentan Pemilu	1
B. Partai Politik setelah Reformasi	4
BAB II - Perilaku Pemilih dalam Pemilu	11
A. Kajian Politik Lokal.....	11
B. Perilaku Pemilih	14
C. Politik Umat Islam.....	17
BAB III - Palembang dan Politik Nasional	21
A. Sejarah dan Geografi	21
B. Sosial dan Budaya Masyarakat.....	29
C. Islamisasi dan Religiusitas Masyarakat.....	36
BAB IV - Sebaran Penduduk dan Komposisi Pemilih ...	43
A. Pesebaran Penduduk	43
BAB V - Dinamika Pemilihan Umum sebelum Reformasi	55
A. Pemilihan Umum pada Masa Orde Lama.....	55
B. Pemilihan Umum Masa Orde Baru	68
C. Pilihan Politik Umat Islam sebelum Reformasi	82
BAB VI - Reformasi dan Kontestasi Pemilihan Umum .	97
A. Sejarah Lahirnya Era Reformasi di Indonesia	97

B. Sistem Pemilihan Umum di Era Reformasi.....	109
C. Reformasi dan Pemilu Multi-Partai	118
D. Budaya Politik Masyarakat Melayu Palembang.....	132
BAB VII - Perubahan Pilihan Politik Umat Islam.....	137
A. Perubahan Pilihan Politik Umat Islam Palembang.....	138
B. Faktor-Faktor yang Mendorong Perubahan Pilihan Politik Umat Islam Palembang	159
C. Dampak Perubahan Pilihan Politik Umat Islam Palembang	177
Daftar Pustaka.....	190

BAB I

PEMILU DAN DEMOKRASI



A. Realitas tentang Pemilu

Meski terdapat pendapat menyatakan bahwa kecendrungan menurunnya jumlah pemilih ideologis/politik aliran khususnya pilihan berlatar belakang agama semakin memudar,¹ namun hiruk-pikuk Pilgub DKI Jakarta 2017 yang diakhiri dengan kemenangan pasangan nomor urut dua Anies Baswedan - Sandiaga S. Uno yang didukung mayoritas pemilih muslim atas rivalnya Basuki Cahaya Purnama (Ahok) – Jarot Saiful Hidayat, seakan mementahkan tesis semakin mudarnya jumlah pemilih ideologis dan politik aliran. Kemenangan Donald Trump yang selama kampanyenya banyak mengangkat isu-isu agama atas pesaingnya Hillary Clinton dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2017, juga seolah ingin mengokohkan realita bahwa politik aliran dan pemilih ideologis itu masih kokoh, termasuk di negara-negara maju.

Survey-survey menjelang Pemilu 2014 merilis akan adanya kemenangan besar partai-partai nasionalis. Para pakar bahkan mengatakan akan banyak partai-partai Islam tidak akan lolos ambang batas minimal (*electroral threshold*).

¹Gonda Yumitro, “Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17. No.1 (Juli 2013), hal. 35-50

Kenyataannya sungguh mengejutkan para pakar dan mementahkan banyak hasil survey. PDIPerjuangan (PDIP) memang adalah pemenang pemilihan umum 2014, tetapi hanya 18,95% dari kemenangan itu benar-benar mengejutkan. Keterkejutan prakiraan politik lainnya adalah partai-partai Islam yang mampu eksis dan mampu menembus *electroral threshold*, bahkan dengan perolehan yang cukup meyakinkan meski tidak sebesar perolehan partai nasionalis.²

Pemilu telah menjadi faktor penting dalam implementasi proses perubahan pemerintah dalam sistem politik demokratis. Pemilu memiliki peran yang sangat vital bagi masyarakat sebagai upaya menentukan kehidupan mereka pada sistem politik saat ini. Demokrasi telah berubah dalam proses pembangunan, dan ada banyak varian, termasuk konsep-konsep seperti pemerintahan yang baik, demokrasi politik, demokrasi industri, demokrasi liberal, dan demokrasi partisipatif. Di antara varian ini, analisis demokrasi sering melibatkan dua perdebatan penting, apakah dalam arti demokrasi prosedural atau demokrasi substantif. Fokus pertama adalah pada aturan demokratis yang harus diimplementasikan dalam konstitusi, sedangkan fokus kedua adalah pada produk demokrasi untuk kebaikan bersama.³

Dalam perjalanan sejarah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), partai-partai peserta Pemilu pertama tahun 1955 menunjukkan bahwa semua partai yang ada pada saat itu menganut aliran politik tertentu, yaitu Nasionalis, Agama - Islam, Kristen, Katolik, Komunis, Sosialis, kedaerahan dan

²Syamsuddin Haris, *Evaluasi Proses dan Analisis Hasil Pemilu Legislatif 2014* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 186-187

³Ian Shapiro, *Democracy's Place* (USA: Cornell University Press, 1996), hal. 123

perorangan. Sebaran perolehan partai-partai peserta Pemilu 1955 adalah sebagai berikut; jumlah suara partai-partai Islam seperti Masyumi, Partai Nahdhatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Partai Persatuan Tarikah Islam (PPTI), sebesar 43,72 %. Partai Nasionalis dan Sosialis (PNI dan lain-lain termasuk perorangan 35,05 %, Partai Komunis 16,53 (PKI dan Angkatan Komunis Muda – Acoma), Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik 4,7 %.⁴

Sebaran orientasi yang berlatar belakang religiusitas atau keberagamaan ini tampak jelas pada hasil pemilihan umum 1955, dan merupakan pemilu ter-demokratis sepanjang pelaksanaan pemilu Indonesia sampai saat ini. Jawa Timur sebagai basis massa santri dikuasai Partai Nahdhatul Ulama (NU), Jawa tengah dikuasai Partai Nasioalis Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI), sedangkan Jawa Barat dan DKI Jakarta didominasi oleh Masyumi.

Keperkasaan suara Masyumi di beberapa daerah di luar pulau Jawa, yaitu di beberapa propinsi di pulau Sumatera, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Herbert Feith⁵ memetakan empat partai politik yang memenangkan pemilu 1955, diantaranya PNI, NU, Masyumi dan PKI yang berasal dari faksi Jawa dan faksi luar Jawa. Tiga partai dalam kelompok partai Jawa meliputi: PNI, partai NU dan PKI. Dan Masyumi dikenal sebagai "*Java Outside Party*".

Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal sebagai rezim Orde Baru, pelaksanaan Pemilu dan hasilnya dianggap tidak menggambarkan aspirasi masyarakat

⁴Diolah dari data KPU. Lihat www.kpu.go.id.

⁵Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999)

yang sesungguhnya. Pemerintahan Soeharto memberlakukan kontrol politik yang kuat dan dalam praktiknya lebih menekankan kepada demokrasi prosedural. Harapan umat Islam akan terbukanya keran partisipasi politik seluas-luasnya harus layu sebelum berkembang. Alih-alih mengizinkan penghidupan Masyumi yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno, rezim Orde Baru dengan alasan demi stabilitas politik, justru melakukan penyederhanaan sistem kepartaian pada Pemilu 1971 dan bahkan pada Pemilu selanjutnya selama pemerintahan Orde Baru jumlah partai peserta Pemilu dibatasi hanya tiga partai politik saja, seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang berasal dari integrasi partai Islam, Golkar (Golongan Karya), Partai besutan Suharto dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) - integrasi partai nasionalis, Kristen, dan Katolik.⁶

B. Partai Politik setelah Reformasi

Setelah reformasi, dengan dibukanya sistem demokrasi, partai-partai politik telah berkembang, termasuk beberapa partai baru berdasarkan masa Islam. Elit politik dan aktivis Islam mengambil keuntungan dari euforia reformasi dengan membentuk partai politik. Secara garis besar, partai politik Islam terbagi menjadi dua varian, yakni berbasis Islam dan berbasis Pancasila, dengan massa mereka adalah massa Islam. Partai berbasis Islam antara lain PBB (Partai Bulan Bintang), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PK (Partai Keadilan) yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)

⁶Munawir Arifin, "Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru" dalam *Jurnal Candrasangkala* Vol. 5, No. 1 (Mei 2019), hal. 12-22

dan PUI (Partai Umat Islam). Sementara Parpol berasaskan Pancasila, dan berbasis massa Islam, diantaranya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PAN (Partai Amanat Nasional).⁷

Menurut Lili Ramli⁸ Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena berdirinya partai-partai politik Islam pada era reformasi, diantaranya adalah faktor Agama (teologis), historis, sosiologis, dan reformasi. *Pertama*, Faktor agama (teologi) Dari sudut pandang ini, agama dianggap sebagai sintesis dan kesatuan yang tidak terpisahkan dari politik. Islam *ad-Din wa ad-Daulah*,⁹ menyangkut persoalan agama dan negara. Berdasarkan hal ini, masalah sosial, termasuk persoalan negara atau politik, dan menjadi bagian integral dari masalah agama.

Kedua, faktor sosiologis. Islam di Indonesia adalah agama mayoritas. Pengikutnya menyumbang sebesar 85% dari total populasi jumlah penduduk Indonesia, dengan populasi sebesar 230 juta. Dalam kebanyakan kasus semacam ini, sudah sepantasnya menyampaikan aspirasi politik berdasarkan nilai-nilai dan perjuangan Islam.

⁷Ahmad Fuad Fanani. "Dilema Partai Politik berbasis Islam: Terpuruk dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan" dalam *Jurnal Maarif: Arus Pemikiran Islam dan social* Vol.8 (Desember 2013), hal.72-95

⁸Lili Ramli. "Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Penelitian Politik* Vol.1 No.1, (2004), hal. 29-48

⁹Paradigma ini berangkat berdasarkan *Inna Islam ad-Din wa ad-Daulah* bahwa Islam adalah agama dan negara. Walaupun pada perkembangannya,proposisi tersebut, seringkali menimbulkan kontroversi dan perdebatan, tetap saja pada sebagian masyarakat muslim masih ada beberapa kelompok, gerakan atau gagasan yang menjadikan Islam sebagai ideologi. Menimbang bahwa konsep ideologi itu sendiri telah menjadi wacana kontroversial sepanjang sejarahnya, kontroversi ini dapat dimengerti apakah itu digunakan sebagai kerangka kerja ideologis atau kerangka kerja gerakan. Bahkan di era reformasi seperti sekarang ini, wacana kontroversi tersebut semakin kuat.

Ketiga, faktor historis. Sepanjang sejarah Indonesia, Islam adalah kekuatan yang memainkan peran sangat penting dalam melawan penjajah. Pada waktu itu Islam adalah salah satu kekuatan terdepan untuk mengusir penjajahan. Untuk melawan penjajah, alat organisasi perlu digunakan untuk menyatukan cita-cita dan tujuan. Kemudian, orang-orang memperhatikan pendirian Sarekat Islam (SI), organisasi kekuatan politik pertama dengan anggotapaling banyak diantara organisasi masa lainnya.

Keempat, faktor reformasi. Reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa mampu menggulingkan kekuatan Orde Baru dan melahirkan era kebebasan (reformasi). Pada era reformasi, setiap kelompok atau golongan memiliki kebebasan untuk membangun atau mendirikan partai politik berdasarkan prinsip-prinsip politik dan aspirasi partai. Elit politik, termasuk elit partai Islam, jelas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.

Meskipun Indonesia memiliki populasi mayoritas sekitar 230 juta, terhitung sekitar 85% beragama Islam dari total populasi penduduk Indonesia seluruhnya, jumlah ini masih melebihi jumlah total Muslim di Timur Tengah. Ada satu hal yang menarik untuk dipelajari, karena tanda-tanda kelemahan partai Islam sebenarnya terjadi di kalangan komunitas Muslim mayoritas. Bahkan pandangan "negatif" dari Partai Islam datang dari mayoritas komunitas Islam sendiri.

Untuk memahami pergeseran pilihan politik umat Islam Indonesia diperlukan kajian-kajian yang mendalam. Kajian-kajian itu dapat dimulai dengan menelusuri fenomena-fenomena lokal, dengan harapan akan ditemukan pola-pola yang dapat digunakan untuk memahami pergeseran pilihan politik umat Islam Indonesia secara keseluruhan (nasional).

Realitas politik bangsa Indonesia saat ini dan juga termasuk di dalamnya umat Islam tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarahnya. Latar belakang historis ini dapat digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan perubahan dalam sistem politik masyarakat Islam Indonesia. Realitas politik bangsa Indonesia saat ini terbentuk dari proses dialektis perjalanan sejarah yang panjang. Realitas yang tidak pernah dianggap mapan secara permanen. Sebagai sebuah realitas setiap saat dapat menumbuhkan sintesis baru.

Tentu saja, metode ini dapat digunakan untuk mengamati sejarah Islam dan proses politik mayoritas masyarakat yang menerima Islam di Indonesia. Kehadiran Muslim di negara ini sering menjadi bahan diskusi, dan perannya mengalami pasang surut. Akan tetapi tetapi secara umum, secara bertahap menghilang. Berbagai diskusi tentang Islam dalam konteks politik Indonesia juga menunjukkan bahwa Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia.

Orientasi pilihan politik juga dapat digunakan untuk membedakan jenis orientasi keagamaan; nasionalis, sekuler, religius; atau dalam terminologi Gertz santri, abangan dan priyayi. Kalangan nasionalis dan kadang ditambahkan sekuler – nasionalis sekuler – cenderung mempunyai orientasi untuk memilih partai nasionalis – sekuler, bahkan cenderung antipati pada partai agama atau berbasis agama; baik partai ber-ideologi formal agama (PPP, PKS) maupun latar belakang historis keterkaitannya dengan keagamaan(basis massa Islam) tertentu (PKB – NU, PAN Muhammadiyah). Dimasa lalu (pemilu 1955) santri orientasi politiknya ke Masyumi dan NU, sedangkan abangan dan priyayi tersebar di PNI dan PKI.

Penelitian ini ingin melihat apakah kecenderungan seperti ini masih nampak dalam dinamika dan realitas politik umat Islam Indonesia, khususnya pada masyarakat muslim Palembang. Pada Pemilu 1955 Sumatera Selatan merupakan salah satu lumbung suara Masyumi (43%), pada Pemilu 2014 gabungan partai-partai Islam (PKB, PAN, PKS, PPP, PBB) memperoleh total suara 29,1% (perolehan suara secara nasional). Ini sebuah realitas yang tentu sangat menarik untuk diteliti. Terjadi migrasi pemilih muslim ke partai nasionalis yang cukup besar. Sebagai pembanding Jawa Timur partai-partai Islam pada Pemilu 1955, pada pemilu 2014 partai-partai Islam memperoleh 35 % dan PKB menjadi Partai terbesar dan menduduki kursi Ketua DPRD Jawa Timur.¹⁰

Palembang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan penduduk 1.662.893 jiwa. Bila dilihat dari segi agama, Islam 1.585.176 (92,78 %), Protestan 35.714 (2,10 %), Katolik 23.849 (1,40)%, Hindu 965 (0,056%), Budha 62.698 (3,66 %).¹¹ Namun demikian komposisi kependudukan dengan umat Islam sebagai mayoritas tersebut tidak simetris dengan komposisi perolehan hasil suara yang diperoleh partai Islam atau berbasis massa Islam, terutama selama masa Soeharto (Oerde Baru) dan masa reformasi.

Hasil tersebut dapat terlihat dari perolehan suara mereka dalam Pemilihan Umum 2014. Dari keseluruhan suara sah yang masuk 720.705 suara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh suara 57.847 (8,026 %) dengan 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 42.965 (5,96 %) 3 kursi, Partai

¹⁰Diolah dari data KPU. Lihat www.kpu.go.id.

¹¹BPS Kota Palembang, *Kota Palembang dalam Angka: Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan* (Palembang: CV Bahtera Safeti, 2020), hal. 124

Amanat Nasional (PAN) 53.186 (7,37 %) 3 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 44.796 (6,21 %) 2 Kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) 40.805 (5,66 %) 2 kursi. Total Perolehan suara partai-partai Islam 239.599 suara atau 33,22%. Sedangkan dari segi jumlah kursi di DPRD Kota Palembang yaitu sebanyak 15 dari 50 kursi yang didapatkan, yakni hanyaberkisar 30 % saja.¹²

Pada pemilu tahun 2019 perolehan suara gabungan dari partai Islam hanya sebesar 227.595 atau 26,32 % dari keseluruhan total suara yang sah. Namun dari segi perolehan kursi mengalami kenaikan dibandingkan Pemilu 2014, yaitu dari 15 kursi menjadi 18 kursi (36%). Jika dibandingkan dengan pemilu 1955 dan pemilu 2014, maka pemilu 2019 perolehan suara partai Islam justru mengalami penurunan. Minimnya perolehan suara partai Islam, salah satunya dipengaruhi oleh gagalnya PBB masuk parlemen. Meskipun PAN sukses memperoleh suara paling tinggi, namun hanya pada kisaran 8,11 %. Hal ini semakin membuktikan bahwa partai Islam di Kota Palembang pada era reformasi gagal memperoleh simpati masyarakat Kota Palembang.¹³

Untuk menjelaskan diskursus interaksi antara umat Islam dan politik serta keberadaan partai-partai Islam di era reformasi terdapat sejumlah faktor yang melatar belakungnya, yakni faktor agama (teologis), historis, sosiologis, dan reformasi. Dan menjadi penting adalah bahwa keberadaan mayoritas umat Islam Indonesia, tidak menjadi jaminan bahwasannya partai-partai Islam akan menjadi pilihan bagi para pemilih Islam. Maka dari itu kajian ini menjadi penting

¹²KPU Kota Palembang, *Data Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif tahun 2014*

¹³Diolah dari data KPU. Lihat www.kpu.go.id.

untuk melihat dan menganalisis bagaimana pilihan umat Islam Palembang pasca reformasi.

BAB II

PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILU



A. Kajian Politik Lokal

Dalam beberapa referensi yang penulis temukan, kajian tentang pilihan politik umat Islam terutama di lokal Palembang belum ditemukan. Namun demikian dalam beberapa jurnal, buku maupun penelitian lainnya yang hampir mendekati dengan pokok bahasan penelitian ini. Penelitian tentang perubahan perilaku pemilih di Palembang, khususnya perubahan perilaku pilihan politik umat Islam, belum banyak ditemukan. Dalam publikasi KPU RI, hasil penelitian tentang kecenderungan sikap dan perilaku pemilih (*voting behavior*), beberapa propinsi menyajikan hasil penelitian yang sangat baik, serta satu ada yang memiliki lebih dari satu hasil penelitian. Sedangkan dari Sumatera Selatan hanya menampilkan satu publikasi riset tentang kecenderungan sikap dan perilaku pemilih di Kabupaten Musi Banyuasin, itupun hanya berupa *power point*, sedang hasil penelitian publikasi hasil penelitian tentang kecenderungan sikap dan perilaku pemilih daerah lain sangat memadai.¹⁴

Penelitian tentang Perilaku Politik Transaksi Calon Legislatif dan Pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di

¹⁴Diolah dari data KPU. Lihat www.kpu.go.id.

kelurahan Sako Kota Palembang yang dilakukan oleh Alfitri menyoroti korelasi politik transaksional calon legislatif dengan konstituen terhadap kemungkinan keterpilihan calon menjadi anggota legislatif (DPRD) Kota Palembang.¹⁵

Sementara itu, Markoni melakukan penelitian tentang “Studi Pemetaan Politik dan Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Palembang” lebih banyak menyoroti aspek pemasaran politik dalam Pilkada yang tidak memungkinkan lagi hanya dilakukan dengan pendekatan pemasaran politik konvensional.¹⁶

Sedangkan penelitian yang dilakukan Jeroen Peeters, “Kaum Tuo – Kaum Mudo, Perubahan Religiusitas di Palembang 1821 – 1942” dari judulnya sudah jelas spesifik tentang perubahan religiusitas (perilaku keagamaan) masyarakat Palembang dalam kurun waktu tertentu (1821-1942). Penelitian ini akan sangat membantu untuk memahami perilaku keagamaan masyarakat Palembang yang juga secara teoritis akan mempengaruhi perilaku politiknya.

Penelitian selanjutnya tentang perpolitikan Palembang adalah disertai Farida R Wargadalem, “Perebutan Kekuasaan di Kesultanan Palembang (1804 – 1825)” yang dipertahankan pada ujian promosi doktor bulan April 2012 di Universitas Indonesia, pada prodi Ilmu Sejarah yang kemudian diterbitkan dengan judul *Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik*

¹⁵Alfitri, “Perilaku Politik Transaksi Calon Legislatif dan Pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di kelurahan Sako kota Palembang” dalam *Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III* (September 2019), hal. 203-216

¹⁶Markoni, “Studi Pemetaan Politik dan Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umu Kepala Daerah di Kota Palembang” dalam *Jurnal Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga*, (2014), 12.2.

(1804 -1825).¹⁷ Penelitian ini berusaha secara detail menggambarkan perebutan kekuasaan dan pengaruh antara Inggris (Raffles) dan Belanda. Detail lain yang diungkap adalah intrik-intrik orang dalam dan kerabat dekat Sultan Mahmud Badaruddin II, yaitu adiknya sendiri Pangeran Adipati untuk ikut menjatuhkan kekuasaan Sultan dengan bantuan Inggris. Persekutuan Pangeran Adipati dengan Inggris ini kemudian dibalas dengan pengangkatan dirinya menjadi sultan Palembang dan bergelar Sultan Ratu Ahmad Najamuddin II, yang kemudian bisa dikalahkan kembali oleh Sultan Mahmud Badaruddin II.

Penelitian lain yang juga terkait tentang perilaku pemilih di Indonesia dilakukan William Liddle dan Saiful Mujani¹⁸ yang Berdasarkan beberapa survei perilaku polling skala nasional. Kedua peneliti menyimpulkan bahwa perilaku pemilih Indonesia dalam pemilu 1999 dan 2004 sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan identitas partai dari kandidat yang dicalonkan. Faktor-faktor orientasi sosial, demografis dan agama memiliki pengaruh yang dapat diabaikan pada perilaku memilih. Dalam penelitian lain, kedua peneliti mengkonfirmasi bahwa faktor orientasi sosiologis, demografi dan agama menurun dalam perilaku memilih. Dalam Pemilu 2009, pemilih mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Meskipun menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh model Michigan, penelitian

¹⁷Farida R Wargadalem, *Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804 -1825)*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017)

¹⁸Saiful Mujani dan R. William Liddle "Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia." Dalam *journal Comparative Political Studies*, Vol. 40. No.7, (Juli 2007)

Riddle dan Mujani menunjukkan bahwa pemilih Indonesia cenderung lebih rasional.

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka ini, penulis menemukan belum ada penelitian yang memang fokus orientasi pilihan politik umat Islam Palembang, yang membandingkan Perolehan suara partai-partai di Palembang dan Sumatera Selatan pada Pemilu 1955 dengan Pemilu pada Reformasi yaitu Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2014.

B. Perilaku Pemilih

Studi tentang perilaku pemilih pada dasarnya adalah studi tentang berbagai faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menentukan pilihan terhadap kandidat dan partai politik untuk berpartisipasi dalam pencatutan politik. Adapun konseptualisasi pemilih, secara garis besar diterjemahkan oleh Firmanzah sebagai objek yang merupakan tujuan untuk dibujuk dan dipengaruhi, agar mereka memberikan hak suaranya di masa depan.¹⁹ Secara umum, pemilih adalah orang yang memiliki kesadaran yang sama atau yang secara ideologis terwakili di lembaga-lembaga politik (partai politik). Sedangkan pemilih menurut Prihatmoko adalah orang-orang yang diperebutkan suaranya oleh para kontestan.²⁰

Budiarjo percaya bahwa perilaku pemilih adalah bentuk pemilih yang berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pemilu, karena hak suara mereka mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi aktif dapat tercermin dalam berbagai bentuk kegiatan, termasuk

¹⁹ Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 480

²⁰ Joko J. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 46

memberinya hak untuk memilih dalam pemilihan, berpartisipasi dalam berbagai pertemuan, membangun silaturahmi dengan pejabat, menjadi anggota partai politik, dan bahkan mengambil tindakan langsung untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial.²¹ Menurut pendapat lain dari Surbakti perilaku pemilih adalah aktivitas memilih individu yang terkait dengan prosesi kegiatan pengambilan keputusan, antara memilih atau tidak memilih pada saat pemilu.²²

Maka dari itu, dengan demikian pada bab selanjutnya Penulis menyajikan teori atau pendekatan yang dapat melihat kecenderungan pemilih, diantara teori yang berkaitan dengan hal tersebut dalam pemilihan umum diantaranya *The Michigan Model*, *The Columbia Study*, dan *Rational Choice*.²³ Selanjutnya pendekatan tersebut lebih umum dikenal dengan pendekatan psikologis, sosiologis, dan pilihan rasional.

Pelopor teori "*The Columbia Study*" adalah Lezarsfeild pada tahun 1940. Perkembangan teori ini selanjutnya disebut model atau pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosiologis yang melekat pada diri seseorang berdampak pada perilaku politiknya. Bentuk-bentuk nilai sosiologis meliputi agama, kelas sosial, ras, kedaerahan atau wilayah, tradisi keluarga, dll.²⁴

Karena itu, berdasarkan teori lingkaran sosial, Lezarsfeild mengungkapkan bahwa setiap orang terikat oleh

²¹ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 136

²² Ramlan Surbakti, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 105

²³ L.M. Bartels, "The Study of Electoral Behavior" dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*. (Oxford: Oxford University Press, 2012), hal. 240

²⁴ L.M. Bartels, "The Study of Electoral....", hal. 240

berbagai lingkaran sosial, seperti kerabat (keluarga), persahabatan, tempat kerja, status sosial, ekonomi, usia, dan kepercayaan agama.²⁵ Kemudian, penggunaan teori ini untuk menjelaskan perilaku pemilih. Misalkan seorang pemilih tinggal di lingkungan tertentu: status ekonomi, kepercayaan agama, tempat tinggal, pekerjaan dan usia, kontrol dan tekanan sosialnya menentukan lingkaran sosial yang memengaruhi keputusan pemilih.²⁶ Menurut Dieter Roth,²⁷ Model sosiologis dapat memberikan penjelasan yang baik untuk perilaku pemilih yang berkelanjutan. Ini karena kerangka struktural setiap orang berubah perlahan. Namun, model sosiologis tidak dapat menjelaskan mengapa individu membuat pilihan politik. Dalam pandangan analisis model ini, dasar utamanya adalah kondisi sosial, dan bukannya individu sebagai pusat analisis. Alat yang membentuk dasar analisis sosiologis adalah agama, ras, pendidikan, tempat tinggal (kota atau pedesaan), pekerjaan, jenis kelamin, usia, dll.²⁸ Maka dari itu, terkait hal ini perilaku pemilih yang didasarkan agama, suku, etnis, dan kedaerahan serta status sosial ekonomi hanya bersifat sementara dan dapat berubah setiap saat. Dengan demikian, pendekatan sosiologis rupanya juga gagal dalam menjelaskan faktor bahwa hasil pemilu dapat berubah setiap saat dan cepat dari pemilu kepemilu berikutnya.

²⁵M. Daud, "Indikator Perilaku Pemilih Pada Pemilu Kadal Perspektif Psikologi" dalam *Jurnal Talenta* Vol 1. No. 1 (September 2015), hal. 87-96

²⁶D. Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*. (Jakarta: Friderich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit, 2008), hal. 24

²⁷D. Roth, *Studi Pemilu Empiris...*, hal. 37

²⁸M. Daud, "Indikator Perilaku Pemilih Pada Pemilu Kadal Perspektif Psikologi" dalam *Jurnal Talenta* Vol 1. No. 1 (September 2015), hal. 87-96

Menurut R. William Riddle dan Saiful Mujani Agama diyakini merupakan faktor sosiologis yang penting dan mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemungutan suara. Bahkan dari hasil penelitian di beberapa negara seperti Belgia, Kanada, Afrika Selatan dan Swiss, termasuk Indonesia bahwa agama memainkan peran yang sangat penting daripada bahasa atau kelas. Studi terbaru di Amerika Serikat menemukan kebangkitan tradisionalisme agama di kalangan pemilih. Sedangkan di Indonesia perebutan dengan basis orientasi keagamaan telah lama terjadi, dan dianggap sebagai penentu utama pilihan partai. Apalagi, dalam budaya demokrasi Indonesia yang relatif muda, pemilih dengan orientasi keagamaan masih sering dijadikan *ceruk* pendulang suara yang menjanjikan. Hal terjadi sebagai akibat lemahnya organisasi partai dan kurang mampu memainkan peran mediasi dengan basis pemilih.²⁹

C. Politik Umat Islam

Ketika berbicara tentang hubungan antara agama dan politik, maka paling tidak kita akan bicara 3 hal atau pandangan. *Pertama*, pandangan bahwa ada kesatuan yang tidak terpisahkan (integrasi) antara agama dan negara. *Kedua*, pandangan bahwa agama dan negara saling berhubungan dan simbiosis. *Ketiga*, pandangan bahwa agama dan negara harus dipisahkan (sekularisme).³⁰

Argumen orientasi keagamaan berawal tesis Geertz³¹, yang mengelompok-kan empat varian Islam Jawa: yaitu

²⁹R. William Riddle & Saiful Mujani, "Leadership, Party and Religion : Explaining Voting Behavior In Indonesia", dalam *Jurnal Comparative Political Studies*, (July 2007), hal. 4-5

³⁰Lili Ramli, "Partai Islam dan Pemilih....", hal.. 29-48

³¹Cilfort Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1983)

animisme *bangun sebuah*, ortodoks *santri*, dibagi lebih lanjut ke konservatif atau tradisional dan modernis, dan *priyayi* lebih terpengaruh budaya Hindu. Kategori agama Geertz juga memiliki kelas elemen. Abangan adalah penduduk desa biasa, pedagang *santri* *santri* dan petani kecil, pejabat negara *priyayi*. Di pulau Jawa pada tahun 1950, keempat varian ini menemukan ekspresi politiknya yang kental dengan aliran. Di Jawa ada empat aliran besar, PNI, PKI, Masyumi dan NU, mewakili masing-masing varian *priyayi*, abangan, modernis dan tradisional *santri*.

Pendekatan perilaku pemilih berikutnya adalah "*The Michigan Model*", yang digunakan untuk menemukan perilaku memilih yang dikembangkan pada awal 1950-an. Model ini umumnya disebut dengan pendekatan psikologis, dan deskripsi lengkapnya dapat dilihat di "*The American Voters*" (1960) oleh Campbell, Converse, Miller dan Stokes.³² Berbeda dari pendekatan sosiologis, dalam pendekatan psikologis, ada semacam keterikatan / motivasi psikologis, yang membentuk orientasi politik seseorang. Koneksi psikologis disebabkan oleh keintiman dengan partai politik atau kandidat. Persepsi dan penilaian pribadi (dampak jangka pendek) dari kandidat atau topik (program kerja) yang diusulkan sebagian besar memengaruhi pilihan pemilu.

Sedangkan menurut Dieter Roth,³³ pendekatan psikologis menjelaskan berbagai hal yang dapat mempengaruhi pilihan politik pemilih dalam waktu singkat melalui proses sosialisasi yang dapat mempengaruhi psikologis masa. Ini bisa dijelaskan melalui trias determinan penentu orientasi politik

³²Angus Campbell, Philip. E. Converse, Warren. E. Miller, & Donald E. Stokes. *The American Voter*. (New York: Wiley, 1960)

³³Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris...*, hal. 38

masyarakat yakni identifikasi partai politik, orientasi kandidat / aktor politik dan isu-isu yang berkembang.³⁴ Paradigma mendasar pada pandangan ini dirangkum dalam bentuk variable berupa identifikasi partai. Pada saat yang sama, Saiful Mujani, William Liedle dan Kuskrido menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan karena kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik, juga bukan karena mereka berada di jejaring sosial. Namun, karena mereka tertarik dengan politik, mereka memiliki hubungan dekat dengan partai-partai tertentu (status partai), merasa bahwa mereka mewakili ambisi politik mereka, serta telah memperoleh informasi yang cukup ketika menentukan pilihan mereka, dan yakin bahwa pilihan mereka dapat memperbaiki situasi.³⁵

Adapun pilihan rasional (*Rational Choice*) percaya bahwa ada dua faktor penting untuk menarik pemilih yaitu, orientasi aktor politik dan sumber daya.³⁶ Orientasi kandidat mengacu pada sikap individu terhadap kepribadian kandidat itu sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan identitas partai politik. Sedangkan sumber daya mengacu pada pemecahan masalah terkait tindakan apa yang harus diambil untuk mencari jalan keluarnya terkait beragam persoalan yang dihadapi masyarakat. Hanya saja, pemilih rasional sering tidak tahu apa-apa dan bahkan tidak peduli dengan pemilu, hal ini rasional secara ekonomi. Anthony Downs bahkan mengatakan bahwa

³⁴Kadir, "Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015: Studi Kasus di Kecamatan Kepenuhan Hulu, dalam *Jurnal JOM Fisip*. Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017), hal. 1-12

³⁵ Saiful Mujani, R William Liedle dan Kuskrido Ambardi, "Kuasa Rakyat...", hal. 371-467

³⁶George Ritzer dan Gouglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 394

informasi politik yang mereka terima tidak sebanding dengan kompensasi yang diberikannya.³⁷ Artinya, menurut mereka satu suara tidak terlalu mempengaruhi hasil pemilu dibandingkan dengan seratus juta suara. Paradigma inilah yang seringkali membuat mereka mengabaikan dan tidak peduli dengan pemilu.

Manusia adalah makhluk yang rasional, sehingga ketidaktahuan mereka harus dirasionalisasi. Ketika pemilih dianggap tidak mengenal kandidat, mereka tidak akan mengenalinya. Sebaliknya, mereka akan mengklaim lebih tahu soal kandidat. Mereka bahkan berpikir bahwa ketidaktahuan mereka tentang pemilihan adalah sebagai bentuk kebaikan, dengan asumsi bahwa politik itu sesuatu sangat kotor. Paradigma yang dikemukakan oleh Gordon Tullock dalam Bryan Caplan adalah semacam ketidaktahuan rasional, yaitu pemilih tidak mencari informasi yang berkaitan dengan kandidat karena informasi politik seringkali cenderung mahal. Oleh karena itu, pada dasarnya mereka tidak memahami kandidat atau masalah yang mereka angkat terutama isu ekonomi yang diangkatnya.

³⁷ David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 82

BAB III

PALEMBANG DAN POLITIK NASIONAL



A. Sejarah dan Geografi

Secara historis istilah kata Palembang merujuk pada beberapa pengertian. Djohan Hanafiah menjelaskan bahwa kata Palembang berasal dari kata '*lembang*', yang berarti *infiltrasi* (rembesan air), dan awalan '*pe*' berarti lokasi.³⁸ Achadiati Ikram menjelaskan bahwa Palembang berasal dari kata '*imbang*' dan mendapat awalan '*pe*', yang berarti '*melimbang*' (mencuci) emas dengan menyaring menggunakan nyiru. Oleh karena itu, "Palembang" mengacu pada tempat di mana emas atau berlian dibersihkan. Palembang adalah tempat di mana logam mulia atau logam berharga dapat dibersihkan. Dari zaman Hindu hingga kesultanan, menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal raja-raja.³⁹

Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Kerajaan Majapahit⁴⁰ mengirimkan utusan ke Pesisir Timur Sumatera

³⁸Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa; Citra Budaya dan Sejarah Palembang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 15

³⁹Achadiati Ikram (*Ed*), *Jati Diri yang Terlupakan: Naskah-naskah Palembang* (Jakarta: Yayasan Naskah nusantara (Yanasa), 2004), hal. 2

⁴⁰Dalam Naskah *Geschiedemis van de Vorsten van Palembang*, dikisahkan bahwa Kerajaan Majapahit Berhasil mengalahkan dan menguasai Kerajaan Sriwijaya. Kekuasaan Majapahit di Palembang dipimpin oleh seorang Adipati yang bernama Ario Damar, dan oleh

dengan tujuan untuk memperluas daerah kekuasaan serta mendirikan koloni disana. Dalam perjalanan, Kapal utusan itu karam dan tenggelam di mulut Sungai Musi. Dalam kecelakaan tersebut hampir semua barang-barang bawaan ikut tenggelam di Sungai Musi, hanya satu peti saja yang berhasil mereka selamatkan. Potongan-potongan kotak itu akhirnya dibuat menjadi rakit oleh para penumpang yang berhasil selamat. Mereka adalah empat bersaudara, yang masing-masing potongan kotak tersebut dinaiki oleh dua bersaudara. Mereka terombang-ambing (*limbang-limbang*) di atas potongan peti di tengah Sungai Musi, walau akhirnya mereka selamat menuju daratan. Dan daratan yang mereka temukan itulah mereka namai *Palimbang*.⁴¹

Kota Palembang didirikan pada 17 Juni 683. Kalender ini didasarkan pada penulisan dan perhitungan dari kalender tahun Caka, yang sekarang ditemukan pada prasasti Bukit Kampung 35 Ilir di kabupaten Ilir Barat II. Tanggal ini didasarkan pada hasil penelitian dan diskusi. Hasil penelitian ditetapkan sebagai ulang tahun Palembang pada tanggal 6 Mei 1972 sesuai dengan Keputusan Walikota No.57/Um/Wk/72. Kota ini awalnya merupakan kerajaan Budha. Sriwijaya memerintah dari 683 M hingga 1371 M.⁴²

penduduk Kota Palembang lebih dikenal sebagai “Ario Dillah” (beberapa literature menyebutnya Ario Abdillah), dan merupakan anak dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya Sri Kertawijaya. Lihat, Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam; Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang* (Ciputat: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1998), hal. 41

⁴¹Djohan Hanafiah, *Palembang Zaman Bari Citra Palembang Tempo Doelo* (Humas Pemerintah Kotamadya Palembang, 1988)

⁴²Ali Amin, “Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya” dalam Gadjanata, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI-Press, 1986),hal. 68

Dalam literature kolonial sebagaimana pendapat peneliti maupun ahli sejarah, Palembang dikenal dengan identitas “*Ventie van Oost*” de *Oostersch Venetie*”, de *Indisch Venetie*”, *The Venice of the East*”, atau Venesia dari Timur. Kata *Ventietertuju* pada Vanesia, kota air di selatan Italia. *Ventie van Oost* digunakan ketika dimulainya hubungan dagang dengan Kompeni Belanda, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) dengan Kesultanan Palembang abad 16-17 M. Komisaris Belanda Savenhoven menyebut Palembang sebagai sebuah kota yang terpisah dan terbagi melalui sungai terbesar di Pulau Sumatera, yaitu Sungai Musi. Pada catatan tersebut disebut Sungai Musi dikenal sebagai sungai *sungsang* (baca: terbalik), artinya menentang arus. Sementara itu, orang Eropa menamai Palembang sebagai *Ventie* dikarenakan kota tersebut adalah kota *waterfront* (kota air). Selain itu Palembang oleh mereka juga disebut sebagai “*de stad der twintig einlanden*” atau kota dua puluh pulau. Dimana kota ini pada saat itu dialiri oleh seratusan anak sungai lebih dengan lembahnya yang berawa-rawa.⁴³

Sebagian besar wilayah Palembang, dikutip dari berbagai sumber di atas, terdiri dari rawa-rawa, sungai besar dan sungai kecil. Dikarenakan hampir semua wilayah Palembang berair, maka muncul sebutan lain dari Palembang, yakni *Batanghari Sembilan*. *Batanghari Sembilan* merujuk pada daerah sembilan sungai utama yang hampir semuanya bermuara di Sungai Musi, termasuk sungai-sungai kecil yang turut bermuara disana. Kesembilan sungai itu diantaranya; Sungai Kikim, Sungai Rawas, Sungai Ogan, Sungai Lematang,

⁴³Dedi Irwanto Muhammad Santun, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pasca-kolonial* (Yogyakarta: Ombak 2010), hal. 1-2

Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Enim, Sungai Banyuasin, dan Sungai Komering. Sungai-sungai tersebut menjadi jalur penghubung antar daerah untuk membawa hasil bumi.⁴⁴ Bahkan J.C.C Loman menjelaskan bahwa sisi paling penting dari kehidupan kota Palembang adalah adanya ketergantungan masyarakatnya terhadap lalu lintas perairan sungai.⁴⁵

Masyarakat daerah setempat sangat bergantung pada kemurahan alam sekitar, baik dilihat dari segi pertanian maupun infrastruktur lalu lintas perairan sungai. Dikarenakan sebagian besar sifat tanahnya basah dan rawan banjir, maka penduduk daerah sekitar dataran rendah aliran sungai, mereka tidak akan mampu mengembangkan system pertanian ladang atau tanah kering sebagaimana yang dilakukan penduduk daerah dataran tinggi. Secara alamiah, sungai-sungai yang mendominasi dataran rendah membentuk tanah atau daerah pemukiman tempat orang tinggal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun contoh penting lingkungan alam sekitar kawasan dataran rendah adalah tanah *rawa*, *pematang*,⁴⁶ *lebak*, dan *talang*. Masing-masing tanah ini merupakan penyesuaian ekologis yang dilakukan penduduk sekitar, sehingga menghasilkan pola pertanian dataran rendah aliran sungai.

Palembang adalah kota yang sangat strategis dan merupakan rute perdagangan yang baik karena didukung oleh

⁴⁴Husni Rahim, *Sistem Otoritas...*, hal. 58

⁴⁵J.C.C. Loman, "Een Kijkje in de Palembangsche Bovenlanden," dalam *indische Gids*, III (1884), hal. 423-452.

⁴⁶*Pematang* merupakan tanah-tanah sempit yang terletak di sepanjang tepian sungai yang memiliki lebar beragam, dari 50 sampai 300 meter dan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian topografis dataran rendah. Lihat, Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), hal. 30

kondisi wilayah (terutama perairan). Palembang terletak di antara Sungai Musi yang dalam dan juga lebar, sehingga kita bisa berlayar ke kedalaman dengan perahu. Karena letaknya yang strategis tersebut menjadikan Palembang sebuah pelabuhan yang sangat ramai sehingga menjadi tempat transit bagi kapal-kapal asing baik kapal dari India, Cina maupun Arab.⁴⁷ Dalam catatan Wolters menyebutkan bahwa Palembang kala itu merupakan pusat pelabuhan yang sangat penting dalam jalur perdagangan Arab, India, Parsi, dan Cina. Bahkan menurut Sevenhoven, Palembang menjadi tempat hilir mudik kapal-kapal Eropa.⁴⁸

Kota Palembang, yang terletak di jalur lalu lintas perdagangan, secara alami bersentuhan dengan berbagai budaya asing, dan hampir selalu mengarah pada adaptasi budaya (baca: akulturasi) terhadap peradaban Indonesia asli, yang pada akhirnya menambah sumber daya kreatif bagi sejarah lokal Palembang.⁴⁹ Oleh karena itu, Kota Palembang memiliki signifikansi strategis yang cukup baik dalam hal

⁴⁷Sevenhoven dalam “*lukisan tentang Ibukota Palembang*” mendeskripsikan masyarakat Palembang dan Arab bertempat tinggal di daratan, dan tempat tinggal mereka adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu, sedangkan orang-orang Melayu, Tionghoa dan orang asing lainnya tinggal di rumah-rumah rakit yang mengapung di atas air. Lihat, Dedi Irwanto Muhammad Santun, *Venesia dari Timur: memaknai...*, hal. 2

⁴⁸Husni Rahim, *Sistem Otoritas...*, hal. 59

⁴⁹Dari beberapa catatan yang ada selain orang Melayu, dari sejak masa Kerajaan Majapahit dan Demak, sudah banyak berdatangan orang-orang Jawa, termasuk etnis Cina, Arab, Portugis dan penduduk asing yang lain. Mereka membaaur dengan penduduk setempat yang awalnya terlibat dalam perdagangan. Akibat adanya interaksi antara penduduk lokal dan para pendatang ini kemudian memunculkan sebuah akulturasi budaya yang khas dan unik yang kemudian disebut kebudayaan Melayu Palembang. Lihat, Ahmad Dahlan, *Sejarah Melayu* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hal. 462-463

politik dan ekonomi, dan merupakan salah satu faktor komprehensif untuk mengendalikan daerah pedalaman dengan fondasi pertanian. Perkembangan historis daerah sekitar Selat Malaka dan Selat Bangka menunjukkan bahwa kekuatan sentral di Palembang telah memainkan kekuatan tradisional dan juga kekuatan kolonial, menyediakan kerangka kerja untuk berbagai kegiatan di berbagai bidang seperti politik, agama, ekonomi dan budaya.

Palembang adalah satu dari beberapakota tertua di Indonesia dan sebagai ibukota karesidenan sampai pada masa awal Revolusi,⁵⁰ secara astronomis terletak antara 2°52'-3°5' Lintang Selatan dan 104°37'-104°52' Bujur Timur dari Greenwich, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat dari posisi geografisnya, Palembang disebelah Utara, Timur, dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Sedangkan disebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara administratif, Palembang mencakup 18 kecamatan, termasuk: Ilir Barat Dua, Gandus, Seberang Ulu Satu, Kertapati, Jakabaring, Seberang Ulu Dua, Plaju, Irir Barat Satu, Bukit Kecil, Ilir Timur Satu, Kuminging, Irir Timur Dua , Kalidoni, Irir Timur Tiga, Sako, Sematang Borang, Sukarami, dan Alang-alang Lebar.⁵¹

⁵⁰Berdasarkan prasasti yang berada di Kedukan Bukit, Telaga Batu Kota Palembang diperkirakan berusia lebih dari 1324 tahun. Data tersebut diperoleh dari angka yang tertulis pada prasasti tersebut menunjukkan angka 11 Suklapaksa tahun Saka 604 dan mirip dengan tanggal 16 Juni 682 M. Sebagai kota tua, menurut Van Leur umumnya kota-kota di Indonesia awalnya berasal dari pusat-pusat kekuasaan raja atau bawahannya, termasuk didalamnya Kota Palembang. Lihat, Slamet Muljana, *Sriwijaya* (Flores: Percetakan Arnoldus Ende, tt), hal. 61. Lihat juga, Dedi Irwanto Muhammad Santun, *Venesia dari Timur: memaknai...*, hal. 3

⁵¹BPS Kota Palembang, *Kota Palembang dalam Angka 2020* (Palembang: CV Bahtera Safety, 2020), hal. 3

Luas wilayah Kota Palembang 400,61 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 1.643.488 jiwa. Suasana alam Kota Palembang memiliki iklim tropis lembah nisbi, suhu rata-rata disebagian besar wilayah Kota Palembang 21-32 derajat Celsius, dan curah hujan rata-rata 22-428 mml per tahun. Jika dilihat berdasarkan Topografinya, Ketinggian rata-rata Kota Palembang adalah 8 meter diatas permukaan laut. 48% dataran tidak terendam banjir, 15% daratan terendam banjir musiman, dan sisanya 35% daratan tergenang sepanjang musim. Bukit Siguntang, yang terletak di distrik Ilir Barat Satu, adalah daerah tertinggi, sekitar 10 meter di atas permukaan laut, sedangkan Sungai Lais adalah daerah terendah.⁵²

Berdasarkan jejak arkeologis dari Proklamasi Sriwijaya, pusat Kota Palembang secara historis mula-mula terletak di tanah tinggi, yakni berada di Bukit Singuntang. Secara harfiah “Siguntang” mengandung pengertian tanah yang membuntang. *Guntang* adalah suatu kata dari Palembang yang menyatakan kata sifat, yaitu terapung, awalan ‘se’ berasal dari ‘si-’. Bukit Siguntang atau Seguntang, artinya gunung terapung. Hanya saja seiring dengan perkembangan zaman, telah terjadi perubahan pusat Kota Palembang, yakni pada saat Kesultanan Palembang, pasca runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Saat itu, pusat kota dipindahkan dari barat ke timur sesaat setelah berdirinya keraton Kuto Gawang di Hilir Sungai Musi. Ketika Keraton ini dibakar habis VOC pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 November tahun 1659, pusat Kota dipindah lagi ke arah Beringin Janggut 16 Ilir selaras dengan munculnya Keraton Kuto Lamo. Selanjutnya pada tahun 1776 – 1803,

⁵²BPS Kota Palembang, *Indikator Tenaga Kerja dan Kesra Kota Palembang 2019* (Palembang: CV Bahtera Safety 2019), hal. 21-22

disebelah Hulunya berdiri Keraton Kuto Besak yang didirikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin I.⁵³

Sebagian besar Palembang adalah daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 12 meter di atas permukaan laut. Meskipun ada daerah bergelombang seperti daerah Kenten, dan Seberang Ulu dan Seberang Ilir dengan fitur topografi yang berbeda dipisahkan oleh Sungai Musi. Kota Palembang memiliki sekitar 108 anak sungai, dimana ada empat sungai terbesar. Sungai Musi adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter, Sungai Komering memiliki lebar rata-rata 236 meter, Sungai Ogan memiliki lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan memiliki lebar rata-rata 103 meter. Selain sungai-sungai besar ini, Seberang Ilir juga memiliki beberapa sungai kecil, yang berfungsi sebagai drainase perkotaan (68 anak sungai aktif), dengan lebar antara 3 dan 20 meter.⁵⁴

Hampir 30% dari Kota Palembang adalah air atau rawa-rawa, termasuk rawa yang diregenerasi dan rawa-rawa pelindung. Struktur rawa yang ada kurang lebih dipengaruhi oleh Sungai Musi dan semua sungai yang mengarah ke Sungai Musi. Fitur dari unit bentuk lahan rawa biasanya adalah pembentukan cekungan yang luas, membentuk genangan air yang relatif dangkal, relatif stagnan, bahkan di beberapa tempat, ada daerah kering di daerah rawa, kecuali musim hujan. Satuan bentuk lahan rawa dominan di barat, timur dan Seberang Ulu Satu, serta Seberang Ulu Dua. Bahkan sekarang, dibandingkan dengan beberapa daerah sekitarnya, ada

⁵³Dedi Irwanto Muhammad Santun, *Venesia dari Timur...*, hal. 3-4

⁵⁴BPS Kota Palembang, *Indikator Tenaga Kerja...*, hal. 23

cekungan yang relatif dalam, dan bentuk bentang alam adalah daerah air yang banyak ditumbuhi gulma.⁵⁵

Selama Kesultanan Palembang, sungai yang mengalir di Kota Palembang digunakan sebagai benteng pertahanan melawan tentara Belanda. Dari zaman kuno hingga hari ini, sungai-sungai ini telah digunakan oleh masyarakat lokal sebagai tempat untuk menghilangkan kotoran dari saluran air warga. Bahkan nama-nama kampung di Kota Palembang berasal dari anak-anak sungai setempat, seperti: KampungSeragam, Kampung Sungai Lais, Kampung Sungai Tawar, dll.

B. Sosial dan Budaya Masyarakat

Penduduk Palembang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok aristokrat atau priyayi dan orang-orang biasa. Priyayi adalah keturunan raja dan telah memperoleh status inheren ini karena warisan (faktor keturunan) atau restu dari Sultan. Beberapa Priyayi tidak memiliki daerah kekuasaan atau wilayah kecil (dusun), mereka mencari nafkah dengan membuat kerajinan tangan dan kegiatan lain seperti perdagangan dan pertanian.⁵⁶ Sementara itu, kelompok priyayi dengan kekuasaan atau marga wajib memberikan bantuan kepada Sultan selama perang. Bantuan semacam itu dapat berbentuk tenaga kerja atau properti.

Selain itu, penduduk Kota Palembang juga terdiri dari berbagai etnis dan tidak hanya dihuni oleh penduduk asli Palembang yang masuk dalam etnis melayu. Akan tetapi Palembang dihuni oleh berbagai pendatang dari penjuru

⁵⁵BPS Kota Palembang, *Indikator Tenaga Kerja...*, hal. 24-25

⁵⁶H.A. Dahlan, *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II* (Palembang: TP, 1981), hal. 11

nusantara seperti pendatang dari Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Bugis, dan lain-lain. Namun demikian etnis melayu merupakan penduduk mayoritas. Oleh sebab itu, budaya masyarakat Palembang sangat kental dengan budaya melayu. Mengenai penduduk asing yang mendiami kota ini, dimasa lalu, mereka biasanya hidup berkelompok berdasarkan identitas mereka. Sama seperti orang Cina yang hidup di atas rakit yang terbuat dari kayu dan bambu, rakit itu diikat ke tepi Sungai Musi. Penduduk lokal dan orang-orang Arab mereka tinggal di daratan, di rumah-rumah yang dibangun di atas tiang yang dikelilingi pagar kayu dan bambu. Namun, setelah pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan politik damai di pedesaan, orang-orang Cina mulai diizinkan untuk menetap di tempat-tempat yang tidak jauh dari kegiatan pasar. Bahkan rumah-rumah batu di sekitar pasar sekarang ditempati oleh para pengusaha Cina.⁵⁷

Perdagangan diadakan dengan orang-orang dari berbagai daerah di luar Palembang, diantaranya dengan Jawa, Cina, dan Arab. Pedagang dari Palembang umumnya menjual berbagai produk pertanian, sementara pedagang di luar Palembang kebanyakan menjual produk-produk manufaktur, seperti pedagang Cina yang menjual guci, sutra, obat-obatan dan teh. Mereka biasa berdagang di kapal atau rakit, dan penduduk Palembang membeli barang (Arab dan Cina) dari mereka, dan kemudian membawa barang yang dibeli kepedesaan untuk dijual kembali. Pada waktu itu, orang-orang di Palembang biasanya membeli barang dengan barter (saling

⁵⁷Humas Kotamadya Palembang, *Buku Penemuan Hari jadi Kota Palembang* (pemerintah Daerah Kodya Palembang: 1973), hal. 270

menukar barang), tetapi beberapa orang membayar secara kredit.⁵⁸

Masyarakat Palembang hidup dengan masih mempertahankan tradisi-tradisi lama, meskipun interaksi masyarakatnya dan alam sekitar terus mengalami perubahan. Mereka masih kental dengan cara-cara lama dimana unsur kepercayaan dan agama telah mencampuri segala aspek kehidupan, dan mewarnai kehidupan sosio-kultural mereka. Islam menjadi agama terbesar yang dianut oleh penduduk Palembang dan terus berkembang sejak diakui menjadi agama resmi pada Kesultanan Palembang. Kendati demikian agama lain juga turut mengalami perkembangan seperti Kristen, Budha, Hindu, bahkan Konghucu. Tradisi yang masih berkembang dan masih dijalankan masyarakat Palembang diantaranya; ritual adat perkawinan, ritual hamil tujuh bulan, tahlil, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena budaya bagi masyarakat akan kepemilikan tradisi masa lalunya dalam terpaan proses modernisasi.

Pada zaman Hindia Belanda, tidak ada perbedaan mencolok antara masyarakat Kota dan masyarakat pedalaman. Pada zaman ini system administrasi berdasarkan aturan resmi dan syariat berdasarkan ajaran Islam. Khusus untuk orang-orang di Palembang, gadis yang sudah menikah masih dapat menikmati banyak keringanan dan dapat tinggal di rumah yang sama dengan orang tua mereka. Sementara anak lelaki mereka yang sudah berkeluarga harus keluar dan tinggal bersama di rumah istrinya. Kendati demikian, harta warisan tidak serta merta jatuh pada anak perempuan yang tinggal bersama orang tuanya, namun dalam masalah ini (*faraid*) tetap berlaku hukum

⁵⁸H.A. Dahlan, *Risalah Sejarah*...., hal. 14

Islam, dimana anak laki-laki akan memperoleh bagian yang jauh lebih banyak dari anak perempuan.

Tradisi yang telah berkembang ini, rupanya tidak berlaku bagi masyarakat pedalaman. Di masyarakat pedalaman, keluarga “batih” hanya terdiri dari anak-anak yang belum menikah, dan terkadang bersama menantu perempuan dan cucunya. Seperti suku-suku lain di Indonesia, transisi penting bagi suku Palembang adalah pernikahan. Menurut masyarakat Palembang, pernikahan ideal saat ini adalah pernikahan antara dua sepupu, dan orang tua adalah saudara lelaki dan perempuan (saudara kandung), tetapi mereka tidak diharuskan. Banyak anak muda yang masih menikahi gadis yang bukan sepupu. Namun, pernikahan yang dianggap dilarang adalah antara anak-anak dan ayah / ibu, antara saudara dan saudari, antara putra dan wanita (saudara kandung), antara paman / bibi dan keponakan, dan antara nenek dan cucu.⁵⁹

Pada saat yang sama, sistem kekerabatan yang berlaku untuk komunitas asli Palembang tidak hanya didasarkan pada silsilah, tetapi juga pada kebiasaan dimasa Kesultanan Palembang. Tradisi yang berlaku selama Kesultanan Palembang dan terus mentradisi adalah untuk menyusui anak-anak mereka sendiri untuk wanita lain yang tidak terkait lainnya. Oleh karena itu, secara tidak langsung, anak yang disusui memiliki banyak saudara yang akan memberinya perlindungan di masa depan. Tradisi ini didukung oleh hukum Islam, dan telah berkembang dengan cara yang memungkinkan orang-orang biasa untuk menemukan bentuk mereka sendiri di masyarakat pedalaman, dan sering disebut sebagai "berfajar."

⁵⁹Makmun Abdullah, dkk., *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional), hal. 23

Tradisi ini adalah metode tersendiri, biasanya diterapkan oleh para pemimpin komunitas pertanian tradisional dalam kerangka membangun sistem kekerabatan turun temurun untuk mendapatkan dukungan sosial dan material.⁶⁰

Bahasa yang digunakan oleh penduduk Palembang sama dengan bahasa daerah lain, seperti bahasa Austronesia. Di sisi lain, bahasa Palembang yang dituturkan oleh penduduk sekitar hampir mirip dengan bahasa Jawa (kromo inggil), sedangkan bahasa Melayu yang digunakan sehari-hari memiliki aksentu tertentu. Hampir semua bahasa di Palembang mudah dipahami, dengan pengecualian Komerling dan Kayuagung, yang sama sekali tidak bisa dipahami di daerah lain. Ini mungkin karena bahasa daerah berkembang melalui proses penyelesaian dan isolasi alam, dan proses berlangsung cukup lama antara kelompok etnis atau sub-etnis yang berbicara bahasa ini. Bahasa Melayu adalah contoh dari bahasa Palembang yang digunakan setiap hari, Bahasa Melayu biasanya diakhiri dengan bunyi (O). seperti, kemana (*kemano*), apa (*apo*), dua (*duo*), lima (*limo*), dll.⁶¹ Oleh sebab itu, struktur Bahasa Palembang adalah Bahasa Melayu yang memiliki dialek tersendiri yang dijadikan sebagai Bahasa penghubung antar daerah.

Meskipun sebagian besar orang Palembang telah percaya pada Islam untuk waktu yang lama, mereka masih dapat melihat sisa-sisa sistem kepercayaan asli pada era mereka sebelumnya. Sisa-sisa dari sistem kepercayaan ini dapat dilihat pada orang yang masih percaya pada proses penyembuhan

⁶⁰Makmun Abdullah, dkk., *Kota Palembang...*, hal. 24

⁶¹Makmun Abdullah, dkk., *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984), hal. 24

berbagai penyakit yang menimpa anggota keluarga mereka. Mereka masih mendatangi dan percaya dukun dengan melakukan ritual di makam tertentu, dan bahkan banyak orang masih larangan-larangan (baca: pamali) dalam lingkaran kehidupan sosial mereka.⁶²

Perkembangan agama Islam yang cukup pesat di Kota Palembang dan sekitarnya, menjadikan Palembang sebagai daerah yang subur bagi perkembangan Sarekat Islam (SI), dimana organisasi tersebut masuk di Palembang pada bulan agustus tahun 1913 yang pertama kali diperkenalkan oleh Tjokroaminoto.⁶³ Sejarah kedatangan SI di Palembang telah melahirkan kelompok baru golongan berpendidikan, yang sebagian besar berharap untuk menjadi Pegawai Negeri yang mencari tempat di masyarakat. Kesatuan antara penduduk asli kelas menengah Bumiputera, kelas terdidik dan kelas pekerja menjadi dasar bagi kebangkitan gerakan nasional. Dengan kata lain, gerakan nasional adalah produk dari budaya kota sebagai reaksi historis, yaitu kelas baru dan membutuhkan ideologi baru untuk membuktikan gerakannya di masyarakat kolonial dan pemerintah.⁶⁴

Perkembangan dan pertumbuhan SI di Palembang yang cukup pesat, salah satunya adalah SI memiliki daya Tarik dan menawarkan tujuan-tujuan konkret terkait ekonomi. Mestika Zed menjelaskan bahwa tujuan-tujuan konkret tersebut adalah; *pertama*, membebaskan pajak dan kerja paksa. *Kedua*, memberikan perhatian yang besar dalam

⁶²J.L. Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, terjemahan Soeganda Purbakawatja (Jakarta: Bhratara, 1971), hal. 37

⁶³Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*(Jakarta: PustakaLP3ESIndonesia, 2003), hal. xxxvii

⁶⁴Makmun Abdullah, dkk., *Kota Palembang*...., hal. 21

urusan-urusan sosial-keagamaan, amal, kematian, dan sebagainya. *Ketiga*, penegakan hukum dan melindungi rakyat dari ketidakadilan. Dan *keempat*, membantu seluruh anggota partai di seluruh Hindia Timur Belanda. Dukungan terhadap tujuan-tujuan tersebut mampu menjadikan SI semakin berkembang dan bahkan mampu meraih keanggotaan sebanyak 33.400 orang pada tahun 1916 dan menjadikan SI sebagai organisasi terkuat di luar pulau Jawa.⁶⁵ Selain itu, organisasi ini mampu merekrut berbagai anggota dari berbagai kalangan bahkan sampai ke pelosok daerah. Terlebih banyak diantara pengurus cabang merupakan orang terpendang. Seperti; Pahing Abdoel Wahid, Haji Hasan, Hakim Haji Muhammad Yunus dan sebagainya.⁶⁶

Tidak hanya SI yang berkembang cukup pesat di Palembang, organisasi lain yang tak kalah berpengaruhnya adalah Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Kedua organisasi ini telah meningkatkan kesadaran organisasi yang didasarkan pada nasionalisme murni. Kesadaran baru dalam pengajaran dan budaya telah melahirkan perkembangan baru dalam masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan pengajaran. Wujud dari perjuangan kedua organisasi tersebut adalah Muhammadiyah membangun Sekolah Rakyat (SR) di empat Ulu, Sekolah Rakyat di jalan Mayor Ruslan dan HIS Muhammadiyah di 24 Ilir, dan *Schakel School* di 4 Ulu serta Mulo Muhammadiyah. Demikian juga dengan Nahdhatul Ulama' turut serta mengolah madrasah-madrasah yang telah diperbaharui setingkat dengan Sekolah Dasar.⁶⁷

⁶⁵Mestika Zed, *Kepialangan Politik*,... hal. xxvi

⁶⁶Mestika Zed, *Kepialangan Politik*,... hal. 127-128

⁶⁷Makmun Abdullah, dkk., *Kota Palembang*..., hal. 104

C. Islamisasi dan Religiusitas Masyarakat

Islam masuk dan berkembang di Palembang tentu melalui proses yang cukup panjang, bahkan tidak jarang menjadi perdebatan dikalangan para ahli mengenai kapan masuknya Islam pertama kali di Palembang. Taufik Abdullah membagi tiga fase terkait proses Islamisasi yakni: datang (adanya jejak Islam disuatu tempat), berkembang (ditemukan tempat ibadah), dan kemunculan Islam sebagai kekuatan politik (sultan memerintah).⁶⁸Oleh karena itu, berdasarkan penelusuran berbagai sumber, tidak ditemukan ahli yang berhasil menampilkan sumber daya tertulis terkait dengan tanggal dan tahun ketika Islam memasuki Palembang.

Untuk mengetahui kapan masuknya Islam di Palembang, tentu tidak terlepas dengan masuknya Islam ke nusantara. Oleh karena itu, tiga seminar diadakan pada seminar "*The Coming of Islam to Indonesia*" yang diadakan di Medan untuk pertama kalinya pada tahun 1963. Adapun kesimpulan seminar ini diantaranya 1) Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, permulaan masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Arab pada abad pertama kalender Hijriah atau abad ke-7M. 2) Wilayah pertama yang dikunjungi oleh Islam adalah wilayah pesisir Sumatera, dimana raja Islam pertama di Aceh. Dari kedua kesimpulan ini, masih belum bisa dipastikan bahwa adanya interaksi antara penduduk setempat dengan para pedagang Arab di pelabuhan Sumatera, yang menjalankan ajaran Islam, lantas menjadikan penduduk setempat segera memeluk Islam. Keberadaan raja Islam pertama di Aceh sebenarnya bisa ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah Malik as Saleh yang kurun waktunya cukup jauh kemudian

⁶⁸Taufik Abdullah, *Agama, Etos, Kerja dan Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1979), hal. 1

yakni abad ke-7 Hijriah. Dimana yang menjadi acuan adalah berita asing yang menyebutkan orang-orang Islam di Sumatera abad-abad pertama Hijriah.⁶⁹

Kedua, pada tahun 1982 diadakan seminar internasional di Jakarta yang berkaitan dengan Islam di Asia Tenggara, dan yang *ketiga* diadakan di Aceh pada tahun 1983. Hasil seminar ini diperoleh kesimpulan bahwa Islam sampai Indonesia pada abad ke-7 M. Bukti ini dilandasi bahwa kedatangan para pedagang Muslim ke Indonesia bertepatan dengan kedatangan Islam berdasarkan fakta bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan Islam.⁷⁰ Keputusan seminar ini sejalan dengan hasil seminar yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Tingkat I Sumatera Selatan pada tanggal 27-29 November 1984 di Palembang yang menyatakan bahwa Islamisasi di Palembang diperkirakan terjadi pada abad ke-7 dan 8, yang saat itu Palembang adalah merupakan pusat kerajaan Sriwijaya.⁷¹

Pada masa tersebut, kerajaan Sriwijaya masih kuat. sehingga para saudagar Islam yang notabene adalah pedagang dari Timur Tengah diterima dengan baik dan mulai bermukim di Pelabuhan Palembang. Penguasa Sriwijaya kala itu memberikan izin dan kesempatan bagi mereka untuk memeluk dan menunaikan ibadah sesuai ajaran Islam.⁷² Peristiwa

⁶⁹Uka Tjandrasasmita dan Hasan Muarif Ambay, "Sejarah Masuknya Islam ke Sumatera Selatan", dalam Gadjanata, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 13

⁷⁰Azhar Arsyad, "The Thevelopment of Islam in Indonesia", *Presented at the Universita Di Napoli "L'Orientale"* on the 12th of May, (Italy, 2010), hal. 1-2

⁷¹Husni Rahim, *Sistem Otoritas...*, hal. 48-49

⁷²Kesimpulan ini didukung oleh sumber-sumber lain tentang sejarah Arab dan Cina yang menyatakan bahwa pada abad ke-9 M di

tersebut berdasarkan pendapat Naquib al-Attas terjadi sekitar abad ke-7 M. Dimana para pedagang melakukan peran ganda dengan menjadi misionaris,⁷³ dan menjadi awal masuknya Islam di Palembang. Dengan kata lain, jalan perdagangan dapat dianggap sebagai jalan budaya selama ratusan tahun, dan pada saat yang sama telah menjadi jalan bagi Islam untuk menembus pulau-pulau di nusantara termasuk Palembang. Dimana menurut Brian Harrison Palembang merupakan salah satu kota bandar yang berperan sebagai *revertport capital* di zaman kerajaan Sriwijaya.⁷⁴

Pada tahap selanjutnya, sebelum munculnya Kesultanan Islam di Palembang, Palembang menjadi tempat lahirnya seorang Sultan Islam pertama di pulau Jawa, yaitu Raden Fatah, sultan pertama Demak.⁷⁵ Raden Fatah merupakan didikan Ario Abdillah, yang masih diperintah oleh kerajaan Majapahit.⁷⁶ Dari Ario Abdillah kemudian menjadi penerus

Palembang telah ada Muslim pribumi di kalangan masyarakat kerajaan Sriwijaya. Mereka tidak hanya diberi hak sebagai warga kerajaan, akan tetapi mereka juga berperan dalam perdagangan duta kerajaan ke Arab dan Cina. Lihat, azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 36-43

⁷³Azhar Arsyad, "The Thevelopment of Islam...", hal. 2

⁷⁴Ma'moen Abdullah, "Masuk dan Berkembangnya Islam pada Zaman Kesultanan Palembang: Suatu Analisis" dalam Gadjanata, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 37

⁷⁵Apabila merujuk pada cerita tutur Jawa, Raden Patah merupakan Putra Prabu Brawijaya yang berasal dari kerajaan Majapahit, dari seorang wanita keturunan Cina, yang pada saat hamil diserahkan kepada Adipati Palembang Ario Damar. Lihat, Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang IV, 1981), hal. 148

⁷⁶Ario Abdillah merupakan nama lain Ario Damar setelah memeluk Islam. Ia merupakan putra Raja Majapahit yang diutus ke Palembang bersama dengan istrinya yang masih keturunan Cina Muslim dan dalam keadaan hamil. Pada masa itu, penduduk Palembang sudah

raja-raja Islam Palembang. Karena tipologi Maesan (batu nisan) dari raja-raja Palembang Geding Suro, Ratu Sinuhun dan Lemah Abang, bukti arkeologis berupa makam raja-raja dan raja-raja Palembang memiliki bentuk dan pola dekoratif yang sama seperti makam dan Raja Maesan Raja-raja Demak. Di makam Raja Demak dekat Masjid Agung Demak.

Historiografi Palembang pasca runtuhnya kekuasaan Majapahit tidak banyak dihasilkan. Setelah berakhirnya kerajaan Majapahit, Palembang menjadi daerah protectoral Kerajaan Islam Demak. Oleh sebab itu, secara tidak langsung Palembang menjadi bagian dari kerajaan Islam. Dimana sebelumnya Ario Damar atau Ario Abdillah merupakan adipati Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu. Tentunya setelah berada di bawah kekuasaan Islam, kegiatan-kegiatan yang bercorak keislaman di Palembang semakin Nampak. Bisa jadi, hal inilah yang menjadi alasan Winstedt yang mengatakan bahwa Islamisasi Palembang terjadi mulai abaf ke-15 M.⁷⁷ Selama dua abad berikutnya, yakni abad ke-16 M dan abad ke-17 Palembang masih di bawah kekuasaan Raja-raja Islam di Tanah Jawa. Sedangkan pemerintahan Islam di Palembang baru berdiri sendiri pada akhir abad ke17 M.⁷⁸

banyak yang memeluk Islam. Kemudian setelah beberapa lama, istri Ario Abdillah melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Patah yang selanjutnya menjadi panembahan Palembang. Tepat pada tahun 1500 M Raden Patah menjadi sultan kerajaan Demak yang memisahkan diri dari Majapahit atas dukungan Wali Songo atas prakarsa Sunan Ampel. Maka, sejak saat itu Palembang menjadi wilayah yang berada di bawah perlindungan kerajaan Islam Demak. Lihat, Ahmad Dahlan, *Sejarah Melayu* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), hal. 461

⁷⁷Husni Rahim, *Sistem Otoritas...*, hal. 51

⁷⁸Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Karesidenan Palembang, 1925 – 1942* (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), hal. 29

Islam di Palembang pada kurun abad ke-16 baru menampakkan aktifitasnya. Kendati dari berbagai pendapat di atas, Islam telah masukke Palembang sejak dari abad ke-7 M. salah satu wujud dari aktifitas Islam pada abad ke-16 ini adalah berdirinya LanggardanMasjid sebagai tempat kegiatan ibadah dan keagamaan umat Islam Palembang. Hanya saja belum ditemukan catatan yang pasti terkait kapan masjid ini didirikan. Namun, dari catatan belanda masjid ini terbakar saat espedisi yang dilakukan Mayor Joan Van der Laen dengan menyerang Palembang pada tahun 1659, yang mana ini merupakan peperangan pertama Belanda dengan Palembang. Dari catatan ini pula diketahui bahwa Palembang telah memiliki masjid di daerah pemukiman. Selanjutnya, pada tahun 1663 di bangun masjid baru di Palembang sebagai pengganti masjid yang lama.⁷⁹

Menurut berita Belanda, Wellan dalam laporannya menuturkan bahwa espedisi Mayor Joan Van der laen pada tahun 1659 ketika itu menyerbu Palembang dan mengakibatkan Masjid yang berada di Palembang terbakar. Oleh sebab itu Masjid yang terbakar tersebut di bangun kembali pada tahun 1663. Peristiwa penyerangan tersebut merupakan perang pertama yang dilakukan Belanda dengan masyarakat Palembang. Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat dikatakan bahwa rupanya masyarakat Palembang sudah memiliki Masjid,dan masjid tersebut dibangun di kota, tepatnya di Keraton Kota Cawang (sekarang kompleks Pusri). Keraton ini menjadi tempat pertama rombongan Ki Gedeng Tua tinggal, yang dalam sejarah disebut sebagai salah seorang yang pertama kali mendirikan Masjid di Palembang.⁸⁰

⁷⁹Husni Rahim, *Sistem Otoritas...*, hal. 52

⁸⁰Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya" dalam Gadjanata, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI-Press, 1986),hal. 114

Sistem Islamisasi semakin menunjukkan perkembangannya pada abad ke-17, dimana pada abad ini telah berdiri masjid, dan munculnya berbagai kegiatan keagamaan. Selain itu, pada abad ini telah berdiri pejabat tinggi agama sebagai bagian dari pranata keagamaan yang tergambar dalam kontrak Palembang, bulan Oktober 1642. Pemberlakuan Hukum Islam juga telah menjadi ketentuan resmi keraton. Penting untuk dijadikan catatan bahwa, kendati Islam mulai menampakkan perkembangannya, namun perkembangan tersebut berjalan cukup lamban, hal ini dikarenakan oleh dua faktor berdasarkan pendapat Taufik Abdullah, yaitu; *pertama*, Para sultan dan istana kurang berperan dalam proses Islamisasi, melainkan mereka lebih disibukkan dengan urusan politik dan ekonomi. *Kedua*, para ulama' dan lebih khusus ulama' birokrat disibukkan untuk melayani dan memenuhi tugas-tugas dari istana, sehingga urusan Islamisasi menjadi terbengkalai. Kendati demikian, pengaruh ulama' pada masa ini juga bergantung pada kemampuannya untuk meyakinkan sultan.⁸¹

Potret keagamaan berdasarkan historiografi Palembang pada abad ke-19, berdasarkan laporan pejabat Belanda ditemukan bahwa penduduk Palembang masih *heidench* (Hindu dan animisme). Bahkan menurut catatan yang ada, masyarakat Palembang tidak taat beragama. Selain itu, penduduk Mekkekau (salah satu nama daerah di pedalaman) sembahyang mingguan pada hari Rabu, bukan hari Jum'at. Sedangkan apabila terjadi kematian pada orang Islam, saat dikubur kepalanya dihadapkan ke arah Timur bukan ke arah Barat lazimnya masyarakat Islam. Melihat fenomena ini,

⁸¹Taufik Abdullah, "Perkembangan Islam di Sumatera Selatan pada Abad ke-19", dalam *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 206-210

tentunya menimbulkan berbagai persepsi dikalangan pejabat Belanda, mereka meragukan tingkah laku masyarakat Palembang yang dianggap berbeda dengan kebiasaan masyarakat Islam pada umumnya. Terlebih ketika Islam telah menjadi bagian “agama resmi” kesultanan yang dilambangkan dengan gelar “sultan”.⁸²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam masuk dan berkembang di Palembang diperkirakan terjadi pada abad ke-7 M. dengan berbagai argumentasi dan bukti pendukungnya. Meskipun tingkat religiusitas masyarakat Palembang pada masa awal-wal ini cukup rendah. Namun, Islam di Palembang mulai menampakkan intensitasnya terjadi sejak abad ke-17 dan 18 M. masa kesultanan Palembang Darussalam, serta abad ke-19 dan awal abad ke-20 selama masa pemerintahan Kolonial Belanda.

⁸²Dalam catatan *Begin en Voortgang* menyimpulkan bahwa masyarakat Palembang senang pada anjing, banyak kawin dengan orang Cina, senang main catur pada bulan puasa. Bahkan menurut Drewes, dalam catatan *Verhandeling No. 23* menyatakan orang pedalaman Palembang tidak taat beragama bahkan masih kafir, bahkan memuja berhala. Hal ini membuktikan bahwa abad ke-17 Islam belum mengakar kuat di pedalaman Palembang. Lihat, Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi...*, hal. 54. Dan Lihat pula, Salman Aly, “Sejarah Kesultanan Palembang” dalam *Gadjanata, Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.140.

BAB IV

SEBARAN PENDUDUK DAN KOMPOSISI PEMILIH



A. Persebaran Penduduk

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Apabila dibandingkan dengan seluruh negara, maka jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke tiga jumlah penduduk terbesar dunia, dibawah Cina dan India. Dengan populasi penduduk yang sangat besar ini, dengan posisi sebagai negara berkembang tentu Indonesia memiliki berbagai problem kependudukan. Salah satunya adalah distribusi populasi penduduk yang tidak merata di semua wilayah dengan tingkat pertumbuhan populasi yang cukup tinggi.

Karena berbagai alasan, distribusi penduduk biasanya diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu daerah atau wilayah ke daerah lain, yang akan menyebabkan perubahan penduduk. Proses migrasi penduduk ini terjadi melalui imigrasi, emigrasi dan transmigrasi. Perpindahan penduduk atau yang lebih dikenal dengan istilah migrasi biasanya membawa hal-hal yang penting bagi karakteristik atau ciri masing-masing penduduk di suatu daerah atau bahkan suatu negara, dan migrasi terus terjadi secara teratur, dengan intensitas dan perbedaan yang berbeda di setiap wilayah.

Migrasi juga turut berdampak pada persebaran penduduk di Kota Palembang yang tidak merata diberbagai wilayah di masing-masing kecamatannya. Ada kecamatan yang padat penduduk, namun ada juga kecamatan yang penduduknya masih sangat sedikit. Hal ini pada kelanjutannya membawa dampak pada tingkat kehidupan dan pembangunan masyarakatnya, terutama apabila ditinjau dari berbagai aspek seperti; aspek pemenuhan kebutuhan pokok, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup yang memadai serta pada aspek sosial kemasyarakatannya.

Distribusi penduduk suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari konsep kemajuan sosial atau perkembangan kemajuan kebudayaan suatu daerah dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks. Jika diperhatikan, terdapat dua faktor yang akan memengaruhi persebaran penduduk, yakni, faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong umumnya dikaitkan dengan masalah ekonomi, politik, agama, bahkan adat-istiadat. Sedangkan faktor penarik sifatnya umum dan lebih pada faktor ekologis. Misalkan revolusi industry, korban perang dan pembukaan daerah pertanian baru.⁸³

Persebaran penduduk di Kota Palembang, dapat dilihat dari angka pertumbuhan penduduknya. Selain itu, juga dapat dilihat dari luas masing-masing kecamatan dan kepadatan penduduk Kota Palembang dengan rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan. Populasi penduduk Kota Palembang pada tahun 2019 adalah 1.662.893 Jiwa, meningkat 1,47% dari tahun 2018 sebesar 1.643.488 Jiwa yang berarti bahwa populasi penduduk Kota Palembang meningkat sebesar

⁸³Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: Refika-Aditama, 2011), hal. 173-176

1,47%. Menurut total persentase (tabel 2.1) pertumbuhan penduduk pada tahun 2019, distribusi penduduk Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 4.1

Persebaran dan Jumlah Penduduk Kota Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (<i>sex</i>)		Jumlah Total
		L	P	
1	Sematang Borang	18.364	18.081	36.445
2	Bukit Kecil	24.719	25.582	50.301
3	Gandus	33.455	32.327	65.782
4	Iilir Barat Satu	70.675	70.869	141.544
5	Iilir Timur Satu	38.646	40.622	79.268
6	Kalidoni	56.899	56.033	112.932
7	Iilir Timur Tiga	43.495	42.476	85.971
8	Plaju	45.416	45.318	90.734
9	Kertapati	46.853	45.231	92.084
10	Jakabaring	47.173	46.098	93.271
11	Sako	46.644	46.682	93.326
12	Kemuning	46.938	47.059	93.997
13	Seberang Ulu Satu	47.496	46.626	94.122
14	Iilir Timur Dua	47.897	48.066	95.963
15	Alang-alang Lebar	49.375	59.162	98.537
16	Seberang Ulu Dua	53.897	53.204	107.101
17	Iilir Barat Dua	36.696	36.573	73.269
18	Sukarame	79.537	78.709	158.246
	Palembang	834.175	828.718	1.662.893
	2018	824.086	819.402	1.643.488

Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2018 - 2019, BPS Kota Palembang Tahun 2020

Jumlah penduduk Kota Palembang sebagaimana dilihat pada table 2.1, pada tahun 2018 berjumlah 1.643.488 jiwa. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk sebesar 1.662.893 jiwa. Apabila di *breakdown* sampai pada tingkat kecamatan jumlah penduduk Kota Palembang tingkat persebaran dan jumlah penduduk terendah berada pada kecamatan Sematang Borang dengan jumlah sebesar 36.033 jiwa pada tahun 2018, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk sebesar 36.445 jiwa. Sedangkan populasi penduduk terbesar terdapat di kecamatan Sukarame dengan jumlah penduduk 158.246 pada tahun 2019. Namun terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan di Kecamatan Kalidoni dan Ilir Barat Satu masing-masing 112.932 dan 141.544 jiwa.⁸⁴

Ketika dicermati, populasi penduduk di Kota Palembang cukup beragam, terutama di beberapa kecamatan tertentu, terdapat populasi penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan populasi di daerah lain. Pada kecamatan dengan jumlah penduduk yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kecamatan memiliki pemerintahan, atau kelengkapan fasilitas baik kesehatan, pendidikan, peribadatan, serta tingkat mobilitas yang tinggi dalam perdagangan dan jasa. Sedangkan pada kecamatan yang pertumbuhan penduduknya rendah juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kurang tersedianya sarana kesehatan dan pendidikan serta sarana pemerintahan. Ditambah dengan kondisi alam yang kurang mendukung, misalkan daerah rawan banjir, kondisi jalan yang belum memadai, rawan kejahatan,

⁸⁴BPS Kota Palembang, *Kota Palembang dalam Angka: Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan* (Palembang: CV Bahtera Safeti, 2020), hal. 49

sehingga sebagian penduduk lebih memilih untuk tinggal pada daerah yang memiliki sarana dan keamanan yang jauh lebih memadai.

Pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemerataan penduduk, terutama dalam pembangunan. Setidaknya pembangunan yang dilakukan harus selalu terkait dengan daya dukung lingkungan, dan dapat menciptakan peluang kerja serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya, terutama bagi warga setempat, agar tidak menimbulkan urbanisasi dan masalah sosial lainnya. Pemerintah juga perlu menekan laju pertumbuhan penduduk pada daerah yang penduduknya padat dengan menggalakkan program KB (Keluarga Berencana) dengan membatasi jumlah anak sebagai upaya mengurangi jumlah angka kelahiran, selain itu pemerintah dapat menunda masa perkawinan agar jumlah angka kelahiran dapat dibatasi.

Tabel 4.2

Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Palembang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per (Km ²)
1	Sematang Borang	36,98	36.445	985
2	Bukit Kecil	9,92	50.301	5.071
3	Gandus	68,78	65.782	956
4	Iilir Barat Satu	19,77	141.544	7.159
5	Iilir Timur Satu	6,50	79.268	12.195
6	Kalidoni	27,92	112.932	4.045
7	Iilir Timur Tiga	14,76	85.971	5.825
8	Plaju	15,17	90.734	5.981
9	Kertapati	42,56	92.084	2.164
10	Jakabaring	9,16	93.271	10.183
11	Sako	18,04	93.326	5.173

12	Kemuning	9,00	93.997	10.444
13	Seberang Ulu Satu	8,28	94.122	11.367
14	Iilir Timur Dua	10,82	95.963	8.869
15	Alang-alang Lebar	34,58	98.537	2.849
16	Seberang Ulu Dua	10,69	107.101	10.018
17	Iilir Barat Dua	19,77	73.269	7.159
18	Sukarame	51,46	158.246	3.075
	Jumlah	400,61	1.662.893	4.151

Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2019, BPS Kota Palembang 2020

Pada tahun 2019, kepadatan dan persebaran penduduk Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 2.2 dengan membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah masing-masing kecamatan. Dari ke-18 kecamatan yang tersebar di Kota Palembang, kecamatan Iilir Timur Satu memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan jumlah 12.195 orang per km² diikuti oleh kecamatan Seberang ulu Satu dengan jumlah 11.367 orang per km². Tingkat kepadatan penduduk pada kecamatan Iilir Timur Satu menempati urutan tertinggi dari kepadatan penduduk Kota Palembang secara keseluruhan. Adapun kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah justru berada pada kecamatan Gandus dengan jumlah 956 orang per km².

Adanya distribusi penduduk yang kurang merata, serta kepadatan penduduk di berbagai wilayah di Kota Palembang, seringkali membawa berbagai persoalan. Adapun persoalan mendasar yang ada adalah kebutuhan terhadap akses pelayanan pendidikan, kesehatan, kebutuhan perumahan serta munculnya masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, tindak kejahatan, munculnya lingkungan yang kumuh dan keamanan masyarakatnya. Karena itu, distribusi penduduk menjadi sangat

penting dan harus diperhatikan secara lebih serius oleh pemerintah daerah, terutama selama implementasi dan pengembangan. Setidaknya pembangunan harus terkait dengan daya dukung lingkungan, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja, fasilitas kesehatan dan pendidikan dan pembatasan penduduk di daerah-daerah terpadat.

Deskripsi komposisi penduduk dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Untuk itu, berbagai komposisi penduduk dapat dibuat oleh peneliti, seperti komposisi penduduk menurut usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, daerah tempat tinggal, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, bahasa, status perkawinan, dan lain sebagainya. Sedangkan komposisi penduduk ditinjau dari karakteristik pemilih dalam pemilihan umum diantaranya dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, usia, dan agama serta beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Surbakti mengatakan, perilaku pemilih adalah kegiatan dalam upaya menentukan pilihan yang dilakukan oleh seseorang, sebagai rangkaian dari proses Pemilu, antara memilih maupun tidak memilih.⁸⁵

Jika dilihat dari tingkat kepercayaan dan agama penduduk Palembang, maka komposisi pemilih berdasarkan agama di Kota Palembang cukup beragam. Dimana masyarakat kota Palembang mayoritas memeluk agama Islam. Namun agama lain seperti Protestan, Katolik, Hindu dan Budha juga berkembang cukup pesat. Dalam kontestasi Pemilu memperebutkan suara umat beragama terbilang cukup penting, terlebih isu-isu agama dalam kontestasi pemilu masih sering dihembuskan oleh para politisi untuk meraup suara. Begitu

⁸⁵Ramlan Surbakti, *Partai Pemilu dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997), hal. 105.

juga dengan Palembang, isu-isu agama dan penggunaan symbol-simbol agama dalam pemilu masih marak terjadi. Pun demikian kehidupan beragama di Palembang antara penganut agama yang berbeda masih sangat baik dan berada pada kondisi penuh kedamaian, hal ini karena peran pemerintah dan tokoh agama dalam membina umatnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya komposisi masyarakat Palembang berdasarkan agama bisa dilihat pada table dibawah.

Tabel 4.3
Komposisi Masyarakat Kota Palembang
Berdasarkan Agama

No.	Kecamatan	Agama					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Sematang Borang	36.104	2.186	999	6	207	-
2	Bukit Kecil	46.676	836	671	62	1.578	-
3	Gandus	67.304	189	165	3	117	-
4	Iilir Barat Dua	69.722	992	806	25	2.877	-
5	Iilir Timur Satu	60.381	4.686	5.934	106	17.229	-
6	Kalidoni	114.790	3.086	1.652	63	3.081	-
7	Iilir Timur Tiga	-	-	-	-	-	-
8	Plaju	94.103	728	380	47	692	-
9	Kertapati	98.316	359	112	28	561	-
10	Jakabaring	-	-	-	-	-	-
11	Sako	86.291	3.860	2.117	72	2.764	-
12	Kemuning	84.767	2.337	1.304	17	5.042	-
13	Seberang Ulu Satu	184.811	690	501	75	2.433	-
14	Iilir Timur Dua	170.086	5.257	3.811	131	11.518	-
15	Alang-alang Lebar	88.702	2.788	945	77	4.063	-
16	Seberang Ulu	100.631	688	341	31	839	-

	Dua						
17	Iilir Barat Satu	137.109	2.220	1.555	110	6.567	-
18	Sukarame	145.383	4.812	2.556	112	3.130	-
	Jumlah	1.585.176	35.714	23.849	965	62.698	-

Sumber: BPS Kota Palembang 2020

Perilaku pemilih menurut J Kristiadi merupakan ketertarikan individu dalam memberikan hak suaranya selama proses pemilihan umum berdasarkan tiga faktor; psikologis, sosiologis dan faktor rasional pemilih. Ketiga faktor tersebut sedikit banyak sangat dipengaruhi oleh komposisi pemilih dalam suatu wilayah. Dimana komposisi pemilih kota Palembang berdasarkan jenis kelamin mengalami perubahan pada pemilu 2019. Pada pemilu tahun 2019 jumlah pemilih potensial berjenis kelamin laki-laki sebesar 550.218 jiwa, dan pemilih berjenis kelamin perempuan berjumlah 563.031 jiwa mengalami peningkatan dibandingkan dengan pemilu pada tahun 2014.⁸⁶ Angka ini hanya berbeda tipis dari pemilih potensial perempuan di kota Palembang sebesar 12.488 jiwa, lihat table 2.4.

Tabel 4.4
Komposisi Pemilih Kota Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
			L	P	
1	Sematang Borang	71	14.699	14.525	29.224
2	Bukit Kecil	76	14.607	15.658	30.265
3	Gandus	106	23.048	22.862	45.910
4	Iilir Barat Satu	231	48.169	49.683	97.852
5	Iilir Timur Satu	154	24.641	26.568	51.209

⁸⁶<https://infopemilu.kpu.go.id>

6	Kalidoni	200	40.664	41.472	82.136
7	Iilir Timur Tiga	154	27.826	28.767	56.593
8	Plaju	167	32.676	32.923	65.599
9	Kertapati	168	31.027	30.860	61.887
10	Jakabaring	140	30.277	30.858	61.135
11	Sako	153	31.380	32.279	63.659
12	Kemuning	155	28.817	29.786	58.603
13	Seberang Ulu Satu	164	30.556	29.740	60.296
14	Iilir Timur Dua	169	29.361	30.778	60.139
15	Alang-alang Lebar	148	30.058	31.336	61.394
16	Seberang Ulu Dua	173	33.772	33.684	67.456
17	Iilir Barat Satu	231	48.169	49.683	97.852
18	Sukarame	252	54.543	56.796	111.339
	Jumlah	2.804	550.218	563.031	1.113.249

Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2019, BPS Kota Palembang 2020

Pemilih perempuan adalah kelompok pemilih yang strategis, keberadaan mereka menjadi perhatian penting dan bahkan dapat menjadi faktor menentukan dalam pemilu. Para pemilih perempuan adalah semua perempuan Indonesia yang telah mencapai usia pemilih atau sudah menikah. Namun, dari perspektif pemilu dan demokrasi, pemilih tidak harus merujuk pada aspek biologis, tetapi ke perspektif sosiokultural, psikologis, dan gender.⁸⁷ Pun demikian dengan pemilih pemula (usia 17-23 tahun), mereka menjadi sasaran strategis para pelaku politik, dengan berbagai alasan. *Pertama*, pemilih pemula atau pemilih milenial dalam setiap kontestasi politik atau pemilu jumlahnya relatif besar. *Kedua*, pemilih milenial, atau pemilih baru yang pertama kali memberikan suaranya

⁸⁷Husni Kamil Manik, dkk., *Pedoman Pendidikan Pemilih* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), hal. 16-17

dalam pemilu, sehingga suara mereka menjadi penentu dalam perolehan suara.

Pemilih pemula (milenial) merupakan salah satu penentu arah demokrasi Indonesia dimasa yang akan datang terutama dalam konteks pemilu yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, peran dan keberadaan mereka menjadi sasaran strategis para pelaku politik untuk meningkatkan lagi partisipasi mereka dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Berdasarkan data untuk pada pilkada serentah tahun 2018 di 171 daerah pemilihan menurut Titi Anggraini sebanyak 160 juta lebih generasi milenial akan memberikan hak suaranya, kurang lebih sekitar 40 %, artinya jumlah mereka sangat signifikan, sehingga keberadaannya mulai didekati oleh partai politik. Selain itu, potensi lain yang dimiliki kaum milenial juga sangat mumpuni, mereka bergerak dinamis dan berpikir kritis.⁸⁸

⁸⁸ Titi Anggraini, “Suara Generasi Milenial Sangat Potensial dalam Pemilu” dalam [www.kompas.com/07 Mei 2018/diakses 08 April 2020](http://www.kompas.com/07%20Mei%202018/diakses%2008%20April%202020).

BAB V

DINAMIKA PEMILIHAN UMUM SEBELUM REFORMASI



A. Pemilihan Umum Masa Orde Lama

Pemilihan Umum, biasa disingkat Pemilu adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk mempengaruhi orang lain tanpa menggunakan paksaan, umumnya dilakukan dengan bentuk komunikasi masa, lobi politik dan kegiatan publik lainnya. Morrissan mendefinisikan pemilu sebagai cara untuk mengetahui aspirasi orang-orang yang terkait dengan kebijakan dan tujuan masa depan Bangsa.⁸⁹ Setidaknya menurut Prihatmoko diantaranya adalah sebagai sarana memilih pemimpin, pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakilnya yang terpilih, sebagai sarana dalam memobilisasi, menggerakkan atau menggaling dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan berpartisipasi dalam proses politik.⁹⁰

Jika merujuk pada apa yang dikatakan John Locke dan Rousseau bahwa lahirnya pemilihan umum berangkat dari gagasan besar mereka terkait demokrasi. Dimana demokrasi

⁸⁹Morrissan, *Hukum Tata Negara Era Reformasi* (Jakarta: Ramdina Prakarya, 2005), hal. 17

⁹⁰Joko. J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP21, 2004), hal. 19

menurut mereka adalah diperolehnya keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bagi setiap individu dalam berbagai bidang.⁹¹ Oleh sebab itu, dalam pemilihan umum harus menjunjung tinggi nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijalankan warga negara serta sebagai instrumen negara baik pada tingkat legislative, eksekutif dan yudikatif. Hal ini dapat diwujudkan dengan pembentukan partai politik yang nantinya akan menjadi wadah aspirasi masyarakat secara lebih luas, di dalamnya berkumpul kepentingan public, tempat individu-individu menyalurkan aspirasinya dalam politik, juga menjadi kontrol untuk pemerintah dari luar system dengan membangun oposisi.⁹² Maka dari itu, dalam konteks system demokrasi, partai politik menjadi lembaga agregasi politik terbesar.

Selain itu, dalam sejarah politik Indonesia, tiga bulan setelah Sukarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah saat itu berharap untuk mengadakan pemilihan pada awal tahun 1946. Usulan Presiden Mohammad Hatta tentang pembentukan partai politik pada 3 November 1945. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR akan diadakan pada bulan Januari 1946. Kendati demikian pelaksanaan Pemilu yang pertama baru dapat diselenggarakan setelah sepuluh tahun maklumat itu dibuat. Penundaan pelaksanaan pemilu tersebut salah satunya adalah situasi politik yang tidak menentu, sehingga Pemilu pertama

⁹¹Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Refresentasi", dalam *JPP: Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3. No.1 (2014).

⁹² Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis* (Washington DC: National Democratic Institute, 2011), hal. 3

dilaksanakan pada tahun 1955 meskipun meleset dari tujuan maklumat sebelumnya.

Historiografi bangsa Indonesia mencatat bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) secara nasional diselenggarakan pertama kali pada tanggal 29 September dan bulan Desember tahun 1955. Diskusi mengenai pemilihan ini datang di bawah inisiatif Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS), mereka mulai berkuasa sejak 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950. Kabinet yang berhasil melakukan pemilihan pertama adalah kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Pada saat itu setidaknya ada enam kabinet atau pemerintah yang telah mencanangkan aktivitas politik sebagai program kerjanya.⁹³ Dimana Pemilu 1955 adalah pemilu Orde Lama berdasarkan demokrasi liberal.

Rencana untuk melaksanakan Pemilu secara nasional pertama kali dimunculkan sejak awal revolusi pada tanggal 5 Oktober 1945. Sebelum Pemilu secara nasional berlangsung, Pemilu di tingkat Propinsi sudah pernah dilaksanakan yakni tahun 1946 di karesidenan Kediri dan Surakarta. Sedangkan Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1951 dan awal tahun 1952 diadakan di Sulawesi (Minahasa, Sangir-Talaud, Kotapraja Makassar) dan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹⁴ Pemilu yang berlangsung tersebut diselenggarakan dengan system Pemilu yang berbeda-beda, sehingga masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi pengalaman berharga bagi pemerintah untuk melaksanakan Pemilu nasional.

⁹³Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 155

⁹⁴Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hal. 3-4

Untuk melaksanakan Pemilu secara nasional diperlukan perencanaan dan prasarat dasar tertentu yang harus dipenuhi oleh bangsa Indonesia kala itu. Salah satunya adalah bangsa Indonesia harus sudah menyelesaikan persoalan dasar tentang keberadaan negara, dengan mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. Termasuk situasi politik yang ada didalam negeri. Dimana pelaksanaan Pemilu dapat membawa perubahan politik serta dapat mengukuhkan system politik yang sedang berjalan. Gangguan keamanan di beberapa daerah sebagaimana yang terjadi di Aceh dan Jawa Barat menjadi salah satu penyebab pemerintah menunda pelaksanaan Pemilu sehingga baru terlaksana pada tahun 1955, termasuk penundaan Pemilu tahun 1971 dengan alasan yang sama.⁹⁵

Situasi politik yang tidak menentu, tercermin pada krisis kabinet yang berulang-ulang. Perseteruan perwira tinggi angkatan darat dan pemerintah semakin membuat kehidupan politik tidak stabil, dan bahkan sempat terjadi keadaan darurat meskipun hanya sebentar. Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi rekayasa politik dengan melakukan demonstrasi terhadap pemerintah yang didukung oleh angkatan darat agar Presiden membubarkan Parlemen Sementara gagal dicapai. Dinamika ini semakin memunculkan pertarungan kekuasaan yang berlangsung cukup lama antara sebagian golongan ditubuh angkatan darat dengan Presiden yang memicu pemberlakuan keadaan darurat dikarenakan ada kekhawatiran perpecahan di tubuh angkatan darat dapat memicu terjadinya perang saudara.

Pasca peristiwa 17 Oktober 1952 menjadikan situasi politik semakin tidak menentu, dan melumpuhkan kabinet

⁹⁵Arbi Sanit, *Perwakilan Politik....*, hal. 157

koalisi (PNI-Masyumi-Sosialis) saat itu. Kericuhan demi kericuhan di parlemen terus terjadi antara kelompok yang menyokong dengan yang ditantang untuk menyelenggarakan Pemilu secepat mungkin. Dalam menghadapi situasi tersebut, mendorong kabinet menjalankan kebijakan ganda diantaranya *pertama*, melakukan berbagai kompromi dalam menyelesaikan persoalan di angkatan darat. *Kedua*, Mendesak untuk mengadakan pemilihan sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah jangka panjang. Karena itu, pada November 1952, kabinet Wilopo mengusulkan rancangan undang-undang baru (RUU) dengan dukungan dari lingkaran politik yang bergejolak. Setelah berbagai amandemen, RUU itu akhirnya disahkan menjadi undang-undang setelah empat setengah bulan.⁹⁶

Undang-undang baru yang disahkan oleh kabinet Wilopo mengubah kebijakan Pemilu kabinet sebelumnya, terkait system Pemilu dari Pemilu tidak langsung menjadi Pemilu langsung. Selain itu, dua Pemilu diadakan untuk dua badan yang berbeda, Parlemen dan Majelis Konstituante. RUU baru juga membagi Indonesia menjadi 16 daerah pemilihan, salah satunya adalah Irian Barat. Setiap daerah pemilihan (Dapil) akan mendapatkan kursi berdasarkan jumlah penduduk, tetapi premisnya adalah bahwa setiap daerah harus memiliki setidaknya 6 kursi di Majelis Konstituante dan 3 kursi di Parlemen. Setiap kursi akan diberikan kepada setiap calon berdasarkan perolehan jumlah suara, adapun kelebihan suara akan digabungkan, baik antara berbagai partai dalam satu Dapil maupun digabungkan untuk satu partai tingkat nasional.

⁹⁶Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955....*, hal. 4-5

Hambatan-hambatan untuk pelaksanaan Pemilu terus terjadi, bahkan setelah RUU di sahkan menjadi UU masih terdapat kelompok-kelompok yang berusaha mencegah Pemilu dilaksanakan dengan segera. Akibatnya upaya kabinet Wilopo dalam membentuk Panitia Pemilihan Umum pusat gagal, dikarenakan belum ditemukan kesepakatan terkait susunan Panitia yang dibentuk. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena tepat pada bulan Desember 1953 Panitia Pemilihan Umum telah terbentuk. Kesepakatan ini diperoleh setelah Kabinet pimpinan PNI yang diketuai Ali Sastroamidjojo dan partai-partai koalisi yang berposisi dengannya tidak dimasukkan dalam Panitia Pemilu.⁹⁷

Tahapan pemilu selanjutnya adalah dengan memulai pendaftaran pemilih pada bulan Mei sampai dengan November. Dari pendataan ini tercatat sebanyak 43.104.464 orang pemilih dengan jumlah partai politik sebanyak 29 partai dan juga ada calon perseorangan yang akan memperebutkan 260 kursi untuk posisi DPR, 20 % kursi pada posisi konstituante, dan 14 orang wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Selanjutnya pada bulan Desember 1954 pendaftaran calon sudah boleh diajukan oleh partai politik pengusung, dan bulan April 1955 panitia mengumumkan tanggal pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada 29 September dan 15 Desember 1955. Namun, keraguan mulai muncul ketika pada tanggal 27 Juni 1955 terjadi gejolak baru antara militer dan politik yang mengakibatkan jatuhnya kabinet Ali dan digantikan oleh kabinet Mr. Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Akan tetapi keraguan akan terhambatnya pelaksanaan Pemilu ini terbantahkan, setelah kabinet yang baru berhasil

⁹⁷Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955....*, hal. 7-8

menyelenggarakan pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Gejolak yang terjadi antara Masyumi dan PNI semakin membuat jarak diantara mereka. Perdebatan-perdebatan dalam kampanye semakin menunjukkan pertentangan yang terjadi, bahkan sampai pada pertentangan tentang peran Islam dalam Negara. Dimana isu ini pertama kali dihembuskan oleh presiden Soekarno dalam pentas politik Jakarta pada bulan Januari 1953. Ia mengatakan bahwa menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam akan memicu pemisahan diri wilayah-wilayah tertentu. Pernyataan ini mendapat serangan dari pihak Masyumi Jawa Barat Kiai Haji Isa Anshory, yang mengatakan bahwa para pemimpin partai-partai politik non Muslim adalah munafiq dan kafir.

Perseteruan Masyumi dan PNI terus berlangsung, kedua belah pihak saling serang dalam setiap pernyataan-pernyataan yang saling menuduh. PNI mengecam berbagai bentuk provokasi dan pernyataan-pernyataan Isa Anshory yang melibatkan partainya dalam menentang symbol-simbol nasionalis. Disisi lain, Masyumi menyelenggarakan rapat-rapat besar untuk memprotes pernyataan-pernyataan tokoh PNI dan tokoh-tokoh partai kecail Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia) yang dianggap menghina Islam. Di masa cabinet Wilopo Dukungan terhadap Masyumi muncul dari Nahdhatul Ulama dan PSII terutama terkait dengan nasionalisme dan Islam, namun pada masa cabinet Ali kedua partai ini terlihat stagnan dan hanya berdiam diri. Sedangkan PNI mendapat dukungan penuh dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pertentangan PKI dan Masyumi sedikit banyak dipengaruhi oleh upaya masing-masing pihak yang mendeskreditkan pihak lain sebagai ekstremis, asing, dan

bertentangan dengan sikap nasionalis. Oleh sebab itu, kelompok komunis dengan sigap mendukung partai-partai pemerintah yang menggambarkan oposisi sebagai kelompok yang tidak setia. Selain itu, kelompok komunis dalam kampanyenya menghubungkan Masyumi dengan kelompok Darul Islam, mengaitkan dengan pertambangan asing dan perkebunan disisi lain. Sementara Masyumi menuduh PKI sebagai anak buah Moskow, dan mengungkit-ungkit peran PKI dalam peristiwa Madiun dan mengadakan hari berkabung nasional untuk mengenang peristiwa pemberontakan tersebut.

Beranjak dari dinamika kampanye yang dihembuskan oleh dua kelompok besar tersebut, pada tanggal 8 Oktober terdapat banyak sekali kejutan dari hasil Pemilu. Salah satunya adalah Nahdhatul Ulama berhasil menempatkan wakilnya diparlemen yang semula hanya 8 menjadi 45 orang, dan Masyumi mendapat suara yang sangat kecil di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Begitu pula suara partai PKI dan PNI juga membawa kejutan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur suara Partai Sosialis cukup rendah, bahkan kehilangan suara Partai Murba, serta Partai Sosialis kecil lainnya, yakni PRN (Partai Rakyat Nasional), dan PIR (Persatuan Indonesia Raya). Profesor Hazairin dan Wongsinegoro, Perindra (Partai Indonesia Raya), SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia), dan Partai Buruh. Dan partai PNI, Masyumi, NU, dan PKI menempati empat pemenang utama suara nasional.⁹⁸ Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.1.

⁹⁸Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955....*, hal. 83-84

Tabel 5.1
Hasil Pemilu Parlemen tahun 1955

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara Sah	Persentase Seluruh Suara	Jumlah Kursi	Jumlah Kursi pada Parlemen Sementara
1	PNI (Partai Nasional Indonesia)	8.434.653	22,3	57	42
2	Masyumi (Majlis Suro Muslimin Indonesia)	7.903.886	20,9	57	44
3	Nahdhatul Ulama	6.955.141	18,4	45	8
4	PKI (Partai Komunis Indonesia)	6.179.914	16,4	39	17
5	PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia)	1.091.160	2,9	8	4
6	Parkindo (Partai Kristen Indonesia)	1.003.325	2,6	8	5
7	Partai Katolik	770.740	2,0	6	8
8	PSI (Partai Sosialis Indonesia)	753.191	2,0	5	14
9	IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia)	541.306	1,4	4	-
10	Perti (Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah)	483.014	1,3	4	1
11	PRN (Partai Rakyat Nasional)	242.125	0,6	2	13
12	Partai Buruh	224.167	0,6	2	6
13	GPPS (Gerakan Pembela Panca Sila)	219.985	0,6	2	-
14	PRI (Partai Rakyat Indonesia)	206.261	0,5	2	-
15	PPPRI (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia)	200.419	0,5	2	-
16	Partai Murba	199.588	0,5	2	4
17	Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia)	178.887	0,5	1	-
18	PIR (Partai Indonesia	178.481	0,5	1	1

	Raya) – Wongsonegoro				
19	Gerinda	154.792	0,4	1	-
20	Permai (Persatuan Marhaen)	149.287	0,4	1	-
21	Partai Persatuan Daya	146.054	0,4	1	-
22	PIR (Partai Indonesia Raya) – Hazairin	114.644	0,3	1	18
23	PPTI (Partai Persatuan Tharikh Islam)	85.131	0,2	1	-
24	AKUI	81.454	0,2	1	-
25	PRD (Partai Rakyat Desa)	77.919	0,2	1	-
26	PRIM (Partai Rakyat Indonesia Merdeka)	72.523	0,2	1	-
27	Acoma (Angkatan Komunis Muda)	64.514	0,2	1	-
28	R. Soedjono Prawirosoedarso dan Kawan-kawan	53.305	0,1	1	-
29	Partai-partai, Organisasi, dan calon-calon perorangan	1.022.433	2,7	-	46
	Total	37.785.299	100,0	257	233

Sumber: Diolah dari Data KPU

Partai politik yang berpartisipasi pada pemilihan umum dapat dibagi menjadi empat kategori, yang terdiri dari partai besar, partai menengah, partai kecil skala nasional, dan partai kecil regional (skala daerah). Pengelompokan ini berdasarkan daerah pencalonan masing-masing partai tersebut. Yakni, sebanyak tujuh partai (PNI, Masyumi, PKI, PSI, PSII, PRN, dan PPPRI) mengajukan calon di 15 daerah pemilihan. Sementara NU, dua partai Kristen, Baperki, dan GPPS yang masih ada ikatan dengan PNI ikut serta pada 14 dari 15 daerah pemilihan. Sedangkan Partai Murba, IPKI, PRI Sutomo, Partai Buruh, dan dua PIR mengajukan calon pada 10 daerah

pemilihan. PPTI dan Perti yang berpusat di Sumatera, dan Permai serta Acoma di Jawa masing-masing mengajukan calon pada lima daerah pemilihan. Dengan demikian lengkaplah daftar organisasi yang bersifat lebih dari sekedar kedaerahan. Diantara 22 partai dan organisasi yang ada, terdapat sekitar empat partai besar, enam partai menengah dan 12 dari 18 organisasi kecil yang memenangkan kursi di parlemen, dan 12 dari 24 organisasi yang memenangkan kursi di konstituante. Maka dari itu, masing-masing dari keempat kelompok tersebut diantaranya adalah:

1. Partai Besar

- PNI (Partai Nasional Indonesia)
- Masyumi (Majlis Suro Muslimin Indonesia)
- Nahdhatul Ulama
- PKI (Partai Komunis Indonesia)

2. Partai menengah

- PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia)
- Parkindo (Partai Kristen Indonesia)
- Partai Katolik
- PSI (Partai Sosialis Indonesia)
- IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia)
- Perti (Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah)

3. Partai Kecil Berskala Nasional

- PRN (Partai Rakyat Nasional)
- Partai Buruh
- GPPS (Gerakan Pembela Panca Sila)
- PRI (Partai Rakyat Indonesia)
- PPPRI (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia)
- Partai Murba
- Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia)

- PIR (Partai Indonesia Raya) – Wongsonegoro
 - Permai (Persatuan Marhaen)
 - PIR (Partai Indonesia Raya) – Hazairin
 - PPTI (Partai Persatuan Tharikah Islam)
 - Acoma (Angkatan Communis Muda)
4. Partai Kecil Berskala Daerah
- Gerinda – Yogyakarta
 - Partai Persatuan Daya – Kalimantan Barat
 - AKUI – Madura
 - PRD (Partai Rakyat Desa) – Jawa Barat
 - PRIM (Partai Rakyat Indonesia Merdeka) – Jawa Barat
 - R. Soedjono Prawirosoedarso dan Kawan-kawan – Madiun
 - Gerakan Pilihan Sunda – Jawa Barat
 - Partai Tani Indonesia – Jawa Barat
 - Raja Kaprabonan dan Kawan-kawan – Cirebon, Jawa Barat
 - Gerakan Banteng – Jawa Barat
 - PIR (Partai Indonesia Raya) – Nusa Tenggara Barat – Lombok
 - PPLM Idrus Effendi (Panitia Pendukung Pencalonan L.M. Idrus Effendi) – Sulawesi Tenggara

Tidak dapat dipungkiri, dari tabel di atas sumbangan suara yang cukup besar untuk keempat partai-partai besar tersebut, jika dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni partai agama dan partai non agama berasal dari Sumatera Selatan. Dimana perolehan suara partai tersebut secara berurutan yakni Masyumi masih cukup signifikan dengan menempati urutan pertama di Sumatera Selatan dengan perolehan suara sebesar 628.386 atau 43,1 % suara, PNI 213.766 atau 14,6 % suara,

PKI 176.900 atau 12,0 % suara, dan NU 115.938 atau 7,2 % suara. Meskipun secara nasional suara partai PNI menempati posisi teratas, namun di Sumatera Selatan masih kalah dengan Masyumi. Perolehan suara PNI yang cukup signifikan ini salah satunya adalah peran Presiden Soekarno yang melakukan kunjungan ke berbagai daerah sebelum pemilihan umum dilaksanakan, termasuk kebijakan-kebijakan kabinet Burhanuddin harapan yang di anggap gagal di luar Jawa.⁹⁹

Menurut Adnan Buyung Nasution, di samping pembentukan empat kelompok partai besar ini, dilihat dari perjuangan dasar negara, partai yang berpartisipasi dalam Pemilu pada tahun 1955 juga menghasilkan tiga kelompok besar. Kelompok besar itu yaitu kelompok Islam, kelompok Nasionalis, dan kelompok sosial-ekonomi. Pada saat ini, beberapa kelompok Islam di Indonesia yang ingin didasarkan pada Syari'at Islam harus kecewa. Ini merupakan hasil dari pemilihan umum tahun 1955, dan tidak ada faksi arus utama dalam masyarakat Indonesia yang menjadi pemenang. Sehingga dalam konstituante tidak ada kekuatan tunggal. Partai Islam yang memperjuangkan pemberlakuan Syari'at Islam hanya memiliki 230 kursi, partai-partai tersebut diantaranya NU, PSII, Perti, PPTI, AKUI, Masyumi, Gerakan Pilihan Sunda dan L.H. Idrus Efendi. Kelompok gtersebut harus berhadapan dengan kelompok nasionalis dan kelompok sosial-ekonomi dengan 270 kursi dan 10 kursi, dan partai-partai tersebut diantaranya Parkindo, Katolik, PNI, PSI, PRN, PKI, IPKI, dll.¹⁰⁰

⁹⁹Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955....*, hal. 98-111

¹⁰⁰Amos Sukamto, "Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru: dari Konflik Perumusan Ideologi

Jumlah kursi yang diperoleh kelompok Islam dan hanya 230 kursi adalah jalan yang sulit bagi kelompok Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Anggota konstituante yang terbentuk pada 10 November 1956 membuktikan hal ini ketika mereka bertemu di Bandung, pertemuan itu menemui jalan buntu karena tidak ada kesepakatan tentang Dasar Negara Indonesia, yaitu Negara Islam atau Pancasila. Untuk mengurai kebuntuan tersebut, Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959, yang menyatakan bahwa agar persoalan tersebut dikembalikan pada UUD 1945. Namun, perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak pernah berhenti. Karena pada setiap tahapan sejarah nasional Indonesia, selalu ada kelompok-kelompok Islam yang berjuang untuk mencapai tujuan-tujuan ini.¹⁰¹

B. Pemilihan Umum pada Masa Orde Baru

Sejarah panjang lahirnya Orde Baru ditandai dengan peristiwa besar dalam sejarah Indonesia yakni pemberontakan G-30 S/ PKI dan sebagai tanda tumbanganya Orde Lama. Gerakan ini menyebabkan munculnya surat perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada 1 Maret 1966, Soekarno diminta untuk menandatangani perintah dan menunjuk Jenderal Soeharto untuk mengambil semua tindakan persuasif untuk menjaga keamanan negara dan melindungi Soekarno. Supersemar menjadi alat legitimasi Soeharto untuk mengambil wewenang penuh kekuasaan pada masa itu. Maka pada bulan Juli tahun 1966 diadakan sidang MPRS secara resmi Orde Baru

Negara Sampai Konflik Fisik” dalam *Jurnal Teologi Indonesia*. Vol. 1. No. 1 (2013), hal. 25-47

¹⁰¹Amos Sukamto, “Ketegangan Antar..., hal. 25-47

dikukuhkan. Selain itu juga menghasilkan beberapa ketetapan diantaranya 1) mengukuhkan Supersemar, 2) menetapkan PKI sebagai partai terlarang berikut Ideologinya tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan 3) menahan siapa pun yang terlibat dalam gerakan PKI (beberapa ditangkap dan dieksekusi), dan beberapa dibuang ke Pulau Buru.¹⁰²

Dengan tumbanganya Orde Lama, maka Orde Baru yang dipimpin Soeharto mampu mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun. Pada masa peralihan tersebut, Soeharto berusaha untuk mengambil segala tindakan dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional pasca tragedi G-30 S/ PKI. Oleh sebab itu, langkah awal yang dilakukan Soeharto demi mewujudkan stabilitas dan keamanan nasional dengan melakukan sidang istimewa MPR tahun 1967. Pada sidang istimewa tersebut Soeharto dikukuhkan menjadi Presiden Indonesia oleh MPRS menggantikan Soekarno. Selain itu, pemilihan yang semula dijadwalkan untuk tahun 1968 dilakukan sesuai dengan keputusan MPRS XI oleh Presiden Soeharto pada tahun 1966, diubah dan dilaksanakan pada tahun 1971.¹⁰³

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya sudah dapat dilihat bahwa kekuasaan Soeharto sudah dimulai sejak tahun 1967. Hanya saja pelaksanaan pemilu baru dilakukan pada tahun 1971. Pada tahun inilah yang dicatat sejarah sebagai pemilu pertama di Indonesia di era Orde Baru. Memang jauh berbeda dengan pemilu tahun 1955 yang dikatakan sebagian

¹⁰²M. Arsyad Maf'ul , "Partai Politik pada Masa Orde Baru dan Orde Lama", dalam *Supremasi Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, dan Pengajarannya*, Volume V. No. 2 (2010), hal. 76-82

¹⁰³ Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma, "Propaganda Orde Baru 1966-1980", dalam *Verleden: Jurnal Ilmu Sejarah*, Vol. 1. No. 1 (2012).

besar kelangan sebagai pemilu yang sangat demokratis, pemilu tahun 1971 tak ubahnya sebagai pesta demokrasi yang berifat semu. Pada prosesnya pemilu tahun 1971 penuh rekayasa dengan berbagai aturan dan manipulasi dalam rangka menguatkan kekuasaan Soeharto dengan menggunakan Golkar sebagai mesin politiknya. Sebab, jika pemilu 1955 adalah pemilu yang paling demokratis, maka pemilu era Soeharto bisa dikatakan sebagai pemilu anti demokrasi.

Pemilu pertama masa Orde Baru dilaksanakan tahun 1971 dan hanya mengikutsertakan sepuluh kontestan yaitu sembilan parpol dan satu ormas.¹⁰⁴ Sebelum itu padatangal 9 Maret 1970 terjadi pengelompokkan partai dengan membentuk kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, Perkindo, MURBA, IPKI, dan partai Katolik. Selanjutnya tanggal 13 Maret 1970 terbentuk kelompok Spitiual-Materiil atau kelompok Persatuan Pembangunan. Kelompok ini menekankan pada pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek-aspek materiil yang terdiri dari Nahdhatul Ulama (NU), Perti, PSII, dan Parmusi. Dan kelompok fungsional dimasukkan dalam kelompok terpisah, yang kemudian disebut Golongan Karya (Golkar) yang berasal odari organisasi kemasyarakatan.¹⁰⁵

Pemilihan Umum masa Orde Baru dilaksanakan sebanyak enam kali penyelenggaraan, yakni tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan menggunakan system

¹⁰⁴Kemenkumham “Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9. No. 4 (2014), hal. 509

¹⁰⁵ Selo Soemardjan, *Menuju Tata Indonesia Baru* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 310. Lihat juga, Arsyad Maf’ul, *Partai Politik pada Masa Orde Baru dan Orde Lama* (Makassar: Universitas Negeri Makasar, 2012), hal. 81.

proporsional. Hanya saja Pemilu yang diadakan selama rezim Orde Baru tidak bisa dikatakan sebagai tolok ukur suara rakyat. Kerena pada prinsipnya pemilu selama masa Orde Baru, diselenggarakan dalam satu proses yang terpusat pada lembaga-lembaga pemerintah yang menguntungkan rezim Orde Baru. Lembaga-lembaga tersebut bekerja atas dasar keinginan pemerintah Orde Baru dengan melakukan beragam rekayasa demi kemenangan parpol milik Pemerintah, yakni partai Golkar. Dimana pada setiap pelaksanaan pemilu partai Golkar selalu keluar sebagai pemenangnya. Hal ini menandakan bahwa selama rezim Orde Baru pelaksanaan pemilu tidak dilakukan secara demokratis.

Pemilihan umum 1971 diadakan tidak untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal Ini sama ketika pemilihan umum 1955, hanya memilih anggota DPR dan DPRD di tingkat provinsi juga daerah (kabupaten-kota). Pemilihan presiden adalah tanggung jawab MPR. Dalam catatan sejarah awal pemerintahan Presiden Soeharto yang dapat ditelusuri kembali sampai tahun 1997, Presiden dipilih oleh MPR dan DPR. Kita tahu bahwa baik DPR maupun MPR diisi oleh orang-orang Soeharto melalui kekuatan politik Golkar. Penguasaan mayoritas suara di DPR dan MPR oleh Golkar semakin menguatkan pemerintahan Soeharto. Penguasaan ini berimbas pada segala kebijakan yang dikehendaki oleh Golkar di lembaga legislative (DPR) tidak pernah mendapatkan hambatan yang berarti, semua berjalan mulus sebagaimana keinginan Soeharto, termasuk didalamnya merumuskan Undang-undang dan melakukan fungsi kontrol pada eksekutif. Strategi ini dilakukan Golkar sebagai upaya meraih kekuasaan mayoritas yang mereka peroleh dengan berbagai cara yang

menguntungkan mereka.¹⁰⁶ Pemilu yang dirancang Soeharto ini berjalan sangat baik, dan Golkar sebagai partai pemerintah memperoleh suara mutlak. Dengan suara mutlak ini Soeharto mulai memegang kendali pemerintahan diawali dengan mengangkat 100 orang anggota ABRI menjadi anggota MPR dan DPR.

Selanjutnya, hasil pemilu tahun 1971 yang dimenangkan Golkar berimbas pada pemilu berikutnya yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei tahun 1977 dimana pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik untuk yang kedua kalinya. Penyederhanaan ini tentunya menguntungkan pemerintah atau Golongan Karya (Golkar) karena semakin berkurangnya pesaing dalam Pemilu, pun demikian juga membawa keuntungan tersendiri bagi partai-partai Islam untuk bersatu. Dominasi kekuatan Soeharto di DPR dan MPR menelurkan kebijakan tentang peraturan pemilu selanjutnya. Hasilnya pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh tiga kontestan yang merupakan fusi atau gabungan dari beberapa partai yang mewakili Golongan Nasionalis, Golongan Spriritualis, dan Golongan Karya. Hasil fusi itu diantaranya; 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdiri dari gabungan partai-partai Islam (seperti PERTI, NU, PSSI dan Parmusi). 2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari gabungan partai Kristen, partai Katolik, IPKI, dan PNI. 3) Golongan Karya.¹⁰⁷

Apabila dikaji dari sejarahnya, keinginan untuk menyederhanakan partai-partai sudah dimulai sejak zaman Soekarno. Namun, pada masa itu masing-masing partai politik memiliki pengaruh yang cukup bear sehingga kesulitan untuk

¹⁰⁶ Selo Soemardjan, *Menuju Tata Indonesia...*, hal. 314-315

¹⁰⁷ Al Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total* (Jakarta: Darul falah, 1998), hal. 79.

mencari jalan keluar dalam menyederhanakannya, mengingat masing-masing parati politik merasa punya hak hidup yang sama sesuai dengan aliran dan ideologi yang dianutnya. Selanjutnya mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai-partai dengan membuat UU No. 3 tahun 1973 yang mengharuskan peleburan partai politik atau fusi.¹⁰⁸ Secara kasat mata adanya fusi ini menjadikan partai yang ada menjadi mayoritas. Hanya saja dengan adanya fusi ini juga menimbulkan masalah-masalah baru atau friksi didalam tubuh partai, mengingat setiap kelompok mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, sehingga strategi fusi ini seringkali memunculkan konflik di tubuh partai politik.¹⁰⁹ Kendati demikian, system fusi ini mampu bertahan hingga lima kali pemilu selama Orde Baru yakni pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.¹¹⁰

System fusi selalu menenpatkan Golkar menjadi pemenang pemilu dari pemilu ke pemilu. Bahkan sudah bisa diperkirakan Golkar akan menang kendati baru pertama kali ikut pemilu. Sebagai catatan untuk memperoleh kemenangan dan menguatkan kekuasaan politiknya Soeharto menjadikan Ormas Golkar sebagai mesin politiknya, ditambah penguasaan ABRI beserta jaringannya, Pegawai Negeri, PGRI, bahkan seluruh Birokrasi diberbagai tingkat sampai keberbagai daerah dan desa-desa untuk memilih Golkar. Bahkan pada pelaksanaannya Soeharto menempatkan Tentara dan Polisi untuk menjaga ketat Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta mengerahkan para pejabat Departemen dalam negeri untuk

¹⁰⁸Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal. 78

¹⁰⁹Zainuddin Fanani, *Perlawanan Rakyat Terhadap Hegemoni Kekuasaan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), hal. 86

¹¹⁰M. Arsyad Maf'ul, "Partai Politik...", hal. 79

menjadi panitia jejaring pemerintah ke masyarakat agar memilih Golkar.

Hasilnya pada pemilu tahun 1971 Golkar menang mutlak dengan mengantongi 62,80 % suara yakni sekitar 34.348.673 juta suara dengan perolehan 236 kursi DPR. Jauh melampaui partai politik lain, baik sendiri-sendiri maupun digabungkan. Selanjutnya diurutkan kedua ditempati partai Nahdhatul Ulama' yang mampu meraih 18,6 % suara dengan perolehan kursi sebanyak 58 kursi DPR. Namun yang mengejutkan disini adalah jatuhnya suara PNI, dimana pada tahun 1955 menjadi partai pemenang pemilu, dan sekarang hanya memperoleh 6,9 % suara dengan perolehan kursi sebanyak 20 kursi DPR, sedangkan sisanya masing-masing memperoleh suara dibawah 2 % meliputi Murba, Perti, Parkindo, Partai Katolik dan IPKI. Dengan perolehan suara terbesar ini, maka Golkar berhasil menguasai suara mayoritas di DPR, dan menjadi sejarah awal kekuasaan parlemen oleh Soeharto dan kejayaan Golkar.¹¹¹

Tabel 5.2

Tabulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 1971

No.	Nama Partai	Suara	Persentase (%)	Jumlah Kursi
1	Golkar	34.348.673	62,82	236
2	Nahdhatul Ulama (NU)	10.213.650	18,68	58
3	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3.793.266	6,93	20
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.308.237	2,39	10
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733.359	1,34	7

¹¹¹ Selo Soemardjan, *Menuju Tata Indonesia...*, hal. 314-315

7	Partai Katolik	603.740	1,10	3
8	Partai Islam (PERTI)	381.309	0,69	2
9	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0,61	-
10	Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)	48.126	0,08	-
Total		54.669.509	100,00	360

Sumber: Diolah dari Data KPU

Pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan. Tahap kedua apabila ada partai yang melakukan stembus accord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient. Pada tahap berikutnya, apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang memiliki sisa suara paling banyak, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accord dari perolehan krsi pembagian tahap kedua. Namun, apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara paling banyak.

Cara pembagian kursi pada pemilu tahun 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh partai politik. Hal ini dapat dilihat dari perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI secara nasional memiliki jumlah suara lebih besar dibandingkan perolehan jumlah suara Parmusi, namun memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi (lihat tabel 3.2). oleh sebab itu, jika saja pembagian kursi perolehan suara partai-partai pada Pemilu 1971 dilakukan dengan system

kombinasi seperti halnya yang digunakan pada pemilu tahun 1955, maka akan diperoleh hasil yang berbeda, yakni jumlah kursi PNI akan lebih besar dari jumlah kursi Parmusi.¹¹²

Setelah Pemilu tahun 1971, penyelenggaraan pemilu lebih terstruktur dan periodik untuk dilaksanakan. Pemilu tahun 1977 merupakan pemilu pertama yang hanya diikuti oleh tiga peserta partai politik, yaitu; PPP, PDI, dan Golkar. Hal ini imbas dari system fusi yang dilakukan oleh Orde Baru dengan melakukan penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai pada pelaksanaan pemilu 1977 meredupkan polarisasi ideologis-politis golongan Islam versus golongan nasionalis. Penyederhanaan ini, yang semula partai politik peserta pemilu berjumlah sepuluh partai dan menjadi tiga partai menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat aturan yang tegas sehingga polarisasi ideologis-politis tidak berlanjut.

Pada 1977 sistem pemilu yang digunakan sama dengan sistem pemilu sebelumnya, yaitu sistem proporsional dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER). Di antara 70 juta suara yang diperebutkan, terdapat 63.998.344suara sah, terhitung sekitar 90,93%.Hasilnya Golkar kembali memperoleh suara mutlak dengan jumlah suara sebesar 39.750.096 suara (62,11 %) dengan perolehan kursi sebanyak 232 kursi, artinya ada kehilangan 4 kursi DPR, diikuti PPP dengan jumlah suara sebesar 18.743.491juta suara dengan 99 kursi, naik 2,17 % menjadi 29,29% dan urutan ketiga diperoleh PDI sebesar 5.504.757 juta suara dengan 29 kursi (8,60 %) kehilangan 1 kursi DPR. Kendati mengalami penurunan suara, Golkar tetap sukses dalam mempertahankan posisinya sebagai

¹¹²Hasyimsah dkk, *Ensiklopedia Pemerintahan dan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT Lentera Abadi, 2010), hal. 91

pemenang pemilu tahun 1977, dan berhasil mendominasi kekuatan mayoritas DPR.

Pemilu ketiga era Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 4 Mei tahun 1982 dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia, termasuk yang berada di luar negeri. Pada pemilu ketiga ini tercatat sebanyak 75.126.306 pemilih yang memberikan hak suaranya, dengan memperebutkan 360 kursi DPR. Dengan perincian, Golkar memperoleh suara nasional sebanyak 48.334.724 juta suara dengan perolehan 242 kursi DPR (52,11 %), PPP memperoleh 20.871.880 juta suara dengan perolehan 94 kursi DPR (29,29 %), sedangkan PDI memperoleh 5.919.702 juta suara dengan perolehan 24 kursi DPR. Jika dibandingkan dengan pemilu tahun 1977, maka pada pemilu kali ini Golkar mengalami kenaikan suara sebanyak 2,23 % suara. Sedangkan PPP dan PDI mengalami penurunan sekitar 1,51 % dan 0,72 %. Maka total keseluruhan PPP dan PDI kehilangan masing-masing lima kursi DPR. Dengan demikian Golkar kembali berhasil mengukuhkan kemenangannya dengan tetap mendominasi kekuatan politik di DPR dan MPR.¹¹³

Selanjutnya pada pemilu keempat era Orde Baru, terdapat beberapa perubahan penting dalam dinamika politik nasional. Perubahan tersebut adalah adanya pembaruan politik yang dilakukan pemerintahan Orde Baru dengan melarang penggunaan asas partai selain asas Pancasila. Maka dari itu, salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai asas suatu partai saat ini adalah asas Pancasila yang diatur berdasarkan ketetapan MPR No.11/MPR/1983 tentang GBHN dan tentang Pemilu No.III/MPR/1983. Pada tanggal 1 Januari 1985 terkait

¹¹³ Selo Soemardjan, *Menuju Tata Indonesia...*, hal. 316

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, menetapkan bahwa semua organisasi politik yang berpartisipasi dalam pemilu harus didasarkan pada asas Pancasila, dan dijabarkan dalam rencana program untuk mencapai pembangunan nasional. Karenanya, tidak ada lagi partai ideologis dalam program, materi, dan tema kampanye.

Dari total 93.965.956 juta suara pemilih terdaftar, 85.809.816 orang memberikan hak suaranya. Oleh karena itu, Pemilu yang dilaksanakan dengan disahkannya RUU pada tanggal 23 April 1987 berdampak sangat signifikan bagi perolehan suara PPP. Pemilu kali ini PPP kehilangan 33 kursi dibandingkan dengan pemilu 1982, dan hanya memenangkan 61 kursi. PDI yang semula hanya memperoleh 30 kursi, namun pada Pemilu 1987 meningkat menjadi 40 kursi. Sementara Golkar tetap mampu mengukuhkan sebagai kekuatan mayoritas dengan menambah 53 kursi, sehingga menjadi 299 kursi. Untuk diketahui, jumlah kursi yang diperebutkan pada pemilu tahun 1987 ada kenaikan dari 460 menjadi 500 dengan pembagian 100 kursi untuk ABRI dan sisanya diperebutkan partai politik peserta pemilu. Merosotnya suara PPP pada pemilu 1987 selain karena adanya perubahan asas partai juga dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu keluarnya NU dari tubuh PPP, serta pengembosan suara NU diberbagai daerah.¹¹⁴

Pemilu selanjutnya yang diselenggarakan pada bulan Juni tahun 1992, tepatnya pada tanggal 9, masih sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya untuk memilih wakil-wakil rakyat. Meskipun mengalami penurunan suara, Golkar tetap

¹¹⁴ Selo Soemardjan, *Menuju Tata Indonesia...*, hal. 317

menguasai parlemen dengan meraih 66.599.343 suara dengan perolehan kursi sebanyak 282 kursi (68,10 %). Sementara PPP yang pada pemilu tahun 1987 mengalami penurunan, namun pada pemilu kali ini naik 1,02 % dengan perolehan suara sebanyak 16.624.577 suara dengan perolehan kursi sebanyak 62 kursi (12,40 %). Sedangkan PDI kembali mengalami kenaikan suara dengan perolehan sebanyak 14.585.584 suara dengan perolehan kursi 56 kursi (14,29 %), ada kenaikan 4,06 % dibandingkan pemilu sebelumnya. Akan tetapi meskipun PPP dan PDI mengalami kenaikan suara, namun jumlahnya tidak begitu signifikan. Sehingga Golkar tetap menjadi penguasa parlemen, dan terus mengukuhkan kekuasaannya.

Pemilu yang berlangsung era Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1971 hingga ke pemilu tahun 1992, Golkar tetap tidak tergoyahkan. Penguasaan Golkar di parlemen semakin mengukuhkan hegemoninya. Pun demikian pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei Tahun 1997, Golkar kembali menguasai parlemen. Bahkan pada pemilu kali ini Golkar mengalami kenaikan jumlah suara dengan perolehan 84.187.907 suara dengan perolehan kursi sebanyak 325 kursi (68,10 %), dengan kenaikan 6,41 %. Sedangkan PPP turut mengalami kenaikan jumlah suara sebesar 5,43 % dengan perolehan suara sebanyak 25.340.028 juta suara, dan perolehan kursi sebanyak 89 kursi (17,00 %). Adapun PDI pada pemilu kali ini mengalami kemerosotan jumlah suara sebesar 11,84 % sehingga suara yang diperoleh sebanyak 3.463.225 suara (14,90 % dengan perolehan kursi hanya 11 kursi. Dengan demikian gabungan suara PPP dan PDI pada pemilu tahun 1997 masih dibawah Golkar, sehingga penguasaan parlemen tetap di bawah Soeharto dengan kekuatan politik di parlemen.

Dari enam kali pemilu, dapat ditarik benang merah bahwa program politik Orde Baru pada awal pemerintahannya yang selalu menekankan pada stabilitas politik dan keamanan nasional dengan melakukan konsensus yang melibatkan berbagai unsur yakni pemerintah, ABRI dan beberapa organisasi masa. Dari Konsensus tersebut dihasilkan tiga kebijakan yang pada kenyataannya hanya untuk mengukuhkan kekuatan Orde Baru dengan Soeharto sebagai nakhodanya, yakni; *pertama*, Presiden Soeharto melakukan dominasi kekuasaan pemerintah di DPR, dengan mengangkat seperempat atau 100 orang dari 460 orang dari keseluruhan anggota DPR dari unsur ABRI.¹¹⁵ *Kedua*, melakukan penyederhanaan sistem kepartaian. Berdasarkan semangat konsensus tersebut Orde Baru mulai melakukan tekanan-tekanan politik terhadap partai politik dengan basis masa besar, terutama kepada PNI yang dianggap dekat dengan Orde Lama. Selain itu, Orde Baru juga melakukan tekanan-tekanan pada partai-partai dengan basis masa Islam seperti membekukan kepengurusan partai Masyumi.¹¹⁶ Dan *ketiga*, menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai politik.¹¹⁷

Dengan menjadikan ABRI alat untuk legitimasi kekuasaan dan Golkar sebagai alat politiknya, Orde Baru telah menjadi kekuatan yang sangat besardan tidak bisa diremehkan. Faktanya, menurut Harold Crouch, organisasi kemasyarakatan yang terorganisasi dengan baik sekalipun, tidak dapat melawan

¹¹⁵Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hal. 82

¹¹⁶M. Arsyad Maf'ul, "Partai Politik....", hal. 76-82

¹¹⁷Al Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total* (Jakarta: Darul falah, 1998), hal. 37

rezim semacam itu.¹¹⁸Tak cukup dengan menggandeng ABRI dan Golkar, Presiden Soeharto dalam mengukuhkan legitimasinya melakukan perubahan pada Tatib (tata tertib) yang menjadikan DPR dan MPR sebagai institusi politik dibawah pengawasan dan kekuasaannya. Dengan mengubah Tatib tersebut Soeharto memiliki kewenangan untuk menunjuk seperlima dari anggota DPR dan tiga perlima dari anggota MPR yang terkait dengan pembagian kursi parlemen. Dengan demikian tatib tersebut sangat menguntungkan partai Golkar dan selalu mendominasi pemerintahan Orde Baru dengan mengabaikan pandangan-pandangan public.¹¹⁹

Penyerderhanaan partai-partai politik peserta pemilu atau lebih dikenal dengan fusi yang dilakukan Orde Baru bukan tanpa alasan. Soeharto dengan jaringan kekuatannya di tubuh TNI Angkatan Darat dan Kementerian Dalam Negeri menyeterir PPP dan PDI yang mengakibatkan kedua partai tersebut tidak bebas bergerak. Pemilu 1977 yang dilaksanakan hanya sekedar memilih calon anggota DPR dan DPRD, sedangkan Presiden menjadi kewenangan MPR untuk memilihnya. Oleh sebab itu, Soeharto dengan berbagai cara akan selalu memastikan tetap menduduki tampuk kekuasaan. Salah satu caranya adalah pemilu yang dilaksanakan menggunakan system proporsional daftar tertutup. Dengan system ini pemilih tidak pernah tahu siapa-siapa orang yang akan dipilihnya, karena pemilu hanya memilih partai politik, sedangkan Anggota DPR ditetapkan berdsarkan surat keputusan Presiden. Sedangkan untuk mengisi jabatan tinggi

¹¹⁸Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (USA: Cornell University Press, 1998), hal. 347.

¹¹⁹Mochtar Pabotinggi, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 247.

negara lainnya, Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), serta jabatan-jabatan tinggi lainnya, menjadi kewenangan mutlak lembaga kepresidenan. Oleh sebab itu, pemilu yang berlangsung selama Orde Baru tidak pernah terjadi rotasi kepemimpinan, walaupun ada pergantian sebatas hanya pada Wakil Presiden.

C. Pilihan Politik Umat Islam sebelum Reformasi

Munculnya partai politik Islam merupakan hasil dari dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang membolehkan berdirinya partai-partai politik, yang kemudian direspon oleh umat Islam untuk mendirikan partai Masyumi. Berdirinya Masyumi menjadi harapan besar bagi umat Islam untuk memperjuangkan nasib dan aspirasi politiknya, dan kehadiran Masyumi disambut baik oleh kekuatan Ormas besar Islam yakni NU dan Muhammadiyah. Meskipun pada perjalanannya perpecahan dikalangan umat Islam mulai muncul, satu persatu Masyumi ditinggalkan oleh pendukungnya, seperti PSII yang keluar pada tahun 1947, NU tahun 1952. Akibatnya pada pemilu pertama tahun 1955 suara umat Islam justru tidak mendapat dukungan suara mayoritas dari umat Islam sendiri. Bukan hanya Masyumi, akan tetapi hampir semua partai Islam seperti NU, PSII, Perti, PPTI, AKUI tidak memperoleh suara yang signifikan, mereka kalah jauh dari partai nasionalis.¹²⁰

Keluarnya PSSI dan partai-partai Islam lain dari tubuh Masyumi semakin membuat kekuatan politik Islam menjadi terpecah-pecah. Perpecahan dikalangan kelompok partai Islam tersebut menjadikan kekuatan Islam melemah. Dampaknya

¹²⁰Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955...*, hal. 58

membuat umat Islam menjadi kebingungan, bagi mereka sebenarnya siapakah yang memang bersungguh-sungguh yang menjadi representasi dari Islam. Hal ini dikarenakan hampir semua partai Islam mengaku sebagai representasi dan sebagai wadah aspirasi umat Islam itu sendiri. Akibatnya hasil pemilu tahun 1955, partai-partai Islam tidak mendapatkan suara dan dukungan mayoritas umat Islam. Seperti halnya Masyumi hanya memperoleh 20,9 % suara saja, dan diikuti NU 8,4 %, PSII 2,0 %, Perti 1,3 %, PPTI dn AKUI hanya memperoleh masing-masing 0,2 %.¹²¹

Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, seringkali diwarnai ketegangan antara kelompok Islam dan nasionalis. Perjuangan para elit politik Islam pada masa Demokrasi terpimpin (era Soekarno), yang bertujuan menjadikan Islam sebagai dasar negara selalu menemui jalan buntu. Kelompok Islam yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta ditentang oleh kelompok nasionalis, termasuk kelompok Kristen. Islam sebagai Agama mayoritas seringkali menduduki posisi lemah dalam pergulatan politik. Partai-partai politik Islam justru menjadi kelompok minoritas pada lembaga-lembaga kenegaraan. Sebagai minoritas, peran elit politik Islam dalam memberi corak Islam seringkali terpinggirkan. Terlebih kekuatan politik ada pada Soekarno yang didukung penuh kelompok Komunis dan Angkatan Darat.¹²² Selanjutnya, ketegangan antara kelompok-kelompok Islam dan nasionalis termasuk Kristen didalamnya, berlanjut sampai dikeluarkannya

¹²¹Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955...*, hal. 58

¹²²Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Jakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hal. 1

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan berlanjut hingga sekarang (Era Reformasi).¹²³

Era Soekarno semakin membuat berat perjuangan partai-partai Islam. Bahkan partai-partai Islam dipaksa untuk mendukung ideologi Nasakom (nasionalis, agamis, dan komunis). Akibatnya partai-partai Islam kembali pecah hingga membentuk dua kelompok. Yakni kelompok yang mendukung dan kelompok yang menentang ideologi Nasakom. Kelompok yang mendukung Nasakom diwakili oleh NU dalam kelompok Liga Muslimin (NU, PSII, dan Perti), sedangkan yang menentang diwakili oleh Masyumi. Penentangan Masyumi terhadap ideologi Nasakom berimbas pada keberadaan Masyumi sendiri, tepat pada tahun 1960 Soekarno membubarkan Masyumi. Akibatnya kekuatan politik umat Islam semakin terpinggirkan. Meskipun NU berada pada lingkaran kekuasaan, rupanya mereka tidak memiliki peranan yang signifikan dan kekuatan dalam politikanya.¹²⁴

Pertentangan dua kelompok partai Islam tersebut, berangkat pada perbedaan visi politik partai-partai Islam dalam menghadapi demokrasi terpimpin. Kelompok pertama Masyumi memandang bahwa keikutsertaan dengan system otoriter merupakan penyimpangan dari ajaran Islam. Hal ini ditanggapi berbeda oleh kelompok Liga Muslimin. Menurut mereka, bergabung dalam system Demokrasi Terpimpin merupakan sikap realistik dan pragmatik. Sedangkan di mata Masyumi demokrasi terpimpin akan membawa bencana pada bangsa dan negara. Perlawanan Masyumi terhadap Soekarno, agar rakyat berpihak pada demokrasi ternyata sia-sia. Sementara PKI

¹²³Amos Sukamto, "Ketegangan Antar...", hal. 26.

¹²⁴Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Grafitipress, 1987)

dengan lihai memanipulasi politik pada saat itu dan berusaha memanfaatkan situasi tersebut dengan memberikan dukungan penuh terhadap system yang dibangun Soekarno. Untuk diketahui salah satu taktik PKI adalah untuk menghancurkan semua lawan-lawan politiknya, dan lawan politik yang terbesar masa itu adalah Masyumi.¹²⁵

Agar diketahui, setelah satu minggu Dekrit 5 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinetnya yang baru menggantikan Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda merupakan kabinet peralihan dari periode Demokrasi Parleментар pada Demokrasi Terpimpin. Dimana Demokrasi Terpimpin telah membawa Soekarno pada puncak kekuasaan yang telah lama di dambakannya. Akan tetapi karena system yang dibangunnya cukup rapuh, system ini pulalah yang membawa Soekarno ke jurang kehancuran politik untuk selama-lamanya. Selanjutnya, setelah Demokrasi Terpimpin berjalan sekitar Sembilan bulan, Soekarno membubarkan parlemen hasil pemilu 1955, dengan membentuk DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), dengan tidak melibatkan Masyumi dan PSI.

Tidak dilibatkannya Masyumi dalam DPRGR karena keberadaan Masyumi dianggap sebagai penghalang Revolusi. Bahkan Masyumi dianggap sebagai partai yang mendalangi pemberontakan PRRI-Permesta, secara hukum tuduhan ini tidak beralasan dan tidak bisa dibuktikan. Masyumi yang membela mati-matian prinsip negara Hukum akhirnya tidak berdaya menghadapi budaya politik otoriter di bawah selimut UUD 1945. Sementara itu NU justru melenggang dan menjadi bagian dari DPRGR, mereka beranggapan bahwa menerima keberadaan DPRGR sebagai upaya menegakkan *amar ma'ruf*

¹²⁵Syafii Maarif, *Islam dan Politik...*, hal. 57-58

nahi munkar. Namun tidak semua elit NU pada saat itu mendukung keberadaan Demokrasi terpimpin. Ada juga elit NU yang justru menolak dan menentangnya, mereka adalah K.H.M Dachlan dan Imron Rosjadi. Hanya saja keberadaan mereka tidak mampu menarik partai ke garis politik mereka.¹²⁶

Setelah pimpinan Masyumi menyatakan partainya bubar pada tanggal 13 September 1960 demi memenuhi ketentuan yang dinyatakan dalam keputusan Presiden dengan dikeluarkannya Kepres No. 200/ 1960 yang diumumkan tepat pada tanggal 17 Agustus 1960. Keberadaan Masyumi dan Psi semakin terpinggirkan bahkan menghilang keberadaannya. Selain itu, sebagian besar tokoh-tokoh penting Masyumi dan PSI yang berada di tanah air ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim Soekarno. Natsir dan kelompoknya, serta Sjahrir dianggap berbahaya di mata Soekarno. Dan yang paling tragis adalah nasib Sutan Sjahrir, selaku ketua PSI sebelum dibubarkan, ia ditangkap menjelang subuh tepatnya jam 4 pagi tanggal 16 Januari 1966. Sedangkan tokoh intelektual PSI lainnya yakni Sutan Takdir Alisjahbana menyingkir ke Malaysia demi menghindari system Demokrasi Terpimpin yang dibangun Soekarno.

Penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh modernis terus terjadi, mereka yang dianggap tidak mendukung atau tidak berkomproni dengan system politik yang berlaku dipenjara. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Moehammad Roem, Isa Anshary, Yunan Nasution, dan Prawoto Mangkusasmito. Selain itu ditahan pula Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap. Mereka memang pernah terlibat dalam PRRI, kendati sebelumnya telah

¹²⁶Syafii Maarif, *Islam dan Politik...*, hal. 57-64

mendapat amnesti oleh pemerintah. Selanjutnya tokoh Masyumi lainnya Kasman singodimedjo pada tahun 1963 juga ditahan, karena dianggap akan menggulingkan pemerintah. Ada tahun yang sama E.Z. Muttaqqien juga ditahan, setelah organisasinya GPII dibubarkan Soekarno, karena dianggap bagian dari Masyumi. Tahun 1964 Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), dan Ghazali Sjahlan yang merupakan tokoh Muhammadiyah juga ditangkap dan ditahan. Termasuk yang diluar dugaan semuanya, adalah Jusuf Wibisono yang semula dianggap sebagai penyokong keberadaan Demokrasi Terpimpin trut ditangkap.¹²⁷

Sementara itu, NU justru berkolaborasi dengan Soekarno. Partai-partai Islam pada masa ini dapat dikatakan berada dibawah pengaruh kuat dari NU. Melihat penangkapan-penangkapan di atas, NU justru tidak berbuat apa-apa untuk menghalangi penangkapan tersebut, kendati yang ditangkap salah satunya adalah Imron Rosjadi yang merupakan tokoh sayap pesantren. Penangkapan Imron Rosjadi tidak mendapatkan pembelaan dari NU. Disisi lain dengan runtuhnya persatuan umat Islam justru menguntungkan PKI, dimana partai ini mendapatkan perlindungan yang sangat kuat dari soekarno. Berangkat dari kenyataan inilah bisa jadi partai-partai Islam yang masih hidup pada masa itu harus secara formal mendukung Nasakom, sekalipun barakibat fatal bagi persatuan umat. Setidaknya kesetiaan NU terhadap soekarno memang terus berlanjut hingga saat-saat terakhir rezim ini berada pada jurang kehancuran.

Kedekatan Soekarno dan NU semakin nyata, bahkan pada ulang tahun NU yang ke 40 dalam pidatonya Soekarno

¹²⁷Syafii Maarif, *Islam dan Politik...*, hal. 105-108

menyatakan “*Saya cinta NU, maka cintailah saya. Saya rangkul Nu maka rangkullah Saya*”. Pernyataan ini disampaikan Soekarno pada saat posisinya sudah mulai goyah, yakni permulaan tahun 1966. Harapan-harapan Soekarno tersebut mendapat sambutan yang baik dari NU. Tokoh-tokoh NU masih menyatakan setia kepada Soekarno dalam upaya menyelesaikan revolusi Indonesia. Selain itu, kesetiaan NU kepada Soekarno hingga tidak mau berpisah dengannya setidaknya karena dua faktor; *pertama*, setelah NU resmi sebagai partai, Ulama Nu dan Perti pada tahun 1953 di istana Cipanas Bogor memberikan gelar *Waliyyu al-Amri* kepada Soekarno, dan menganggap Soekarno sangat tepat untuk menjadi presiden Indonesia baik dilihat dari segi konstitusional maupun secara spiritual keagamaan. *Kedua*, pembenaran dan dukungan NU bersama Liga Muslimin lainnya terhadap pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ketetapan tersebut ditandatangani oleh ketua dan wakil-wakil keua MPRS, diantaranya Idham Chalid (NU), Chairul Saleh (Murba), D.N. Aidit (PKI), Ali Sastroamidjojo (PNI), dan Puspojudo (Tentara).¹²⁸

Berdasarkan hal di atas, pada prinsipnya, Demokrasi Terpimpin dibawah komando Soekarno memaksa partai-partai Islam untuk mendukung ideologi Nasakom. Maka dari itu partai-partai Islam pada masa ini mulai terpecah belah menjadi dua kelompok besar. Yakni kelompok yang menentang ideologi Nasakom yang dipelopori Masyumi dengan kelompok yang mendukung dan diwakili oleh NU. Sebagai partai yang menolak ideologi Nasakom, tepat pada tahun 1960 Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. Dampak dari pembubaran itu, praktis kekuatan

¹²⁸Syafii Maarif, *Islam dan Politik...*, hal. 109-110

politik umat Islam masa itu semakin terpinggirkan dari tampuk kekuasaan. Sedangkan kelompok Islam yang diwakili NU dan berada pada lingkaran kekuasaan, rupanya tidak membawa pengaruh signifikan terhadap Islam, rupanya NU tidak begitu memiliki peran dan kekuatan apapun dalam kekuasaan.

Pasca runtuhnya orde lama, dan digantikan orde baru, membawa harapan baru pada romantisme politik Islam yang telah lama terkubur selama demokrasi terpimpin. Harapan ini bukan tanpa alasan, karena umat Islam bersama TNI-Angkatan Darat turut memberikan jasa yang besar dalam menggulingkan orde lama dan kekuatan PKI.¹²⁹ Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kemenangan orde baru dianggap sebagai kemenangan Islam. Atas dasar inilah umat Islam mulai membahas kembali "Piagam Jakarta". Pada tanggal 22 Juni 1968, dilakukan peringatan Hari Piagam Jakarta yang dilaksanakan di Gedung Pola Jakarta.¹³⁰

Harapan akan bangkitnya Masyumi sebagai simbol kekuatan politik umat Islam, rupanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Harapan itu menjadi sirna manakala Orde Baru melarang Masyumi kembali sebagai partai politik. Namun, kekecewaan itu sedikit terobati dengan diizinkan berdirinya Parmusi. Hanya saja pada perkembangannya umat Islam mengalami kekecewaan kembali dengan kebijakan Orde Baru, yakni diizinkan Parmusi dengan berbagai catatan, diantaranya mantan tokoh-tokoh Masyumi tidak diizinkan lagi terlibat dalam kepengurusan partai politik.¹³¹

¹²⁹ Dhurrorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), hal. 81

¹³⁰ Dhurrorudin Mashad, *Akar Konflik...*, hal. 82

¹³¹ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam* (Jakarta: Mizan, 1986), hal. 108

Selain tidak memperbolehkan Masyumi dan tokoh-tokohnya untuk berpartisipasi dalam politik dan mengikuti pemilihan umum, rezim Orde Baru mengerdilkan gerakan politik Islam, tetapi juga melakukan depolitisasi umat Islam secara besar-besaran dan sistematis. Diantaranya melalui tokoh intelektual dengan wacana-wacana yang berusaha memisahkan Islam dari Politik, seperti Nurcholis Majid yang menyarankan agar umat Islam perlu melakukan sekulerisasi sebagai bentuk penyesuaian atas sikap pemerintah yang semakin otoriter. Menurutya, cara tersebut merupakan salah satu bentuk strategi perjuangan akibat tekanan yang kuat dari rezim Orde Baru. Oleh karena itu, semboyan saat itu adalah “Islam Yes, Partai Islam No” yang merupakan semboyan Nurcholis Majid. Hanya saja gagasan ini ditentang oleh para intelektual Islam, seperti Prof. Dr. H. Rasyidi, Profesor Dr. Deliar Noer, Dr. Daud Rashid, dan Abdul Qodir.¹³²

Langkah Orde Baru untuk mengerdilkan kekuatan partai-partai Islam terus berlanjut dengan dibuatnya kebijakan restrukturisasi system kepartaian dengan memaksa partai-partai yang ada untuk melakukan Fusi, dengan alasan demi stabilitas politik yang ada. Dengan adanya kebijakan tersebut akhirnya partai-partai Islam seperti Parmusi, PSII, NU, dan Perti bergabung dalam satu partai dibawah naungan Partai Persatuan pembangunan (PPP). Termasuk partai-partai yang lain melakukan hal serupa seperti PNI, IPKI, Perkindo dan partai Katolik. Dengan kebijakan Fusi ini, menjadikan PPP sebagai satu-satunya wadah aspirasi kekuatan politik umat Islam pada masa Orde Baru.

¹³² Ahmad Ibrahim dkk, ed., *Islam di Asia Tenggara Perkembangan Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 549

Kebijakan Orde Baru seringkali menggunakan dalih stabilitas politik sebagai dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai alasan. Kalaupun Orde Baru mengalami reorganisasi politik, hal ini justru akan membuat kekuasaan menjadi lebih permanen. Dampaknya, pada pemilu di era Orde Baru, kekuatan politik umat Islam sangat berkurang, bahkan suara yang diperoleh pada pemilu Orde Baru jauh lebih rendah dari capaian pemilu tahun 1955. Orde Baru terus mengerdilkan partai Islam, sehingga Golkar menjadi lebih kuat dan semakin berkembang tanpa saingan. Pada saat yang sama, partai-partai yang ber-fusi masih belum menemukan soliditasnya, sehingga masih rawan terjadi konflik. Hal ini menjadi catatan sejarah bahwa PPP dan PDI seringkali diwarnai konflik internal..

Tidak cukup sampai disitu, kebijakan-kebijakan Orde Baru semakin melemahkan kekuatan politik umat Islam. Salah satunya dengan membuat kebijakan deideologisasi partai-partai politik yang ada. Kebijakan tersebut memaksa seluruh partai yang ada untuk menggunakan asas tunggal yakni asas Pancasila dan melarang penggunaan asas lain termasuk asas Islam. Akibatnya PPP sebagai wadah terakhir kekuatan politik umat Islam, tidak memiliki pilihan lain dan harus mengikuti kebijakan tersebut dengan menanggalkan asas Islam dan berubah menjadi asas Pancasila. Termasuk penggunaan lambang Ka'bah diganti dengan lambang Bintang. Kebijakan Orde Baru tersebut bagi sebagian kalangan dianggap sebagai proses depolitisasi Islam, atau deislamisasi. Menurut Orde Baru keterlibatan Islam dalam politik akan mengganggu gerak pembangunan yang menjadi target pemerintah. Mereka berpandangan bahwa Islam sebagai agama hanya terkait soal ritual keagamaan dan sosial kemasyarakatan, serta tidak terkait

dengan persoalan praktik politik. dengan demikian, segala kegiatan umat Islam terkait Ibadah dan ritual-rtual keagamaan dan kemasyarakatan mendapat dukungan dari pemerintah, namun sebaliknya yang berkaitan dengan politik akan dibatasi bahkan cenderung dilarang.¹³³

Kebijakan Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas telah disetujui oleh Organisasi Islam NU untuk pertama kalinya. Pada tanggal 20 Oktober 1983, NU dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Situbondo menyatakan bersedia menerima prinsip tunggal Pancasila. Sidang Umum NU tahun 1984 kembali memperkuat keputusan Majelis Nasional Alim Ulama. Keinginan NU menerima asas tunggal Pancasila bukannya tanpa risiko. Di kalangan umat Islam, NU dikenal sebagai organisasi Islam yang akomodasionis dan bahkan "oportunistik". Sikap sinis ini muncul karena NU terlalu cepat menerima asas tunggal Pancasila, padahal asas tunggal Pancasila baru sekedar isu yang dilontarkan oleh pemerintah, belum berwujud Undang-undang, akan tetapi mengapa NU terlalu cepat menerima tanpa mau berjuang terlebih dahulu.¹³⁴

Dibandingkan dengan NU, Muhammadiyah cenderung lebih berhati-hati dalam menerima keputusan asas tunggal Pancasila. Muhammadiyah mengulur-ngulur waktu sejenak untuk memahami perkembangan situasi. Muktamar Muhammadiyah yang semula dijadwalkan tahun 1982 harus ditunda sampai pemerintah mengesahkan undang-undang

¹³³ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 12

¹³⁴ Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan Orde Baru: Membaca Kembali Politik De-Islamisasi Soeharto" dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 1 (Oktober 2015), hal. 76-77

Keormasan. Pada tanggal 22 Oktober 1983, Muhammadiyah sedianya akan menyelenggarakan Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Solo pada tahun 1984. Karena Muhammadiyah masih menunggu pengesahan Undang-undang Keormasan yang belum selesai digodok pemerintah, sehingga Kongres ditunda lagi. Pada tanggal 31 Mei 1985, DPR mengesahkan Undang-Undang asas Tunggal Pancasila. Pada 17 Juni 1985, Presiden Soeharto secara resmi mengesahkan undang-undang Keormasan yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985. Undang-undang ini menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas resmi bagi semua ormas yang ada di Indonesia. Penetapan Undang-undang ini, mau tidak mau Muhammadiyah harus menentukan sikap. Maka melalui Muktamar ke-41 pada tanggal 7-11 Desember 1985, Muhammadiyah menyatakan diri bersedia menerima asas tunggal Pancasila.¹³⁵

Meski organisasi Muhammadiyah menyatakan menerima asas tunggal Pancasila, namun tidak semua tokoh Muhammadiyah setuju dengan keputusan tersebut. K.H. Malik Ahmad, salah satu elite Muhammadiyah, menolak keberadaan asas tunggal Pancasila, karena Pancasila dapat mengancam eksistensi Islam. K.H. Malik Ahmad berpendapat bahwa dirinya lebih bersedia menerima pembekuan Muhammadiyah daripada menerima asas tunggal Pancasila. Hanya saja K.H. Malik Ahmad tidak dominan di Muhammadiyah. Suara yang dominan tetap menerima asas tunggal Pancasila, pilihan ini harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain bagi kelangsungan gerakan Muhammadiyah di Indonesia.¹³⁶

¹³⁵ Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan...", hal. 77-79

¹³⁶ Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hal. 88

Selain tohoh Muhammadiyah yang konsisten menolak asas tunggal Pancasila, terdapat beberapa tokoh Islam yang terus konsisten dengan Islam. Dan terus menolak asas tunggal Pancasila. Mereka diantaranya adalah Abdullah Sungkar, Syarifuddin Prawiranegara, Yusuf Abdullah Puar, Abu Bakar Ba'asyir, dan Deliar Noer. Maka pada tahun 1972 Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar dan kawan-kawan mendirikan Pesantren Al mukmin di Desa Ngruki dekat Surakarta. Pada tahun 1985 Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar melarikan diri ke Johor Malaysia. Sedangkan Deliar Noer termasuk salah satu tokoh intelektual Muslim Modernis yang tidak bersedia menerima asas tunggal Pancasila, sehingga memaksanya merantau dan bekerja sebagai dosen di Australia.¹³⁷

Rezim Orde Baru juga menerapkan pembatasan pada tokoh-tokoh yang dianggap menjadi simbol yang mampu mendongkrak suara PPP dan PDI. Soekarno yang menjadi simbol kekuatan PDI dianggap menjadi ancaman bagi Soeharto, sehingga mencekal dan melarang Guntur Soekarnoputra menjadi juru kampanye bagi PDI. Pun demikian yang terjadi dengan PPP, dengan mencekal Raja dangdut Rhoma Irama yang pada waktu itu sebagai juru kampanye PPP dan sering muncul di TVRI. Dimana TVRI pada saat itu merupakan stasiun TV yang dikuasai Golkar. Diskriminasi dan intervensi yang dilakukan Orde Baru membuat politisi gerah. Sekjen PDI Sabam Sira'it bahkan pernah mengatakan sejatinya pemilu pada hakikatnya merupakan pesta demokrasi sehingga tidak boleh ada intimidasi dari pihak manapun. Istilah "Pesta Demokrasi" itu

¹³⁷Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan...", hal. 80-81

kemudian menjadi kosa kata baru yang masih digunakan sampai sekarang.¹³⁸

Maka dari uraian panjang di atas, dapat dikatakan bahwa sejarah lahirnya Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari peran besar Umat Islam. Dan atas peran besar tersebut sudah sepantasnya apabila umat Islam berharap banyak untuk turut terlibat dalam pengelolaan Negara di era Orde Baru. Hal itu dimulai dengan adanya usaha untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi sebagai wadah politik umat Islam Indonesia. Hanya saja sebagai penguasa Orde Baru, Soeharto tidak memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk berbenah diri, karena ketakutan Soeharto bahwa hal tersebut akan menjadi ancaman bagi kekuasaan Soeharto.

Sedikit melihat kebelakang, pemilu pada tahun 1955 bisa dikatakan sebagai pemilu paling ideal sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu pada masa itu menerapkan standart yang tinggi dalam konteks politik dan demokrasi liberal di Indonesia. Situasi politik pada pemilu 1955 tidak jauh berbeda dengan tahun 1999. Pada pemilu tersebut, peserta pemilu yang multi partai, serta terjadinya pembelahan di masyarakat. Namun, terdapat sejumlah perbedaan yang cukup signifikan diantara keduanya.

Pada Pemilu 1955, peran media massa mampu menangani konflik dengan baik, termasuk para elit politik saat itu, siap menang dan siap kalah, hal ini dipraktikkan dengan baik dalam persaingan politik. Sirkulasi kepemimpinan politik dapat berlangsung sangat cepat. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi elit politik untuk bergiliran menjadi anggota kabinet. Selain itu, politisi yang muncul pada tahun 1955

¹³⁸Hasyimsah dkk, *Ensiklopedia Pemerintahan...*, hal. 91

adalah mereka yang berhasil menjadi panutan atau role model yang baik dan dewasa dalam politik nasional. Misalnya, perselisihan antara M. Natsir dengan DN Aidit dan Soekarno bersifat politis, tetapi mereka masih bersahabat di luar politik. Model seperti ini tidak kita miliki di panggung politik hari ini.

Perbedaan penting lainnya adalah partai politik era 1955 memiliki ideology partai yang dibangun sangat kuat dan matang. Maka dari itu, kendati ideology berbeda dan bahkan saling bertentangan, partai politik tidak takut kehilangan konstituennya, hal tersebut berbeda dengan partai politik saat ini, dimana setiap partai tidak memiliki ideology yang jelas dan bahkan seragam.

BAB VI

REFORMASI DAN KONTESTASI PEMILIHAN UMUM



Setelah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya tentang dinamika pemilihan umum sebelum reformasi, maka dalam bab ini dimajukan pula pembahasan tentang reformasi dan kontestasi pemilihan umum. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari tiga unit analisis yang berhubungan dengan sejarah lahirnya era reformasi di Indonesia, sistem pemilihan umum, serta reformasi dan pemilihan umum multi partai.

A. Sejarah Lahirnya Era Reformasi di Indonesia

Reformasi adalah salah satu episode perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dimulai semenjak presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil presiden, BJ. Habibie, pada tanggal 21 Mei 1998.¹³⁹ Reformasi itu sendiri adalah proses, upaya sistematis, terpadu dan komprehensif dengan tujuan untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁴⁰ Azwar Widjaja memahami reformasi sebagai proses dan usaha yang berhubungan dengan

¹³⁹Marwati Djeoned Poeponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), Jilid VI, hal. 664

¹⁴⁰Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hal. 67

praktik-praktik politik, pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya yang dipandang tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan dan tata ulang ke arah yang lebih baik.¹⁴¹Oleh karena itu, reformasi dapat dipahami sebagai perubahan dalam sistem pemerintahan, suatu gerakan untuk berkembang ke arah yang lebih baik berdasarkan kepentingan dan keinginan semua rakyat Indonesia.

Lahirnya reformasi merupakan hasil perjuangan berupa gerakan sosial dan politik, gerakan tersebut melibatkan seluruh aspek masyarakat Indonesia, dan mereka berharap negara akan berubah dan lebih maju guna menemukan arah yang lebih baik. Gerakan sosial politik itu dipandang oleh Ahmad Mansyur Suryanegara sebagai gerakan yang populer disebut dengan gerakan reformasi. Kehadirannya pada akhir kekuasaan dan pemerintahan Presiden Soeharto merupakan jawaban terhadap krisis multi dimensional yang melanda bangsa Indonesia karena telah menyentuh beberapa dimensi kehidupan masyarakat meliputi bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan.¹⁴²

Reformasi pasca lengsernya Orde Baru berarti penataan kembali segala perangkat pemerintahan seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menggantikan (degenerasi) rezim Orde Baru yang telah memerintah rakyat Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Reformasi menjadi impian dan harapan membangun negara-bangsa, yang secara ekonomi porak poranda dan tidak demokratis secara politis.

¹⁴¹ Azwar Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2011), hal. 75

¹⁴² Ahmad Manshur Suryanegara, *Menemukan Sejarah* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 90

Oleh karena itu, meskipun istilah "reformasi" memang berasal dari gerakan Martin Luther King, reformasi tersebut tidak memiliki niat meniru model reformasi agama yang mungkin sesuai ataupun tidak sesuai. Reformasi di Indonesia lebih bersifat sosial-politik, dan ada reformasi luas di berbagai negara terkait dengan pemerintah yang dianggap pemerintah otoriter dan kemudian digantikan oleh pemerintah baru.¹⁴³

Awalnya, reformasi sangat ideal untuk membangun Indonesia baru. Tetapi reformasi tidak berjalan dengan lancar. Banyak hambatan yang harus diatasi dalam transisi menuju demokrasi. Tersendatnya agenda reformasi karena reformasi yang dilakukan bukan reformasi revolusioner, tetapi reformasi bertahap. Deklarasi Ciganjur mencerminkan pengecualian bahwa rezim yang dibentuk adalah rezim kolektif. Pengunduran diri Soeharto tidak diikuti dengan runtuhnya rezim lama. Berbeda dengan Filipina, setelah jatuhnya Ferdinand Marcos, rezim lama runtuh, sehingga proses transisi demokrasi relatif mudah.¹⁴⁴

Krisis multi dimensional yang melanda bangsa Indonesia dalam batas tertentu ternyata telah melahirkan sikap pesimisme dan hilangnya kepercayaan rakyat kepada penguasa Orde Baru. Merekamenganggap bahwa presiden Soeharto dan kroni-kroninya tidak mampu mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang memilikikeadilan dan kemakmuran. Mengingat peralihan rezim di bawah kepemimpinannya dari Orde Lama ke Orde Baru merupakan tekad untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik. Salah satu manifestasi dari tekad ini adalah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi

¹⁴³ Khazami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), Cetakan 1, hal. 66

¹⁴⁴ Khazami Zada, *Islam Radikal...*, hal. 67-68

semua rakyat Indonesia tanpa membedakan-bedakan keturunan (ras), sesuai Pancasila dan UUD 1945.¹⁴⁵

Hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Barusebenarnya sudah lama muncul yang ditandai oleh akumulasi dan eskalasi tekanan yang semakin meningkat di sepanjang tahun 1996. Oposisi anti presiden Soeharto telah terbentuk sejak munculnya Megawati Soekarno Putri sebagai komponen masyarakat yang menyuarakan perlawanan. Abdurrahman Wahid sebagai tokoh Nahdhatul Ulama (NU), Mukhtar Pakpahan dari Sarikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), Goenawan Muhammad dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Budiman Sudjadmikoyang memotori Partai Demokratikmenjelma menjadi kelompok oposisi untuk menentang kepemimpinan presiden Soeharto. Sri Bintang Pamungkas yang muncul dengan pendirianPartai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) dan tidak pernah diakui keberadaannya oleh pemerintah melakukan perlawanan dan menentang Orde Barudalam sebuah pemilu langsung pada bulan Oktober 1996. Ia menolak rencana pemilu 1997 dan kehadiran Soeharto sebagai calon presiden yang selalu diusung oleh Golongan Karya. Amin Rais menyatakan pula kesediaannya dan siap menjadi calon presiden di tengah spekulasi Soeharto yang ingin mencalonkan kembali dirinya sebagai presiden pada pemilu 1997.¹⁴⁶

Pemerintahan Orde Baru semakin goyah dan melemah yang kelihatan dari ketidak-berdayaan dalam mengatasi krisis moneter pada tahun 1988. Krisis keuangan yang melanda

¹⁴⁵M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hal. 471

¹⁴⁶Basuki Agus Suparno, *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto* (Jakarta: Kompas, 2012), hal. 97-100

Thailand sejak bulan Mei 1997 diyakini oleh pemerintah tidak mungkin mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia. Rupiah di pasar uang spot antar bank pada bulan yang sama berkisar pada Rp. 2.440-Rp.2442 per dollar Amerika. Beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan Agustus 1997, nilai rupiah terhadap dollar telah menembus Rp. 3.020. Sedangkan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap US Dolar menyentuh level Rp. 5.000 dan semakin melemah hingga mencapai Rp. 14.000 pada bulan Mei 1998. Karena itu bank dunia mengingatkan ancaman buruknya defisit transaksi berjalan pada tahun 1998 yang mengundang pelarian modal (investor) ke luar negeri. Hutang luar negeri pemerintahan Indonesia pada tahun 1996 tercatat sebesar 109.3 miliar dollar Amerika Serikat atau setara 48 % dari *Gross Domestic Product* (GDP). Jumlah tersebut jauh lebih besar dari hutang pemerintahan Thailand yang mencapai 76,5 miliar dollar Amerika Serikat atau setara dengan 43 % GDP pemerintahan Thailand.¹⁴⁷

Krisis demi krisis sejak tahun 1996 hingga 1998 mendorong sebanyak 786 pengembang dibawah naungan Real Estate Indonesia (REI) mengalami kemunduran dan runtuh sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem perekonomian Orde Baru di bawah pimpinan presiden Soeharto. Beberapa proyek strategis mengalami penundaan dan 16 bank dilikuidasi yang memiliki pengaruh kepada pengetatan keuangan dan melambungnya harga-harga sembilan bahan pokok (sembako) yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Itulah sebabnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan dan cenderung dalam keadaan negatif yang memicu

¹⁴⁷Basuki Agus Suparno, *Reformasi...*, hal. 101

lahirnya berbagai tekanan terhadap Orde Baru, baik tekanan dari dalam negeri dan dunia internasional.¹⁴⁸

Dari dalam negeri, tekanan terhadap pemerintahan Orde Baru muncul dalam bentuk kerusuhan demi kerusuhan yang terjadi di mana-mana dengan intensitas yang semakin masif dan destruktif. Kerusuhan sosial dan aksi massa membentuk rangkaian yang saling sambung-menyambung pada beberapa daerah di Indonesia sejak tahun 1996 hingga 1998. Kerusuhan Situbondo (10 Oktober 1996), kerusuhan Tasikmalaya (26 Desember 1997), kerusuhan Tanah Abang (Januari 1997), kerusuhan Rengasdengklok (Januari 1997), kerusuhan Pekalongan (Maret 1997) dan kerusuhan di Jakarta, Solo, Tangerang, Bogor, Bekasi, Ujung Pandang dan Padang (1998).¹⁴⁹

Kerugian fisik akibat dari masing-masing kerusuhan sangat besar karena telah merusak bangunan dan fasilitas umum. Kerusuhan di Jakarta, misalnya, diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 2,5 triliun lebih sehingga menambah beban dan kesulitan ekonomi Indonesia. Kerusuhan itu menimbulkan pula kerusakan bangunan sebanyak 4.939 buah. 4.204 bangun terdiri dari mall, swalayan, toko, bengkel, hotel dan restoran. Sebanyak 535 bangunan bank juga dirusak massa dalam kerusuhan di Jakarta. Sisanya adalah kantor swasta, pom bensin, tempat ibadah, dan rumah penduduk juga dibakar dan dijarah oleh massa. Tekanan terhadap pemerintahan Orde Baru muncul pula di kalangan mahasiswa yang melakukan demonstrasi yang saling sambung-menyambung pada beberapa kota besar di Indonesia.¹⁵⁰

¹⁴⁸Basuki Agus Suparno, *Reformasi...*, hal. 101-102

¹⁴⁹Basuki Agus Suparno, *Reformasi...*, hal. 103

¹⁵⁰Basuki Agus Suparno, *Reformasi...*, hal. 103-104

Mahasiswa merupakan kelompok sosial yang dipandang vokal dalam menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Beberapa strategi mereka susun untuk menentang pemerintahan Orde Baru, karena Pemerintah Orde Baru dianggap telah menyimpang dari ideologi Pancasila dan UUD 1945. Perjuangan mereka menuntut reformasi di segala aspek kehidupan. Tuntutan tersebut mencapai puncaknya pada Mei 1998. Empat mahasiswa Trisakti di depan kampus Universitas Trisakti ditembak aparat keamanan. Empat diantaranya diserang dengan kekerasan. Mereka adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie dan Hafidhin Royan. Peristiwa ini mengundang reaksi yang lebih keras lagi dari beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa sehingga mereka melakukan tindakan anarkis pada 13-14 Mei 1998. Mereka melakukan pembakaran terhadap toko-toko dan menjarah barang-barang di dalamnya. KOrde Barun sulit dihindarkan pada peristiwa itu yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Suasana Jakarta semakin memanas sampai tanggal 19 Mei 1998 karena mahasiswa yang datang dari beberapa kota besar di Indonesia melakukan *long march* menuju gedung MPR/DPR untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa Orde Baru.¹⁵¹

Presiden Soeharto pada waktu sama mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di istana negara untuk membicarakan berbagai kemungkinan dalam mengatasi krisis. Pada pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu, Soeharto menyampai kepada sembilan tokoh masyarakat yang diundang tentang kemungkinan dirinya mundur dari kursi kepresidenan. Sembilan tokoh masyarakat

¹⁵¹Soekisno Hadikoemoro, *Tragedi Trisakti 12 Mei 1998* (Jakarta: Universitas Trisakti, 1995), hal. 101

yang diundang oleh presiden Soeharto adalah Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Emha Ainun Jadjid, Ali Yafie, Malik Fadjar, Cholil Baidhawi, Sutrisno Muhdam, Ma'ruf Amin, dan Ahmad Bagdja. Selain itu hadir pula tokoh masyarakat yang lain, yaitu Yusril Ihza Mahendra, Mayjen Jasril Jakub dan ajudan presiden Soeharto.¹⁵²

Pertemuan yang digagas oleh Soeharto itu sayangnya hanya melahirkan dua keputusan yang jauh dari harapan masyarakat Indonesia yang menghendaki perubahan. Keputusan pertama adalah pembentukan dewan reformasi yang kemudian dirubah menjadi komite reformasi karena memiliki kemiripan dengan istilah dewan jendral atau dewan revolusi ketika terjadinya peristiwa pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965. Keputusan kedua adalah presiden Soeharto melakukan reshuffle Kabinet Pembangunan VI dan mengubahnya menjadi Kabinet Reformasi yang memiliki tugas pokoknya menuntaskan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian, Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR/DPRD, Undang-undang Anti-Monopoli dan Undang-undang Anti-Korupsi.¹⁵³

Sejalan dengan perubahan Kabinet Pembangunan VI menjadi Kabinet Reformasi, dukungan politik kepada presiden Soeharto semakin melemah. Empat belas orang menteri menyatakan penolakan dan tidak mau melibatkan diri dalam Kabinet Reformasi. Kosgoro dan Golkar meminta pula kepada presiden Soeharto untuk mundur sebagai presiden. Tekanan demi tekanan membuat posisi presiden Soeharto semakin melemah dan menyatakan mundur dari jabatan presiden Republik Indonesia dan mengangkat wakil presiden, BJ.

¹⁵²M.C. Ricklefs, *Sejarah...*, hal. 653

¹⁵³M.C. Ricklefs, *Sejarah...*, hal. 654

Habibie, sebagai penggantinya pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa itu merefleksikan berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang diikuti oleh lahirnya era reformasi dalam episode perjalanan sejarah bangsa Indonesia.¹⁵⁴

Beberapa faktor kausal yang mendorong lahirnya era reformasi terakumulasi dalam krisis multi dimensional yang meliputi krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, kepercayaan dan lain sebagainya. Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru yang dianggap keliru dan menyalahi ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Penguasa Orde Baru di bawah pimpinan presiden Soeharto selalu menyuarakan bahwa kebijakan politik dan pelaksanaan pemerintahan didasarkan kepada sistem demokrasi Pancasila. Namun dalam realitasnya, demokrasi Pancasila yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah sebenarnya adalah demokrasi rekayasa untuk memperkuat kekuasaan presiden Soeharto dan kroni-kroni Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, demokrasi tidak datang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi dari penguasa, oleh penguasa dan untuk penguatan legitimasi kekuasaan penguasa. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat di depan umum yang sejatinya dilindungi oleh negara, namun sistem demokrasi hampir tidak dijumpai selama presiden Soeharto memimpin Indonesia. Pemikiran dan pandang kritis yang disampaikan oleh rakyat senantiasa berhadapan dengan tindakan represif aparat keamanan. Lewat pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI, pemerintahan Orde Baru memasung

¹⁵⁴Marwati Djeoned Poeponegoro, *Sejarah...*, hal. 664

kebebasan rakyat yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.¹⁵⁵

Rapuhnya perekonomian yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru juga menjadi penyebab lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998. Ketika krisis melanda negara-negara Asia Tenggara sejak tahun 1996 ternyata memiliki pengaruh yang kuat terhadap melemahnya perekonomian Indonesia dan tidak mampu menghadapi krisis global. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dollar Amerika Serikat semakin diperburuk oleh tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme pemerintahan Orde Baru. Rekayasa-rekayasa Orde Baru dalam bidang hukum yang lebih berpihak kepada para penguasa juga memberikan sumbangan terhadap krisis multi dimensional yang menstimulasi lahirnya era reformasi pada tahun 1998. Hukum dalam berbagai peristiwa sering dijadikan sebagai alat pembenaran terhadap tindakan-tindakan penguasa yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Krisis politik, hukum, dan ekonomi melahirkan krisis sosial yang lebih luas, yang terakumulasi pada awal 1998, mengarah pada gerakan reformasi yang menuntut Presiden

¹⁵⁵Konsep Dwi Fungsi ABRI dikenal pertama kali oleh Jendral Soedirman pada masa revolusi dengan tujuan untuk menanamkan semangat perjuangan kepada angkatan bersenjata dan mematuhi pimpinan meskipun mereka bisa saja mengambil-alih kekuasaan dan kepemimpinan. Pada tahun 1958, konsep ini kembali dikenalkan oleh A.H. Nasution di Magelang dengan pengertian yang jauh berbeda dengan pandangan Jendral Soedirman. Bagi A.H. Nasution, ABRI memiliki fungsi hamkamnas dan sosial politik. Konsep dwi fungsi ABRI bagi Soeharto memiliki peran penting untuk melanggengkan kekuasaannya pada masa Orde Baru. Baskara T. Wardaya (ed), *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 171 dan G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989), hal. 147

Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Berbagai elemen masyarakat sudah tidak percaya kepada janji-janji dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru karena dalam kehidupan sosial telah tergambar realitas yang jauh dari rasa keadilan dan kemakmuran. Masyarakat merasakan kebohongan demi kebohongan pemerintah di tengah kehidupan mereka yang semakin sulit dengan kenaikan sembilan harga makanan pokok. Itulah yang mendorong beberapa elemen masyarakat Indonesia untuk berjuang dan atas nama reformasi kekuasaan presiden Soeharto mesti diakhiri.¹⁵⁶ Mereka menuntut penegakan supremasi hukum, pembarantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pengadilan presiden Soeharto, amandemen konstitusi, pencabutan Dwi Fungsi ABRI dan pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.¹⁵⁷

Di samping krisis multi dimensional yang secara internal mendorong lahirnya era reformasi dijumpai pula beberapa kepentingan asing yang secara eksternal ingin menjadikan kejatuhan rezim Soeharto sebagai jembatan emas untuk melakukan penetrasi dan perluasan kepentingan ekonomi di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan lahirnya beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah begitu dipengaruhi oleh nilai-nilai dan semangat liberalisasi, deregulasi dan privatisasi yang membuka peluang sebesar-besarnya bagi masuknya kepentingan dan dominasi ekonomi asing di Indonesia. Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1999, misalnya, menyatakan bahwa pihak asing diberi kesempatan untuk menguasai 99 % saham perbankan sehingga Indonesia

¹⁵⁶Basuki Agus Suparno, *Reformasi...*, hal. 101

¹⁵⁷Yongky Gigih Prasisko, "Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia" dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.3 No. 2, (Agustus 2016), hal. 13

menjadi negara yang paling liberal dalam bidang perbankan. Itulah sebabnya kenapa kepemilikan pihak asing terhadap 47 buah perbankan di Indonesia mencapai 50,6 % dari total aset perbankan nasional yang mencapai 3.065 triliun rupiah.¹⁵⁸

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sengaja memberikan kesempatan yang sama antara Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta, termasuk swasta asing. Melalui undang-undang ini pemerintah membatasi badan usaha, termasuk Pertamina untuk melakukan kegiatan di hilir dan hulu dan disamakan haknya dengan pihak swasta dan pihak asing dalam mengeksploitasi kekayaan negara. Penerapan Undang-Undang Minyak dan Gas secara tidak langsung mengkerdilkan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara dan hanya mampu menguasai 16 % produksi migas pada tahun 2011. Sementara sisanya dikuasai oleh pihak asing yang memang sudah direncanakan sebelum kejatuhan presiden Soeharto pada tahun 1998. Kondisi yang sama ditemukan pula dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan kesempatan yang sama kepada investor domestik dan asing. Undang-undang yang seharusnya memberikan kemudahan kepada para investor ternyata memuluskan kepentingan asing dan meminggirkan kepentingan bangsa. Atas nama undang-undang, pemerintah memberikan hak kepemilikan tanah jangka panjang kepada pihak asing dan memberikan jaminan kebebasan untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang diinginkannya.¹⁵⁹

¹⁵⁸Syamsul Hadi, dkk, *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012), hal. 1-2

¹⁵⁹Syamsul Hadi, dkk, *Kudeta..*, hal. 2

Kejatuhan Soeharto dan transisi demokrasi membuka peluang yang besar bagi pihak asing untuk menguasai perekonomian Indonesia. Peluang yang sudah direncanakan semenjak masa presiden Soeharto berkuasa memang dimanfaatkan secara optimal sehingga membuat kedaulatan perekonomian Indonesia mulai terancam dan rakyatnya dipaksa menjadi penonton di negerinya sendiri. Penetrasi ekonomi melalui penanam modal sebenarnya telah dilakukan sejak masa Orde Baru secara berangsur-angsur, namun liberalisasi investasi yang paling ekstrim dilakukan oleh pemerintah pada masa reformasi. Ikut-campurnya *International Monetary Fund* (IMF) dalam mengatur *Letter of Intent* (LoI) pada tanggal 29 Juli 1998 mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat komitmen agar aturan-aturan investasi asing disederhanakan dan dipermudah.¹⁶⁰ Kondisi ini membuka peluang besar penetrasi pihak asing untuk mendominasi perekonomian Indonesia dan melemahkan kepercayaan diri bangsa. Penetrasi pihak asing merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari beberapa sebab yang mendorong kejatuhan presiden Soeharto dan lahirnya era reformasi.

B. Sistem Pemilihan Umum di Era Reformasi

Pemilihan umum (pemilu) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Kehadirannya adalah medium pesta demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan perjalanan bangsa dan negara pada periode tertentu. Pada negara modern, pemilu disebutkan oleh Samuel Huntington sebagai sarana pembangunan partisipasi politik rakyat dan arena seleksi bagi

¹⁶⁰Syamsul Hadi, dkk, *Kudeta...*, hal. 3-4

orang-orang untuk memperoleh jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. William Liddle melihat pemilu dalam perspektif hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktek pemerintahan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Ia menjelaskan bahwa setiap warga negara yang dianggap telah memiliki usia yang cukup dan memenuhi persyaratan undang-undang dapat memilih wakil-wakil mereka yang mau duduk di parlemen atau menjadi pemimpin pemerintahan.¹⁶¹

Pemilu di Indonesia telah diyakini sebagai instrument untuk mendorong proses demokratisasi. Keyakinan itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah berlangsung cukup lama dalam perjalanan sejarah Indonesia setelah masa kemerdekaan. Orde lama dan Orde Baru merupakan dua rezim yang mendahului masa reformasi telah melaksanakan pemilihan umum sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pelaksanaannya meskipun masih jauh dari norma dan kaidah demokrasi yang sesungguhnya, namun pemilu sudah menjadi instrumen penting dalam membentuk keyakinan dan tradisi politik kepada seluruh masyarakat Indonesia.¹⁶² Pemilu pada era reformasi sudah dilaksanakan sebanyak lima kali dalam perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Untuk mengatur jalannya pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan undang-undang untuk mengatur sistem dan

¹⁶¹Toni Adrianus Fito, dkk, *Mengenal Teori Ilmu Politik* (Jakarta: Nuansa, 2006), hal. 298-299

¹⁶²Aidul Fitriadi Azhari "Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi: Perspektif Ketatanegaraan" dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, (September 2004), hal. 179-180

mekanisme pelaksanaan pemilu, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pembentukan dan perubahan yang cukup signifikan dalam undang-undang pemilu meliputi pelaksanaan pemilu, peserta pemilu, penyelenggaraan pemilu, daerah pemilihan dan jumlah kursi, pendaftaran pemilih, pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, kampanye, pemungutan, penghitungan dan penetapan hasil, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, penggantian calon terpilih, pengawasan hingga sanksi pidana.¹⁶³ Perubahan demi perubahan memiliki tujuan untuk menyempurnakan sistem dan mekanisme pemilihan umum sejalan dengan situasi politik yang terus berkembang sejalan dengan bergulirnya era reformasi.

Sekarangnya ada dua bentuk sistem pemilu yang biasa diterapkan dalam negara demokrasi, yaitu sistem distrik dan proporsional. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua di dunia yang didasarkan kepada kesatuan geografis. Setiap satuan geografis yang biasa disebut distrik hanya memperoleh satu kursi dalam parlemen dan tidak pernah melebihi kuota yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Karena itu, suatu negara demokrasi yang menerapkan pemilihan umum dengan sistem distrik membagi beberapa kawasadalam sejumlah distrik pemilihan dan satuan geografis yang kira-kira sama dengan jumlah penduduk yang

¹⁶³Masyrofah, "Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi: Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No.2 (Desember 2013), hal. 164

mendiaminya. Masing-masing kontestan pemilu hanya memperoleh satu kursi parlemen yang ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Sementara pemilih yang menyalurkan suaranya kepada kontestan lain dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah suara pada distrik lain.¹⁶⁴ Kondisi seperti ini merupakan salah satu kelemahan penerapan sistem distrik pada pemilihan umum di beberapa negara yang mengaku sebagai negara demokrasi.

Sistem pemilu distrik biasa digunakan di negara-negara yang memiliki dwi-partai, seperti Inggris dan Amerika. Kelemahan utama sistem distrik adalah lahirnya kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh di parlemen. Akibat dari kesenjangan itu adalah perolehan suara yang selalu menguntungkan partai besar dan merugikan partai kecil. Banyak suara dari partai kecil yang dapat dinyatakan hilang karena tidak berhasil menjadi pemuncak pertama pada suatu distrik pemilihan. Keadaan seperti ini ternyata memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat yang pluralis dengan banyak kelompok minoritas, baik ras, etnis, budaya maupun agama.¹⁶⁵ Karena itu sistem distrik murni dengan tanpa memodifikasinya dan menggabungkan dengan sistem lain sangat sulit diterapkan di Indoensia dan merugikan masyarakat pemilih.

Sistem proporsional berbeda dengan sistem distrik karena kesatuan wilayah sebagai daerah pemilihan dalam pemilu sistem proporsional sangat memungkinkan untuk memilih beberapa perwakilan di parlemen. Pemilu yang

¹⁶⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 461-463

¹⁶⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hal. 465

menggunakan sistem proporsional sangat membuka peluang terjadinya distribusi suara secara proporsional sehingga partai politik yang memperoleh suara terbanyak memiliki kursi yang lebih banyak dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Sedangkan partai politik yang tidak memperoleh suara terbanyak tidak mengalami kehilangan suara karena tetap memperoleh kursi seimbang sesuai dengan besarnya dukungan masyarakat yang diperolehnya. Pemilu dengan sistem proporsional biasanya memberikan harga dengan sejumlah suara tertentu untuk peroleh satu kursi di parlemen.¹⁶⁶ Karena itu pemilihan umum dalam sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan menggunakan sistem pemilu proporsional karena dinilai lebih cocok dengan kondisi masyarakat yang memiliki pluralis budaya, agama dan etnis.

Pemilu pertama di era reformasi dilaksanakan pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie. Pemilu yang direncanakan pada tahun 2002 dipercepat menjadi tanggal 7 Juni 1999 dengan tujuan untuk menyelamatkan negara dari krisis ekonomi dan mempercepat pemulihan kehidupan berbangsa. Sistem yang diterapkan hampir sama dengan sistem pemilihan umum pada masa sebelumnya, yaitu sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar. Penerapan sistem ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 yang dijadikan instrument dan dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum pertama pada masa reformasi.¹⁶⁷ Daerah

¹⁶⁶Nia Kurniati Syam “Mencari Format Sistem Pemilu Yang Berkualitas”, dalam *Jurnal*, Volume XIX No. 1 (Januari-Maret 2003), hal, 29

¹⁶⁷Undang-Undang No. 3 Tahun 1999. Salah satu jenis tulisan dan pembahasan ilmiah yang sering muncul pada awal reformasi untuk menyoroiti sistem politik yang diterapkan di Indonesia pada masa sebelumnya adalah ketidakmampuan dalam membangun demokrasi dan

pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah propinsi dengan ketentuan bahwa setiap kabupaten dan kota minimal mesti mendapatkan satu kursi parlemen. Sementara jumlah kursi DPR pada setiap daerah pemilihan didasarkan kepada jumlah penduduk.

Sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar menempatkan pemilih untuk memberikan suara kepada partai tertentu dan partai memberikan suaranya kepada calon yang memiliki nomor urut teratas. Kelebihan suara akan diberikan kepada calon nomor berikutnya sekiranya calon dengan urutan teratas sudah memiliki suara yang cukup untuk kuota satu kursi.¹⁶⁸ Seorang calon anggota parlemen memperoleh alokasi kursi sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh dan penentuan sisa suara ditetapkan dengan mengacu kepada sisa suara terbesar. Partai-partai diberikan peluang pula untuk melakukan *stembus accord* untuk menyelesaikan sisa suara. Para pemilih dalam sistem pemilu proporsional berdasarkan stelsel daftar hanya memilih tanda gambar partai politik tertentu pada pemilu pertama era reformasi. Sedangkan daftar calon anggota parlemen meskipun tidak dituliskan namanya dalam surat suara, namun diumumkan secara terbuka di tempat-tempat berlangsungnya pemungutan suara.¹⁶⁹

kedaulatan rakyat yang disebabkan oleh sistem pemilu dan sistem kepartaian yang selama ini diterapkan belum berjalan efektif. Sebagian ilmuwan politik kemudian mengusulkan penerapan sistem distrik dalam konteks pemilu di Indonesia. Sebagian yang lain menganggap bahwa sistem proporsional yang selama ini diterapkan masih bisa dipertahankan sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hal. 480-481

¹⁶⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hal. 487

¹⁶⁹Aminah “Analisis Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian

Pelaksana pemilu tahun 1999 adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ketika itu dipimpin oleh Rudini (ketua), Adnan Buyung Nasution (wakil ketua) dan Harun al-Rasyid (wakil ketua).¹⁷⁰ Pemerintah membentuk pula badan pengawas dari pusat hingga daerah dan mengundang pemantau asing untuk mencermati pelaksanaan pemilu di Indonesia yang jauh berbeda dan lebih demokratis dibandingkan dengan pemilu pada masa-masa sebelumnya. Pemilu tahun 1999 memang dipersiapkan sedemokratis mungkin dan diberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihannya tanpa campur tangan pemerintah.

Masuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam lembaga legislatif pada pemilu 2004 membuka peluang penggunaan sistem pemilu campuran antara sistem distrik dan sistem proporsional.¹⁷¹ Sistem distrik digunakan untuk memilih anggota DPD yang pesertanya merupakan individu-individu yang berasal dari daerah pemilihan propinsi. Masing-masing propinsi di Indonesia memiliki kuota yang sama, yaitu sebanyak empat kursi. Penentuan pemenang pemilihan anggota DPD ditetapkan berdasarkan perolehan suara masing-masing calon dan suara terbesar pertama hingga keempat memperoleh kursi

di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum”, dalam *Jurnal Yustisia*, Vol. 1 No. 2 (Mei-Agustus 2012), hal. 79

¹⁷⁰Keanggotaan KPU pertama terdiri dari utusan masing-masing partai politik dan lima orang dari unsur pemerintahan. Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, pasal 9, ayat 1.

¹⁷¹Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2004 menjelaskan tentang penggunaan sistem proporsional dan distrik. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa sistem pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

di parlemen. Setiap individu yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU Pusat melalui KPU Propinsi. Berikutnya KPU Pusat yang dibantu oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dibuktikan dengan dukungan para pemilih. Dukungan itu mesti pula dilengkapi dengan tanda tangan atau cap jempol dan photo copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat yang memberikan dukungan.¹⁷²

Pemilihan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem pemilihan proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem ini memberi peluang dan kesempatan luas kepada masyarakat untuk memberikan suara mereka secara langsung kepada setiap calon yang mau dipilih. Pemilu 2004 memberikan pula kesempatan yang lebih besar kepada peran perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Masing-masing partai harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangnya 30 % pada setiap daerah pemilihan di seluruh Indonesia.¹⁷³ Selain memberikan keterwakilan perempuan, pemilu 2004 merupakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia, di mana presiden dan wakil presiden dipilih oleh masyarakat secara langsung. Pada masa sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis

¹⁷²Semua persyaratan pencalonan anggota DPD diatur dalam pasal 11 ayat 1-6 dan pasal 12 ayat 1-3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif. Baca juga Masyrofa, "Arah...", hal. 173

¹⁷³Munculnya perhatian terhadap keterwakilan sebanyak 30 persen pada setiap pemilu di era reformasi merupakan representasi awal tentang kesetaraan gender dalam bidang politik yang masa sebelumnya luput dari perhatian. Nur Asikin Thalib "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Uji Materil Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008", dalam *Jurnal Citra Hukum*, Vol. II No. 2 (Desember 2014), hal. 234

Permasyarakatan Rakyat (MPR). Karena itu pemilu 2004 dilaksanakan dalam tiga tahap yang terdiri dari pemilihan legislatif (DPR/DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden putaran pertama dan pemilihan presiden putaran kedua.

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang dijadikan instrument pelaksanaan pemilu legislatif di Indonesia tahun 2004 mulai pula diterapkan ketentuan ambang batas (*electoral threshold*) dengan perolehan suara partai politik sebesar 3% pada pemilu tahun 1999. Karena itu partai politik yang berhak menjadi kontestan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 merupakan partai-partai yang lolos *electoral threshold* dengan perolehan suara mencapai 3% pada pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2004 juga diikuti oleh beberapa partai politik baru dan partai yang mengganti nama sehingga mampu memenuhi beberapa persyaratan verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹⁷⁴

Perbaikan sistem pemilu senantiasa diusahakan oleh pemerintah Indonesia pada masa reformasi. Pasca berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, ketentuan *electoral threshold* pada pemilu 2009 tidak digunakan lagi dan diganti dengan ketentuan baru yang disebut *parliamentary threshold*. Pasal 202 ayat 1 menyebutkan bahwa peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan peroleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada pasal 315 ketentuan

¹⁷⁴Bagir Manan “Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”, dalam *Orasi Ilmiah Diesnatalis* Universitas Padjajaran Bandung, (April 2010), hal. 33-34

aturan peralihan dijelaskan pula bahwa partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3 % jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 4 % jumlah kursi DPRD Propinsi yang tersebar di 50 % jumlah propinsi di seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4 % jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di 50 % jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum pada masa berikutnya.¹⁷⁵

Sistem pemilu campuran (proporsional dan distrik) masih dipertahankan dalam pemilu legislatif pada tahun 2009, 2014 dan 2019. Pemilihan anggota parlemen yang secara hirarki terdiri dari DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selalu menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sedangkan pemilihan anggota DPD merefleksikan penggunaan sistem pemilu distrik, di mana masing-masing propinsi di Indonesia memperoleh kuota kursi parlemen yang sama, yaitu empat kursi.

C. Reformasi dan Pemilu Multi-Partai

Pemilu dengan sistem proporsional seperti disinggung sebelumnya biasa digunakan dalam negara demokrasi yang menganut sistem multi partai. Lahirnya reformasi dalam sejarah Indonesia membawa beberapa perubahan fundamental dalam kehidupan bangsa dan negara. Salah satu perubahan itu adalah munculnya jiwa zaman yang lebih mengapresiasi nilai-nilai transparansi dan keterbukaan sehingga masyarakat lebih leluasa dalam melakukan banyak hal. Perubahan fundamental dalam bidang politik adalah munculnya beragam jenis dan bentuk partai politik sejalan eforia reformasi yang kemudian

¹⁷⁵Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 202, Ayat 1 dan Pasal 315 tentang ketentuan aturan peralihan.

mengisi ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Nuansa dan dinamika kehidupan multi partai yang pernah mengisi ruang demokrasi pada pemilu tahun 1955 terulang kembali pada pemilu selama era reformasi.

Peluang mendirikan partai politik seiring dengan bergulirnya era reformasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Partai politik memiliki fungsi sebagai wadah organisasi yang dapat menyatukan pikiran dan orientasi yang sama dari anggota masyarakat. Karena itu partai politik sebagaimana disebutkan oleh Miriam Budiardjo¹⁷⁶ dapat dipandang sebagai bagian dari kelompok yang terorganisir dan anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebutnya dengan cara konstitusional. Sementara Jimly Asshiddiqie melihat partai politik sebagai asosiasi warga negara yang memiliki badan hukum yang mandiri dan bukan bagian dari badan hukum asosiasi lain. Proses pengurusan badan hukum itu dapat dilakukan oleh perorangan dan kelompok dari warga negara.¹⁷⁷

Giovanni Sartori mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum sehingga mereka mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan publik.¹⁷⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 memberikan pengertian partai politik dengan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

¹⁷⁶Miriam Budiardjo, *Dasar...*, hal. 403-404

¹⁷⁷Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 69

¹⁷⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hal. 404-405

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁷⁹

Beberapa pengertian partai politik merefleksikan bahwa kehadiran suatu partai sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sarana untuk menyalur berbagai aspirasi dan keinginan yang sama secara konstitusional. Di samping itu, partai politik adalah medium untuk menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik memiliki beberapa fungsi utama yang meliputi sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik.¹⁸⁰ Fungsi-fungsi itu kemungkinan besar telah menjadi kesadaran bangsa Indonesia sehingga sistem multi partai mulai diterapkan di tengah masyarakat yang memiliki pluralitas budaya, agama dan politik sejak era reformasi. Pesta demokrasi lima tahunan (pemilu) selama era reformasi memperlihatkan tingkat kegairahan politik yang jauh berbeda dengan kehidupan politik pada masa Orde Baru. Suasana itu bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di ibu kota negara, melainkan juga oleh mereka yang berdomisili pada berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Perubahan yang ditimbulkan sejak awal bergulirnya reformasi cukup mewarnai pelaksanaan pemilu tahun 1999 yang diikuti oleh multi partai yang terdiri dari tiga partai lama dan ditambah sejumlah partai baru hingga mencapai 48 partai politik. Proses seleksi partai politik pada pemilu 1999 relatif

¹⁷⁹Dikutip dalam Masyrofah, "*Arah ...*", hal. 165

¹⁸⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hal. 405-409

longgar dan mudah untuk dipenuhi sehingga partai yang lolos untuk mengikuti pemilu terlalu banyak. Sebelum dilakukan proses seleksi, jumlah partai politik yang tercatat pada lembaran negara adalah 141 yang kemudian diverifikasi lagi oleh tim 11. Tim ini dibentuk oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri sebagai Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) dengan salah satu tugasnya untuk melakukan verifikasi partai politik pada awal era reformasi. Tim 11 hanya bekerja selama satu bulan (1 Februari-1 Maret 1998) sesuai waktu yang diberikan untuk melakukan verifikasi partai politik yang ketika itu tercatat sebanyak 141 dalam lembaran negara.¹⁸¹

Tim 11 yang ketika itu di bawah pimpinan Nurcholis Madjid mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan verifikasi yang dilakukan terhadap 141 partai politik membuahkan hasil sehingga ditetapkan sebanyak 48 partai sebagai peserta pemilu tahun 1999. Keputusan itu disambut oleh masyarakat Indonesia dengan suka cita yang diiringi pula dengan berbagai protes dari kelompok yang merasa tidak puas, yaitu 12 partai politik yang merasa dirugikan oleh tim yang melakukan verifikasi. Protes demi protes terus berlanjut dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 7 Juni 1999.¹⁸² Masing-masing nama partai politik peserta pemilu tahun 1999 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

¹⁸¹Tim Sebelas terdiri dari Nurcholis Madjid (ketua), Adnan Buyung Nasution (wakil ketua), Adi Andojo Soetjipto (wakil ketua), Andi A. Malarangeng (sekretaris), Rama Pratama (wakil sekretaris), dan anggota-anggota Afan Gaffar, Mulyana W. Kusumah, Miriam Budiarmo, Kastorius Sinaga, Eep Saifullah Fatah dan Anas Urbaningrum. Salah satu tugas yang diemban tim ini adalah melakukan verifikasi Parpol. Masyrofah, "Arah...", hal. 169

¹⁸²Masyrofah, "Arah...", hal. 169-170

Tabel 6.1
Daftar Partai Peserta Pemilu Tahun 1999

No	Partai Politik	No	Partai Politik
1.	Partai Indonesia Baru	25.	Partai Nahdhatul Umat
2.	Partai Kristen Nasional Indonesia	26.	Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis
3.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	27.	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
4.	Partai Aliansi Demokrat Indonesia	28.	Partai Republik
5.	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia	29.	Partai Islam Demokrat
6.	Partai Umat Islam	30.	Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen
7.	Partai Kebangkitan Umat	31.	Partai Musyawarah Rakyat Banyak
8.	Partai Masyumi Baru	32.	Partai Demokrasi Indonesia
9.	Partai Persatuan Pembangunan	33.	Partai Golongan Karya
10.	Partai Syarikat Islam Indonesia	34.	Partai Persatuan
11.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	35.	Partai Kebangkitan Bangsa
12.	Partai Abul Yatama	36.	Partai Uni Demokrasi Indonesia
13.	Partai Kebangsaan Merdeka	37.	Partai Buruh Nasional
14.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	38.	Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
15.	Partai Amanat Nasional	39.	Partai Daulat Rakyat
16.	Partai Rakyat Demokratik	40.	Partai Cinta Damai
17.	Partai Syarikat Islam Indonesia 1905	41.	Partai Keadilan dan Persatuan
18.	Partai Katolik Demokrat	42.	Partai Solidaritas Pekerja
19.	Partai Pilihan Rakyat	43.	Partai Nasional Bangsa Indonesia
20.	Partai Rakyat Indonesia	44.	Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

21.	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi	45.	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
22.	Partai Bulan Bintang	46.	Partai Nasional Demokrat
23.	Partai Solidaritas Pekerja	47.	Partai Umat Muslimin Indonesia
24.	Partai Keadilan	48.	Partai Pekerja Indonesia

Sumber: KPU Republik Indonesia Tahun 1999

Pemilu yang diikuti oleh multi partai di Indonesia memiliki tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Satu (DPRD Propinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Dua (DPRD Kabupaten/Kota). Dari 48 partai politik peserta pemilu tahun 1999 hanya 21 partai saja yang berhasil untuk mengirim wakil-wakilnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁸³ Pemenangnya secara nasional diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan diikuti oleh Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB).¹⁸⁴

Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) meskipun meraih suara terbanyak pada pemilu tahun 1999 tidak secara otomatis mengantarkan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri untuk menduduki jabatan presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20-21 Oktober 1999. Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon presiden berhadapan dengan Abdurrahman Wahid yang dimajukan oleh koalisi Poros Tengah yang terdiri dari gabungan partai-partai

¹⁸³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hal. 483-484

¹⁸⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hal. 342

Islam (PAN, PPP, PKB, PBB, Partai Keadilan, PKU, PNU dan PSII) dan Golkar.¹⁸⁵ Pemilihan presiden dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999 dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid. Melalui kompromi-kompromi politik, Megawati Soekarnoputri yang mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden maju kembali menjadi calon wakil presiden dan siap berkompetisi dengan calon lain, Hamzah Haz. Pemilihan wakil presiden dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri.¹⁸⁶

Jumlah partai politik yang menjadi kontestan pemilu 2004 mengalami penurunan yang drastis. Pemilu yang berlangsung pada tanggal 5 April 2004 itu hanya diikuti oleh 24 partai politik. Tujuh di antaranya berhasil untuk meraih ambang batas (*electoral threshold*) dan masuk parlemen, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu menjelaskan bahwa partai politik yang dapat mengikuti pemilu 2004 adalah partai yang perolehan suaranya dalam pemilu 1999 mencapai *electoral threshold*, yaitu 3%. Partai politik lain selain enam partai yang lolos *electoral threshold* pada pemilu tahun 2004 adalah partai baru atau mengganti nama dan memenuhi syarat verifikasi KPU.¹⁸⁷

¹⁸⁵R Widya Setyabudi Sumadinata “Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014”, dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2016), hal. 185

¹⁸⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hal. 485

¹⁸⁷Bagir Manan “Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”, dalam *Orasi Ilmiah Diesnatalis Universitas Padjajaran Bandung*, (April 2010), hal. 33-34

Tabel 6.2
Daftar Partai Peserta Pemilu Tahun 2004

No	Partai Politik	No	Partai Politik
1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	13.	Partai Amanat Nasional
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	14.	Partai Karya Peduli Bangsa
3.	Partai Bulan Bintang	15.	Partai Kebangkitan Bangsa
4.	Partai Merdeka	16.	Partai Keadilan Sejahtera
5.	Partai Persatuan Pembangun	17.	Partai Bintang Reformasi
6.	Partai Persatuan Demokrat Kebangsaan	18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	19.	Partai Damai Sejahtera
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	20.	Partai Golongan Karya
9.	Partai Demokrat	21.	Partai Patriot
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	22.	Partai Serikat Indonesia
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	23.	Partai Persatuan Daerah
12.	Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia	24.	Partai Pelopor

Sumber: KPU Republik Indonesia Tahun 2004

Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 dilaksanakan dalam dua putaran. Putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 yang diikuti oleh lima pasangan calon, yaitu Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amin Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Yusuf Kalla dan Hamzah dan Agung Gumelar. Pengajuan pasangan

calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di parlemen sebesar 15 % atau 20 % suara sah secara nasional (*presidential threshold*).¹⁸⁸ Karena masing-masing pasangan calon tidak ada yang mencapai perolehan suara sebesar 50 % plus satu, pemilihan presiden dan wakil presiden dilanjutkan dengan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004 yang diikuti oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Yusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Yusuf Kalla memenangkan kontestasi dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia setelah berhasil memperoleh suara sebesar 60,62 %.¹⁸⁹

Pemilu legislatif tahun 2009 kembali diikuti oleh multi partai dan sebanyak 38 partai politik hasil verifikasi KPU memperebutkan kursi di parlemen pada tanggal 9 April 2009. 16 partai di antaranya adalah partai politik lama yang memenuhi syarat ambang batas (*electoral threshold*) sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan sisanya adalah partai baru atau mengganti nama yang lulus verifikasi. Pemenang pemilu legislatif tahun 2009 adalah Partai Demokrat yang memperoleh 150 kursi parlemen. Peringkat berikutnya adalah Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura.¹⁹⁰ Partai politik peserta pemilu tahun 2009 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

¹⁸⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5, ayat 4.

¹⁸⁹Data KPU Republik Indonesia Tahun 2004

¹⁹⁰Data KPU Republik Indonesia Tahun 2009

Tabel 6.3
Daftar Partai Peserta Pemilu Tahun 2009

No	Partai Politik	No	Partai Politik
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	20.	Partai Demokrasi Kebangsaan
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	21.	Partai Republik Nusantara
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	22.	Partai Pelopor
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	23.	Partai Golongan Karya
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	24.	Partai Persatuan Pembangunan
6.	Partai Barisan Nasional	25.	Partai Damai Sejahtera
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	26.	Partai Nasionan Benteng Kerakyatan Indonesia
8.	Partai Keadilan Sejahtera	27.	Partai Bulan Bintang
9.	Partai Amanat Nasional	28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	29.	Partai Bintang Reformasi
11.	Partai Kedaulatan	30.	Partai Patriot
12.	Partai Persatuan Daerah	31.	Partai Demokrat
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia
14.	Partai Pemuda Indonesia	33.	Partai Indonesia Sejahtera
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	35.	Partai Merdeka
17.	Partai Karya Perjuangan	36.	Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia
18.	Partai Matahari Bangsa	37.	Partai Sarikat Indonesia
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	38.	Partai Buruh

Sumber: KPU Republik Indonesia, 9 Juli 2008

Empat bulan berikutnya pemilu 2009 dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014. Pemilihan yang berlangsung pada tanggal 8 Juli 2009 itu memajukan tiga pasangan calon, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan perolehan suara mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Probowo Subionto dan Muhammad Yusuf Kalla-Wironto. Pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai instrument hukum Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di parlemen sebesar 20 % atau 25 % suara sah secara nasional (*presidential threshold*). Kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden 2009 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan perolehan suara jauh lebih besar dari pasangan Megawati Soekarnoputri-Probowo Subionto dan Muhammad Yusuf Kalla-Wironto.¹⁹¹

Pemilu legislatif lima tahun berikutnya dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 dengan kontestan 12 partai politik yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU selama tahun 2012-2013. *Parliamentary threshold* yang diterapkan pada pemilu 2009 kembali diadopsi untuk menentukan partai politik peserta pemilu tahun 2014. Lima partai pemenang pemilu legislatif tahun 2014 adalah PDIP (18,95%), Partai Golkar (14,75%), Partai Gerindra (11,81%), Partai Demokrat (10,19%) dan PKB (9,04%).¹⁹²

¹⁹¹Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 9.

¹⁹²Surat Keputusan KPU No. 411/KPTS/KPU/2004

Tabel 6.4
Daftar Partai Peserta Pemilu Tahun 2014

No	Partai Politik	No	Partai Politik
1.	Partai Nasional Demokrat	7.	Partai Demokrat
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	8.	Partai Amanat Nasional
3.	Partai Keadilan Sejahtera	9.	Partai Persatuan Pembangunan
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.	Partai Hanura
5.	Partai Golongan Karya	11.	Partai Bulan Bintang
6.	Partai Gerindra	12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Sumber: Surat Keputusan KPU No 6/KPTS/KPU/2013

Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 kembali menggunakan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 sebagai instrumen hukum yang menetapkan *presidential threshold* sebesar 20 % perolehan kursi parlemen atau 25 % suara sah secara nasional. Untuk mencapai *presidential threshold*, pengajuan calon presiden dan wakil presiden dimajukan oleh gabungan partai politik yang disebut Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKPI mengusung pasangan Joko Widodo-Muhammad Yusuf Kalla. Sementara Koalisi Merah Putih (KMP) memajukan pasangan Probowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden. Koalisi Merah Putih (KMP) didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS dan PBB. Pemilu yang berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014 itu dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-

Muhammad Yusuf Kalla dengan perolehan suara secara nasional sebesar 53,15 %.¹⁹³

Pemilihan umum legislatif tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari 27 partai politik yang mendaftar hanya 16 partai saja yang dinyatakan lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai kontestan pemilu legislatif tahun 2019. Pemenangnya adalah PDIP (22,26%) yang diikuti oleh Partai Golkar (14,78%) Partai Gerindra (13,57%), Partai Nasdem (10,26%) dan PKB (10,09%). Sejalan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, delapan partai politik pada pemilu tahun 2019 berhasil masuk parlemen dan memenuhi syarat ambang batas (*electoral threshold*) untuk mengikuti pemilu pada tahun 2024. Partai politik yang dimaksud selain lima besar pemenang pemilu legislatif 2019 adalah PKS (8,70 %), Partai Demokrat (9,39%), dan PAN (7,65%).¹⁹⁴

Tabel 6.5
Daftar Partai Peserta Pemilu Tahun 2019

No	Partai Politik	No	Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	9.	Partai Persatuan Indonesia
2.	Partai Gerindra	10.	Partai Persatuan Pembangunan
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.	Partai Solidaritas Indonesia
4.	Partai Golongan Karya	12.	Partai Amanat Nasional
5.	Partai Nasdem	13.	Partai Hanura
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	14.	Partai Demokrat

¹⁹³KPU Republik Indonesia Tahun 2014

¹⁹⁴Data KPU Republik Indonesia Tahun 2019

7.	Partai Berkarya	15.	Partai Bulan Bintang
8.	Partai Keadilan Sejahtera	16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Sumber: Surat Keputusan KPU No. 6/KPTS/KPU/2019

Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang dijadikan landasan hukum mesti dilakukan secara serentak dengan pemilu legislatif pada tanggal 17 April 2019. Undang-Undang ini menegaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi sekurang-sekurangnya 20 % dari jumlah kursi parlemen atau memperoleh 25 % suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.¹⁹⁵ Karena tidak ada satupun partai politik yang memperoleh *presidential threshold* pada pemilu legislatif tahun 2014, pengajuan calon presiden dan wakil presiden dimajukan oleh gabungan partai politik yang disebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM).

Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dibangun oleh PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Partai Hanura, PSI, Partai Perindo, PKPI dan PBB memajukan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sedangkan Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM) yang digagas oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dimenangkan oleh

¹⁹⁵Lihat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 222.

pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebesar 55.50 %.¹⁹⁶

D. Budaya Politik Masyarakat Melayu Palembang

Pelaksanaan pemilu-pemilu yang lalu beserta hasilnya yang terlihat dari perolehan dan susunan anggota DPRD Kota Palembang, telah mengukuhkan budaya politik baru kepada masyarakat Indonesia, disamping sebagian lainnya mengukuhkan budaya politik yang sudah mengakar di dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Palembang. Budaya politik dalam artian orientasi politik yang baru tersebut antara lain di tandai oleh tingkah-laku politik yang berakar kepada keperluan rezim, pemerintah dan system politik untuk legitimasi masyarakat. Selain itu, tekad untuk melaksanakan pemilu itu sendiri memperlihatkan adanya keyakinan rezim dan pemerintah bahwa lembaga politik tersebut merupakan unsur dari sistem politik yang demokratis.

Sungguhpun demikian, jika ditinjau dari nilai dasar pemilu lainnya, yaitu kesetaraan anggota masyarakat dalam pemerintahan dan penentuan pemimpin oleh masyarakat secara periodik memperlihatkan adanya gejala pengukuhan budaya politik yang sudah mentradisi. Dalam hal ini dapat dikemukakan adanya gejala formalisme dimana nilai-nilai ideal dipenuhi secara formal, akantetapisecaraempiris proses pemenuhannilai-nilai ideal tersebut tidaklah selaras dengan tuntutan nilai-nilai itu sendiri. Perhatikanlah misalnya fungsi pemilu sebagai sarana bagi sirkulasi pemimpin. Dimana proses pemilu ingin memperoleh pemimpin yang jujur dan amanah, serta mampu mensejahterakan rakyat, justru pencaturan politik

¹⁹⁶Data KPU Republik Indonesia Tahun 2019

yang terjadi saat ini memperlihatkan sebaliknya, masyarakat dipertontonkan dengan elit politik yang banyak tersandung masalah korupsi, politik uang, kecurangan, seolah menjadi berita harian yang tidak kunjung usai. Hal ini sangat bertentangan dengan budaya politik masyarakat melayu yang menempatkan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama, serta menepati janji politik kepada rakyat.¹⁹⁷

Melihat fenomena yang terjadi pada kontestasi politik saat ini, seakan-akan nilai-nilai keagamaan yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam diri masyarakat Palembang kembali dipertanyakan. Tradisi politik masyarakat Melayu, yang amanah, menepati janji, terbuka serta memprioritaskan kesejahteraan rakyat, kini hanya menjadi angan-angan belaka. Para elit politik saat ini telah kehilangan ruh dan semangatnya dalam mensejahterakan rakyatnya, pertikaian politik yang diikuti oleh maraknya politik uang dalam kontestasi pemilu berujung pada maraknya elit politik yang tersandung masalah korupsi. Tentu hal ini jauh dari tradisi-tradisi yang dipraktekkan oleh para pendahulu masyarakat melayu.

Tradisi politik melayu memiliki karakteristik yang menekankan pada kejujuran, dan mementingkan kesejahteraan rakyat. Sejarah membuktikan kepemimpinan raja dan sultan pernah membawa Palembang mencapai puncak kejayaannya. Masyarakat Melayu memiliki moralitas dan etika serta tidak menghalalkan segala cara untuk

¹⁹⁷Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, cet. Ke 3 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 96-99, lihat juga, A. Samad Ahmad, *Sulalatus Salatin, sejarah Melayu Edisi Pelajar* (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 2008), hal. 26.

mencapai tujuannya. Pemimpin pada masa itu memiliki jatidiri yang kuat, terbuka serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Selain itu, Masyarakat Palembang memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan Islam, dan mampu menjadikan Palembang sebagai kota yang sangat religius. Hal ini dapat dilihat dari laporan Tahunan Residen Palembang, yang isinya menyatakan bahwa masyarakat Muslim Palembang dilaporkan memiliki fantisme terhadap Islam. Laporan ini memuat tentang Bagaimana kehidupan sosial keagamaan masyarakat Palembang dalam kurun waktu 1880-an.¹⁹⁸ Maka tidak mengherankan apabila nilai-nilai religious masyarakat Palembang tersebut, dimanfaatkan oleh elit politik untuk menarik masa.

Masyarakat Melayu Palembang yang religius, selain terlihat dari aktifitas peribadatan dan syiar Islam, juga ditandai dengan kuatnya hubungan ikatan antara masyarakat dengan tokoh agama (ulama, ustadz) dan tokoh melayu, dengan masyarakat.¹⁹⁹ Tokoh agama masih menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam memilih calon pemimpin mereka. Jalinan hubungan antara tokoh agama dengan masyarakat yang kemudian terpotret hadirnya tokoh-tokoh politik pada majelis-majelis pengajian para ustadz yang ada di Palembang menjelang even-even politik seperti pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah (walikota). Yang kemudian berbuah menjadi dukungan kepada calon kepala daerah (walikota dan

¹⁹⁸Jeroen Pieter, *Kaumtuo Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, terj. Sutan Maimoen, (Jakarta: INIS, 1997), hal. 7

¹⁹⁹Maka tidak mengherankan apabila banyak tokoh agama, tokoh masyarakat dijadikan tim sukses ataupun pendukung utama bagi calon dalam pemilukada. Wawancara dengan Kemas Andi Syarifuddin 10 September 2020

wakil wali kota Palembang. Bahkan sampai pada tingkat pernyataan dukungan formal melalui konferensi pers.²⁰⁰

Pemahaman tentang religiusitas masyarakat Melayu Palembang ini menjadikan para tokoh politik membuat program-program populis yang menyentuh sisi keberagaman masyarakat. Para tokoh politik seringkali membangun afiliasi tertentu dengan majelis-majelis taklim, baik secara langsung maupun melalui kerabat atau tokoh kepercayaannya.²⁰¹ Mereka juga membuat program safari Ramadhan dan safari subuh keliling dari masjid ke masjid. Pada even safari Ramadhan dan safari subuh tersebut untuk memperkuat bobot hubungan dengan masyarakat, sang tokoh politik memberikan bantuan finansial kepada masjid/musholla yang dikunjunginya, baik itu bersumber anggaran dari pemerintah yang dipimpinnya maupun dana pribadinya. Hal ini barangkali yang bisa menjelaskan keunggulan calon pertahana, mereka didukung dana dan aparat pemerintah. Selain menyerahkan bantuan sosial pemerintah, karena program resmi pemerintah, mereka juga didampingi jajaran birokrasi pemerintah.

Kebijakan yang diambil oleh salah satu elit politik (walikota Palembang), dengan menggalakkan “gerakan sholat subuh berjamaah” dan mewajibkan para pejabat utama pemkot

²⁰⁰Deklarasi dukungan Majelis Asattidz Pecinta Ummat Rasulullah (Maspuro) untuk pasangan Harnojoyo – Fitri pada Pilkada 2018. (Sripoku.com, Sabtu, 2 Juni 2018).

²⁰¹Bunda Eva (Istri Edi Santna) dan Masyitoh (Istri Romi Hertan) – istri walikota pada periode yang berurutan - secara rutin menggelar pengajian majelis taklim binaannya. Sarimuda sebagai calon penantang mendirikan Forum Amal Kematian (Fakem) Darussalam dengan program unggulannya ambulan dan mobil jenazah gratis, yang kemudian ditandingi Pertahana dengan mengadopsi menjadi program Resmi Pemerintah Kota Palembang.

Palembang untuk melaksanakannya.²⁰² Faktanya kebijakan walikota tersebut, mendapatkan dukungan dari masyarakat Palembang, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia Palembang, sehingga mampu mengantarkannya menjadi walikota Palembang untuk periode kedua.

Penguat ikatan (dalam bentuk buah tangan) hubungan antara tokoh politik dengan masyarakat dengan pemilih juga menjadi salah satu kunci keberhasilan tokoh politik di Palembang. Masyarakat melayu Palembang sebagai masyarakat yang santun dalam berbahasa tidak mengungkapkannya dalam bentuk permintaan langsung, tapi dalam bentuk sindiran halus. Seperti ungkapan *apodio lokak*, yang secara literlek bisa berarti ada peluang apa, tetapi secara halus bisa berarti rizki apa yang bisa dibagi atau diberikan.²⁰³ Belum lagi ungkapan kageklah urusan milih tu (nantilah urusan milih itu) sekarang jajan/ngopi dulu. Atau ungkapan lain *pecaknyo teh kitoni pahit* (sepertinya teh kita ini pahit). Semuanya bermakna harapan akan adanya pemberian.

²⁰² Raja Adil Siregar “Pejabat Pemkot Palembang Wajib Salat Subuh, Ini Tanggapan MUI” dalam <https://news.detik.com/berita/> 19 September 2019/ diakses 10 September 2020

²⁰³Wawancara dengan Kemas Andi Syarifuddin

BAB VII

PERUBAHAN PILIHAN POLITIK UMAT ISLAM



Reformasi adalah salah satu episode sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang dimulai sejak tahun 1998. Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, reformasi dapat dipahami sebagai perubahan sistem pemerintahan yang mengandaikan beberapa perubahan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Masing-masing perubahan bersifat interdependen dan bermuara kepada upaya perbaikan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik. Karena itu sejak awal reformasi bergulir sudah mulai dilakukan beberapa perubahan sistem Pemilihan Umum di Indonesia yang sebelumnya adalah sistem demokrasi yang dikendalikan oleh pemerintahan orde baru kepada sistem demokrasi multi partai sesuai dengan aspirasi rakyat.

Sistem demokrasi multi partai merupakan fenomena tersendiri selama masa era reformasi dan mendorong lahirnya perubahan pilihan politik umat Islam di kota Palembang. Karena itu pembahasan dalam bab ini sengaja dirancang dalam suatu kajian yang berhubungan dengan perubahan orientasi politik umat Islam. Pembahasannya terdiri dari perubahan pilihan politik umat Islam Palembang, faktor-faktor yang mendorong perubahan pilihan politik umat Islam Palembang dan dampak perubahan pilihan politik umat Islam Palembang.

A. Perubahan Pilihan Politik Umat Islam Palembang

Interaksi antara umat Islam dan politik dalam sejarah politik Indonesia kontemporer sebenarnya telah dimulai dalam kurun waktu yang cukup lama. Pelopor gerakan politik sebelum Indonesia merdeka adalah Syarikat Islam (SI) yang kemudian setelah Indonesia merdeka bertransformasi menjadi Partai Syarikat Islam (PSI). Bahkan saat revolusi fisik perang kemerdekaan, umat Islam menjadi pilar utama barisan yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Gerakan politik umat Islam juga sangat kuat jejaknya dalam perumusan dasar negara Pancasila. Pencantuman Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama merupakan perwujudan prinsip ajaran tauhid dalam Islam. bahkan dalam teks aslinya yang kemudian disebut sebagai piagam Jakarta terdapat tujuh kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Setelah melalui perdebatan yang sengit dan lobi tokoh Kristen Indonesia Timur melalui Hatta akhirnya dihapuslah tujuh kata itu dari naskah pancasila dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Penghapusan tujuh kata dari piagam jakarta dalam rumusan Pancasila menjadi kekecewaan yang mendalam di kalangan umat Islam. Isu menjadikan Islam sebagai dasar negara menjadi tema perjuangan partai-partai Islam di Parlemen sementara. Bahkan perolehan suara partai-partai dengan suara yang cukup meyakinkan pada Pemilu 1955 diantaranya juga terlepas dari isu mengembalikan tujuh kata dalam piagam Jakarta kedalam Pancasila yang bisa dimaknai sebagai menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Di sisi lain kekecewan umat Islam terhadap penghapusan piagam Jakarta dari Pancasila ditambah dengan perasaan tidak diperlakukan secara adil juga menimbulkan

pemberontakan bersenjata. DI/TII di Jawa Barat yang di komandoi Karto Suwiryo dan Kahar Muzakar di Sulawesi merupakan perjuangan bersenjata sebagian umat Islam dimasa pemerintahan Soekarno. Bahkan Soekarno, PNI serta PKI sering mengaitkan Masyumi dengan PRRI di Sumatera. Fakta-fakta pengkerdilan dan penghianatan terhadap Islam terus berlanjut sampai masa Orde Baru. Sedangkan pada era Reformasi gairah umat Islam untuk kembali bangkit dengan mendirikan partai politik tidak seperti yang diharapkan.

Gairah kemunculan sistem demokrasi multi partai pada masa reformasi bukan hanya dirasakan di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, melainkan juga pada daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Palembang sebagai salah satu wilayah administratif di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat merasakan gairah lahirnya partai politik di era reformasi yang ditandai oleh pembukaan kantor-kantor baru yang memiliki fungsi sebagai sekretariat dan pengembangan partai semenjak tahun 1998. Semua partai politik peserta Pemilihan Umum yang lolos verifikasi secara nasional pada masa reformasi memiliki kantor-kantor sekretariat dan pengembangan partai di kota Palembang. Karena itu, jumlah partai politik peserta pemilu di kota Palembang memiliki korelasi dengan jumlah partai politik yang lolos verifikasi secara nasional.

Partai politik yang muncul selama masa reformasi sangat beragam jenis dan bentuknya yang dapat diklasifikasikan kepada partai berbasis agama (azas dan ideologi agama), partai nasionalis (azas dan ideologi Pancasila) dan partai nasional berbasis massa Islam. Partai politik berbasis agama sangat banyak muncul pada era reformasi, terutama

agama Islam dan Kristen.²⁰⁴ Partai politik berbasis agama Kristen (Partai Kristen) mungkin tidak banyak disinggung dalam penelitian ini karena pembahasan utamanya tidak bermaksud untuk melihat relasi agama dan perilaku politik, melainkan mencari relasi Islam dengan pilihan politik para penganutnya. Sejalan dengan tujuan itu, pembahasan ini lebih banyak mengemukakan partai politik berbasis ideologi Islam yang biasa disebut dengan partai Islam.

Partai nasionalis adalah partai yang memiliki azas dan ideologi Pancasila, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Kemudian partai nasionalis (azas dan ideologi Pancasila) berbasis massa Islam adalah PAN dan PKB. Kedua partai ini dikategorikan sebagai Partai Islam karena basis masing-masing partai adalah Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) yang memiliki hubungan primordial-kultural yang kuat dengan PAN dan PKB.²⁰⁵ Karena itu, dalam pembahasan berikutnya PAN dan PKB disebut dengan Partai Islam bersama dengan Partai-Partai Islam lainnya.

Selama era reformasi sangat beragam partai politik Islam yang muncul di Indonesia. Tujuh belas dari 48 partai politik yang menjadi kontestan pemilu tahun 1999 adalah partai

²⁰⁴Pada pemilu 1999 ditemukan dua partai politik berbasis agama Kristen, yaitu Partai Kristen Nasional Indonesia dan Partai Katolik Demokrat. Kedua partai politik ini gagal memperoleh suara rakyat dan tidak berhasil melewati ambang batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang pemilu. Pada pemilu 2004-2009 ditemukan satu partai baru yang berbasis agama Kristen (Partai Kristen), yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS). Informasi ini diolah dari partai peserta pemilu tahun 1999-2009 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Tahun 1999-2009.

²⁰⁵Mochammad Nurhasim (ed), *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-LIPI, 2016), hal. 4

politik Islam.²⁰⁶ Jumlah tersebut mengalami penurunan pada pemilu tahun 2004 yang hanya diikuti oleh 7 partai politik Islam dari 24 partai yang lolos verifikasi.²⁰⁷ Jumlah partai Islam bertambah dua lagi pada pemilu tahun 2009 sehingga menjadi sembilan dari 44 partai politik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pesta demokrasi. Partai politik Islam yang menjadi kontestan pesta demokrasi lima tahunan kembali mengalami penurunan pada pemilu tahun 2014 dan 2019 dan hanya diikuti oleh lima partai politik saja, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB).²⁰⁸

Tabel 7.1
Partai Islam di Era Reformasi

No	Nama Partai	Pemilihan Umum				
		1999	2004	2009	2014	2019
1.	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia	✓				
2.	Partai Umat Islam	✓				
3.	Partai Kebangkitan Umat	✓				
4.	Partai Masyumi Baru	✓				
5.	Partai Persatuan Pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Partai Syarikat Islam Indonesia	✓				
7.	Partai Syarikat Islam Indonesia 1905	✓				
8.	Partai Politik Islam	✓				

²⁰⁶Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Tahun 1999

²⁰⁷Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Tahun 2004

²⁰⁸Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Tahun 2014 dan 2019

	Indonesia Masyumi					
9.	Partai Bulan Bintang	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Partai Keadilan (PK/PKS)	✓	✓	✓	✓	✓
11.	Partai Umat Muslimin Indonesia	✓				
12.	Partai Kebangkitan Bangsa	✓	✓	✓	✓	✓
13.	Partai Islam Demokrat	✓				
14.	Partai Nahdhatul Umat	✓				
15.	Partai Abul Yatama	✓				
16.	Partai Amanat Nasional	✓	✓	✓	✓	✓
17.	Partai Cinta Damai	✓				
18.	Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia		✓	✓		
19.	Partai Bintang Reformasi		✓	✓		
20.	Partai Matahari Bangsa			✓		
21.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama			✓		

Sumber: Data KPU Republik Indonesia Tahun 1999-2019

Tabel Partai Islam pada era reformasi menjelaskan bahwa hanya lima partai Islam yang mampu mengikuti pemilihan umum, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Meskipun Partai Bintang Reformasi mendapatkan satu kursi parlemen di Kota Palembang, namun partai itu secara nasional tidak lolos ambang batas perolehan suara untuk mengikuti pemilu berikutnya. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan Partai Islam yang memiliki hubungan dengan

sejarah politik masa lalu. Embrio pembentukannya berawal dari keinginan kader-kader Partai Masyumi, PSII, NU dan Perti. Partai-partai itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada masa pemerintahan orde lama lewat Dekrit Presiden tahun 1959.²⁰⁹ Sejak tahun 1970, presiden Soeharto mengadakan konsultasi untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik pada masa orde baru dengan beberapa pimpinan partai sehingga menjadi tiga partai. Salah satunya adalah PPP yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 dengan azas Islam.²¹⁰

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah partai Islam kedua yang senantiasa mengikuti pemilihan umum di Indonesia. Partai ini lahir pada tanggal 17 Juli 1988 di Jakarta sejalan dengan munculnya era reformasi yang melandasi perjuangannya kepada ajaran Islam yang universal untuk membangun sistem perpolitikan baru di Indonesia. PBB sering disebut dengan partai reinkarnasi Masyumi karena tokoh pendirinya adalah mantan aktivis yang mencintai organisasi tersebut. Penggunaan simbol bulan bintang dimaksudkan untuk menjadi kesinambungan historis dengan perjuangan Partai Islam Masyumi. Para tokoh pendirinya secara simbolik dan terbuka menyebutkan bahwa PBB memiliki hubungan emosional dengan partai Masyumi. Propaganda itu dilakukan dengan tujuan untuk menarik massa rakyat dan menghimpun kembali kekuatan yang pernah diperoleh oleh Masyumi pada masa lalu.²¹¹

²⁰⁹R. William Liddle, *Islam, Politik dan Modernisasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1977), hal. 67

²¹⁰R. William Liddle, *Islam...*, hal. 80-81

²¹¹Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), hal. 72-73

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai yang lahir sebagai perwujudan keinginan warga Nahdhatul Ulama (NU) pasca Orde Baru. Pengurus NU menyadari bahwa organisasi yang mereka pimpin adalah organisasi Islam terbesar dan potensial untuk dimanfaatkan dalam pengembangan umat. Pengurus NU menerima banyak usulan yang mengerucut pada keinginan untuk membentuk partai politik yang berbasiskan massa Islam. Proses deklarasi partai politik dengan PKB dilaksanakan pada 23 Juli 1998 yang melibatkan beberapa kiai, seperti Munasir Allahilham, Ilyas Ruchyat, Muchid Muzadi, A. Mustofa Bisri dan Abdurrahman Wahid. PKB didirikan dengan tujuan untuk memberikan wadah bagi aspirasi politik warga NU yang diperkirakan ketika itu mencapai 40 juta orang di Indoensia. Pimpinannya diberikan kepada Matori Abdul Jalil yang bukan termasuk deretan tokoh-tokoh NU untuk menghindari keterlibatan organisasi itu secara kelembagaan dalam politik praktis.²¹²

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik yang lahir dari tranformasi gerakan dakwah yang dilakukan oleh aktivis Islam pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1998 dengan tujuan bukan untuk kepentingan dalam memperoleh jabatan di parlemen, melainkan sebagai bagian dari wujud dakwah. Partai yang pada awalnya berasal dari gerakan dakwah ini diberi nama dengan Partai Keadilan (PK) dan kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai gerakan dakwah, beberapa tokoh sentral pendiri PKS mengembangkan

²¹²Mochammad. Nurhasim (ed), *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 80-81

metode kaderisasi yang digunakan oleh Ikhwanul Muslimin²¹³ untuk menjaring kader-kader muda lainnya dan memperluas basis dukungannya dengan menjalani serangkaian aktivitas dakwah melalui berbagai kegiatan keagamaan Islam di tengah masyarakat.²¹⁴

Kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta yang dihadiri oleh ribuan massa pendukung. Sejarah berdirinya tak terlepas dari sosok Amien Rais, yaitu sang lokomotif gerakan reformasi 1998. Pasca keberhasilan menumbangkan Orde Baru, Amien Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MAR) merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dengan mendirikan partai politik baru dengan nama Partai Amanat Nasional (PAN). PAN memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi dan menegakan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual.²¹⁵

Partai PAN memiliki azas “Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam”. Dengan azas itu PAN menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang

²¹³Ikhwanul Muslimin merupakan suatu gerakan berdasarkan ideologi Islam yang jaringannya berskala internasional yang mempunyai pengaruh besar pada beberapa negara di dunia. Robert S. Leiken & Steve Brooke, “The Moderat Muslim Brotherhood”, dalam *Foreign Affairs Magazine*, (April 9, 2007), hal. 45.

²¹⁴Mochammad. Nurhasim (ed), *Masa...*, hal. 200-201

²¹⁵<http://pan.or.id>, diunduh pada tanggal 3 Juni 2020. Syafri Wirman dan Imron Nasri, *Merangkai Sejarah Menatap Masa Depan: Refleksi Kelahiran Partai Amanat Nasional* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hal. 55

lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Partai ini pada dasarnya adalah partai terbuka, meski sebagian orang menganggapnya partai orang Muhammadiyah karena sosok Amien Rais pada saat itu adalah Ketua Umum Muhammadiyah.²¹⁶

Lahirnya beragam Partai Politik Islam setelah bergulirnya era reformasi merupakan buah dari meluasnya skala Islam di Indonesia. Ini tidak saja menyebabkan perubahan dan transformasi kehidupan keberagamaan, melainkan juga telah merubah struktur dan corak sosial. Kondisi ini sangat terasa di Kota Palembang terutama ketika dilangsungkannya pesta demokrasi lima tahunan yang diikuti oleh beberapa partai politik Islam yang muncul sejalan dengan beberapa perubahan setelah era reformasi. Apalagi populasi masyarakat yang mendiami wilayah Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan itu dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mayoritas beragama Islam dengan jumlah mencapai 91,74 %.²¹⁷ Data ini merefleksikan bahwa mayoritas konstituen di Kota Palembang adalah beragama Islam yang kehadiran mereka sangat penting dan asset besar dalam setiap pemilihan umum yang dilakukan selama era reformasi.

Sekiranya jumlah umat Islam berkorelasi dan berbanding lurus dengan pilihan politik terhadap partai-partai Partai Islam besar kemungkinan umat Islam dapat menentukan dan memberikan warna baru perjalanan demokratisasi di Kota Palembang. Sayangnya data-data pemilu legislatif selama era reformasi di Kota Palembang menunjukkan bahwa besarnya

²¹⁶<http://pan.or.id>, diunduh pada tanggal 3 Juni 2020 dan Moch. Nurhasim (ed), *Masa Depan...*, hal. 8-9

²¹⁷Data BPS Kota Palembang 2019

jumlah konstituen beragama Islam tidak berkorelasi dan berbanding lurus dengan pilihan politik mereka. Partai-partai nasionalis ternyata lebih memikat hati dan menjadi pilihan utama umat Islam dibandingkan partai-partai Islam. Perolehan kursi parlemen pada pemilu legislatif tahun 1999 ternyata didominasi oleh partai-partai nasionalis.

Tabel 7.2

Perolehan Kursi DPRD Kota Palembang Tahun 1999

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi	Persentase (%)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19	43,18 %
2.	Partai Golkar	7	17,94 %
3.	Partai Amanat Nasional	6	15,38 %
4.	Partai Persatuan Pembangunan	4	10,26 %
5.	Partai Keadilan	1	2,56 %
6.	Partai Bulan Bintang	1	2,56 %
7.	Partai Bhinneka Tinggal Ika	1	2,56 %
Jumlah		39	

Sumber: KPUD Kota Palembang Tahun 1999

Tabel ini menjelaskan bahwa hanya tujuh partai politik yang berhasil untuk memperoleh kursi di DPRD Kota Palembang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bukan hanya mendominasi perolehan suara pada tingkat nasional, melainkan juga pada tingkat lokal di Kota Palembang. PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri mampu mengantarkan wakil-wakilnya untuk memperoleh 19 kursi parlemen atau sebesar 43,18 % dari perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Palembang. Kemenangan PDIP diikuti oleh Partai Golkar yang

memperoleh 7 kursi parlemen atau 15,90 % perolehan kursi DPRD kota Palembang. Partai Amanat Nasional (PAN) yang menduduki posisi kelima secara nasional berhasil menempati posisi ketiga dalam pemilihan anggota DPRD Kota Palembang dengan perolehan 6 kursi.²¹⁸ Partai politik lain yang berhasil untuk mengantarkan wakil-wakilnya sebagai anggota parlemen Kota Palembang adalah PPP, Partai Bhinneka Tunggal Ika, PK dan PBB.²¹⁹

Empat dari tujuh partai politik yang memperoleh kursi di parlemen Kota Palembang pada pemilu tahun 1999 adalah partai Islam. Karena itu jumlah partai Islam yang memperoleh kursi DPRD Kota Palembang sedikit lebih banyak dari partai nasionalis. Sayangnya prestasi itu tidak berjalan linear dengan perolehan kursi parlemen dan semua perolehan partai Islam berada di bawah perolehan partai nasionalis, terutama PDIP dan Golkar. Kondisi ini membuat perolehan kursi partai politik Islam pada pemilu legislatif tahun 1999 ternyata tidak begitu menggembirakan dan hanya mampu meraih 30,76 % atau 12 kursi DPRD Kota Palembang. Jumlah ini jauh berada di bawah perolehan kursi parlemen yang diraih oleh PDIP, yaitu 19 kursi atau 48,72 % dari jumlah kursi di DPRD Kota Palembang.²²⁰

Jumlah kursi di DPRD hasil pemilu 1999 sebenarnya 44 kursi. Lima Kursi milik TNI-Polri tidak dimasukkan dalam penghitungan hasil penghitungan dan peta perolehan suara Pemilu 1999, karena TNI-Polri bukan peserta Pemilu, Fraksi TNI-Polri sebagai bentuk akomodasi warisan sistem Pemilu rezim Orba yang masih diadopsi dimasa transisi ini.

²¹⁸KPUD Kota Palembang Tahun 1999

²¹⁹KPUD Kota Palembang Tahun 1999

²²⁰KPUD Kota Palembang Tahun 1999

Pada pemilu tahun 2004 terjadi beberapa perubahan perolehan kursi DPRD di Kota Palembang. Partai Demokrat yang ikut pemilu pertama pada tahun 2004 sukses memperoleh suara terbesar dan menempatkan wakil-wakilnya sebanyak 11 orang di parlemen. Posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar yang mengalami peningkatan perolehan suara sehingga mampu menambahkan satu kursi parlemen dibandingkan dengan pemilu tahun 1999. PDIP yang mendominasi perolehan kursi DPRD Kota Palembang pada pemilihan umum tahun 1999 hanya memperoleh 5 kursi dan menempati urutan keempat perolehan suara. Posisi yang sama ditempati pula oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan yang berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).²²¹

Partai politik lain yang sukses memperoleh kursi DPRD Kota Palembang adalah Partai Pesatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Patriot, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK). Dua partai politik yang pada masa sebelumnya memperoleh satu kursi harus tersingkir dan tidak mempunyai wakil di DPRD Kota Palembang, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Bhinneka Tunggal Ika.²²² Untuk mengetahui lebih jauh tentang perolehan kursi masing-masing partai politik di DPRD Kota Palembang bisa dilihat pada table di bawah ini.

²²¹KPUD Kota Palembang Tahun 2004

²²²KPUD Kota Palembang Tahun 2004

Tabel 7.3
Perolehan Kursi DPRD Kota Palembang Tahun 2004

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi	Persentase (%)
1.	Partai Demokrat	11	24,44 %
2.	Partai Golkar	8	17,78 %
3.	Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan	5	11,11 %
4.	Partai Amanat Nasional	5	11,11 %
5.	Partai Keadilan Sejahtera	5	11,11 %
6.	Partai Persatuan Pembangunan	4	8,89 %
7.	Partai Bintang Reformasi	3	6,67 %
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	2,22 %
9.	Partai Patriot	1	2,22 %
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	2,22 %
11.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1	2,22 %
Jumlah		35	

Sumber: KPUD Kota Palembang Tahun 2004

Perolehan suara partai-partai Islam pada pemilu legislatif tahun 2004 di Kota Palembang kelihatannya masih sulit untuk menyaingi perolehan suara dan keunggulan partai-partai nasionalis. Dari 659.420 suara sah, gabungan partai Islam hanya mampu meraih suara sebesar 164.701 atau sebesar 27,68 % suara. Sedangkan partai-partai nasionalis mampu meraih suara sebesar 388.879 atau 54,07 % suara sah. Meskipun masih sulit untuk bersaing dengan partai-partai nasional, perolehan kursi parlemen partai-partai Islam sedikit

mengalami kenaikan pada pemilu tahun 2004 di Kota Palembang yang secara akumulatif mencapai 40 % atau 18 kursi. Peningkatan jumlah kursi perlemen itu sayangnya belum mampu membuat partai-partai Islam untuk berbesar hati karena tetap berada di bawah peroleh suara partai-partai nasionalis yang mampu meraih 60 % atau 27 kursi parlemen di Kota Palembang.²²³

Partai Demokrat, partai baru dan baru pertama kali ikut Pemilu menjadi pemenang Pemilu di kota Palembang Tahun 2004 dan menduduki jabatan ketua DPRD Kota Palembang. Bahkan menghantarkan kadernya menjadi salah wakil ketua di DPRD propinsi Sumatera Selatan.

Kontestasi pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan hanya 12 partai saja yang berhasil dalam menempatkan wakil-wakilnya di parlemen Kota Palembang. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Sosilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi pemenang pertama dengan perolehan 11 kursi parlemen atau setara dengan 22 % dari perolehan kursi DPRD Kota Palembang. Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sama dan masing-masingnya memperoleh 7 kursi sehingga menempatkannya sebagai pemenang kedua. Posisi ketiga diperoleh oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).²²⁴

Enam partai politik lain yang memperoleh kursi DPRD Kota Palembang pada pemilu legislatif tahun 2009 adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Peduli Rakyat Nasional

²²³KPUD Kota Palembang Tahun 2009

²²⁴KPUD Kota Palembang Tahun 2009

(PPRN) dan Partai Barisan Nasional. Karena itu, partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD Kota Palembang pada pemilu legislatif tahun 2009 adalah sebanyak 26 partai yang terdiri dari 19 partai politik dengan ideologi nasionalisme dan 7 partai politik agama (Islam dan Kristen).²²⁵ Tabel berikut ini menjelaskan perolehan kursi masing-masing partai politik di DPRD Kota Palembang pada Pemilihan Umum tahun 2009.

Tabel 7.4
Perolehan Kursi DPRD Kota Palembang Tahun 2009

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi	Persentase (%)
1.	Partai Demokrat	11	22 %
2.	Partai Golkar	7	14 %
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	14 %
4.	Partai Gerindra	5	10 %
5.	Partai Hanura	5	10 %
6.	Partai Keadilan Sejahtera	5	10 %
7.	Partai Persatuan Pembangunan	3	6 %
8.	Partai Amanat Nasional	2	4 %
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	4 %
10.	Partai Bintang Reformasi	1	2 %
11.	Partai Peduli Rakyat Nasional	1	2 %
12.	Partai Barisan Nasional	1	2 %
Jumlah		50	

Sumber: KPUD Kota Palembang 2009

²²⁵KPUD Kota Palembang Tahun 2009

Partai Islam yang memperoleh kursi DPRD Kota Palembang hanya lima partai saja dari sembilan partai Islam yang ikut kontestasi pemilu legislatif pada tahun 2009, yaitu PKS, PPP, PAN, PKB dan PBR. Perolehan suara masing-masing partai ini juga belum mampu bersaing dengan perolehan suara partai nasionalis. Kelima partai Islam itu hanya meraih suara sebesar 125.428 suara atau setara dengan 20,18 % dari perolehan suara sah. Sementara partai nasionalis memperoleh suara sebesar 359.343 suara dan setara dengan 57,87 % dari total suara keseluruhan. Perolehan kursi parlemen dari kelima partai Islam itu juga relatif kecil, yaitu 13 kursi (26 %) dibandingkan partai nasionalis yang memperoleh 37 kursi (74 %).²²⁶ Karena itu, mungkin ini prestasi terburuk dalam sejarah perjalanan partai Islam selama mengikuti kontestasi pemilu legislatif di Kota Palembang pada era reformasi.

Sebagian besar partai politik yang ikut pemilu tahun 2009 yang memperoleh kursi DPRD Kota Palembang kembali menjadi kontestan pemilihan umum legislatif tahun 2014, kecuali Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan Partai Barisan Nasional. Partai lain yang lolos verifikasi KPU untuk mengikuti pemilu 2014 adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Karena itu pemilu tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik yang siap bersaing untuk memperebutkan kursi parlemen secara nasional dan lokal. Lima pemenangnya pada tingkat nasional adalah PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKB.²²⁷

Sementara pada tingkat lokal di Kota Palembang hampir semua partai politik peserta pemilu tahun 2014

²²⁶KPUD Kota Palembang Tahun 2009

²²⁷KPUD Kota Palembang Tahun 2014

memperoleh kursi di parlemen, kecuali Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Kursi terbanyak kembali diraih oleh PDIP yang dua kali pemilu sebelumnya dipegang oleh Partai Demokrat. Sedangkan Partai Demokrat sendiri hanya mampu meraih posisi kedua dengan perolehan 7 kursi atau 14 % dari perolehan kursi DPRD Kota Palembang. Partai berikutnya yang memperoleh kursi DPRD Kota Palembang adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PAN, PPP dan PBB.²²⁸

Tabel 7.5

Perolehan Kursi DPRD Kota Palembang Tahun 2014

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi	Persentase (%)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9	18 %
2.	Partai Demokrat	7	14 %
3.	Partai Golkar	6	12 %
4.	Partai Gerindra	5	10 %
5.	Partai Nasional Demokrat	5	10 %
6.	Partai Kebangkitan Bangsa	5	10 %
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	3	6 %
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3	6 %
9.	Partai Amanat Nasional	3	6 %
10.	Partai Persatuan Pembangunan	2	4 %
11.	Partai Bulan Bintang	2	4 %
Jumlah		50	

Sumber: KPUD Kota Palembang Tahun 2014

²²⁸KPUD Kota Palembang Tahun 2014

Tabel perolehan kursi DPRD Kota Palembang tahun 2014 menunjukkan bahwa tidak ada satupun partai politik yang memperoleh suara dominan dan mencapai 20 % dari perolehan kursi. Persebaran suara pemilih hampir merata untuk masing-masing partai politik yang memperoleh kursi di parlemen. Lima partai Islam (PKB, PKS, PAN, PPP dan PBB) yang mengikuti kontestasi pemilu 2014 berhasil dalam mengirim wakil-wakilnya menjadi anggota parlemen Kota Palembang. Perolehan suara terbanyak dari partai Islam adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meraih suara sebesar 57.847 (7,98 %) dengan perolehan lima kursi di DPRD Kota Palembang. Sayangnya, perolehan suara PKB ini masih sulit untuk menyaingi perolehan suara partai nasionalis, terutama PDIP, Partai Demokrat dan Partai Golkar yang masing-masingnya memperoleh suara 120.200 (16,58 %), 91.990 (12,69 %) dan 65.784 (9,07 %). Karena itu PDIP memperoleh sembilan kursi, Partai Demokrat memperoleh tujuh kursi dan Partai Golkar memperoleh enam kursi DPRD Kota Palembang.²²⁹

Pencapaian partai-partai Islam secara akumulatif dalam pemilihan umum legislatif di Kota Palembang pada tahun 2014 hanya mampu meraih suara sebesar 240.675 (33,17 %). Pencapaian ini sangat tidak menggembirakan perolehan suara partai-partai Islam karena jauh berada di bawah perolehan suara partai-partai nasionalis yang mampu meraih sebesar 471.114 (64,97 %). Dari 50 kursi yang diperebutkan pada parlemen di Kota Palembang, partai-partai dengan ideologi dan massa Islam yang mampu meraih 15 kursi dan sisanya 35 kursi merupakan milik partai-partai nasional.²³⁰

²²⁹KPUD Kota Palembang Tahun 2014

²³⁰KPUD Kota Palembang Tahun 2014

Sebelas partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kota Palembang secara nosional ditetapkan sebagai partai peserta pemilu 2019 bersama lima partai baru yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu peserta pemilu di Indonesia pada tanggal 17 April 2019 adalah 16 partai politik untuk memperebutkan peluang kursi perlemen pada tingkat nasional dan lokal. Karena pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 dilakukan secara serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden kemungkinan besar masing-masing calon dapat mempengaruhi perolehan suara partai politik dan kursi parlemen pada tingkat nasional dan daerah-daerah di seluruh Indonesia.²³¹

Perolehan suara dan kursi DPRD Kota Palembang pada tahun 2019 hampir sama dengan hasil pemilu 2014. Partai politik peserta pemilu tidak ada yang meraih perolehan suara dan kursi parlemen yang dominan. PDIP sebagai partai politik yang menjadi pemenang secara nasional hanya mampu meraih 14 % kursi parlemen di Kota Palembang. Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung oleh PDIP sebagai calon presiden dan wakil presiden ternyata membuat perolehan suara dan kursi parlemen di Kota Palembang mengalami penurunan. Pemenangnya adalah Partai Demokrat yang memperoleh 9 kursi atau 18 % dari perolehan kursi DPRD Kota Palembang. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden hanya mampu menempati posisi kedua dengan perolehan 8 kursi DPRD Kota Palembang.²³²

Pemilihan legislatif di Kota Palembang tahun 2019 merupakan fenomena unik di tengah konstelasi politik yang

²³¹KPUD Kota Palembang Tahun 2019

²³²KPUD Kota Palembang Tahun 2019

sudah terpola pada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai Demokrat yang kurang jelas keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden ternyata lebih disukai oleh masyarakat Kota Palembang sehingga menempati posisi pertama dalam perolehan kursi parlemen. Partai utama pendukung dua pasang calon presiden dan wakil presiden, seperti PDIP, Gerindra, Golkar, PAN dan lain sebagainya hanya memperoleh kursi DPRD Kota Palembang di bawah perolehan Partai Demokrat.²³³

Tabel 7.6

Perolehan Kursi DPRD Kota Palembang Tahun 2019

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi	Persentase (%)
1.	Partai Demokrat	9	18 %
2.	Partai Gerindra	8	16 %
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	14 %
4.	Partai Amanat Nasional	6	12 %
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	6	12 %
6.	Partai Golongan Karya	5	10 %
7.	Partai Keadilan Sejahtera	5	10 %
8.	Partai Nasional Demokrat	3	6 %
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	2 %
Jumlah		50	100

Sumber: Data KPUD Palembang Tahun 2019

²³³KPUD Kota Palembang Tahun 2019

Lima partai Islam (PKB, PKS, PAN, PPP dan PBB) kembali ikut kontestasi pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 bersama dengan sebelas partai nasionalis lainnya. Salah satunya gagal masuk parlemen, yaitu PBB karena tidak mampu memperoleh simpati masyarakat Kota Palembang. PAN yang dipandang sukses karena perolehan suaranya paling tinggi di antara partai Islam hanya mampu meraih suara sebesar 70.139 (8,11 %) dan memperoleh enam kursi DPRD Kota Palembang. Karena itu prestasi dan perolehan suara PAN belum membuatnya menjadi partai yang berhasil untuk menarik simpati umat Islam karena masih kalah bersaing dengan beberapa partai nasional, seperti Partai Demokrat dan Partai Gerindra dan PDIP yang memperoleh suara dan kursi parlemen yang jauh lebih besar.²³⁴

Perolehan suara semua partai Islam hanya sebesar 227.595 atau 26.32 % dari keseluruhan suara yang sah. Jumlah ini jauh tertinggal oleh pencapaian partai-partai nasionalis yang mencapai sebesar 518.058 (59,96 %). Minimnya perolehan suara partai Islam sangat mempengaruhi jumlah perolehan kursi parlemen yang hanya mampu diraih sebanyak 18 kursi saja. 32 dari 50 kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum legislatif di Kota Palembang tahun 2019 menjadi milik partai-partai nasionalis yang perolehan suara jauh lebih besar dari partai-partai Islam.²³⁵

Selama era reformasi dijumpai enam partai politik Islam yang pernah memperoleh kursi di parlemen Kota Palembang. Kondisi semacam itu merefleksikan bahwa sebagai kecil pilihan politik masyarakat Islam masih berkorelasi secara linear dengan partai yang memiliki ideologi keagamaan dan

²³⁴KPUD Kota Palembang Tahun 2019

²³⁵KPUD Kota Palembang Tahun 2019

massa Islam. Perolehan kursi keenam partai politik Islam itu meskipun masih jauh dari harapan karena selalu mengalami kekalahan dengan partai-partai nasionalis, namun di kalangan muslim tertentu pilihan politik adalah sesuatu yang mesti diperjuangkan sesuai keyakinan dan ideologi keagamaan yang menjadi anutan mayoritas konstituen di Kota Palembang. Dari keenam partai politik Islam itu terdapat tiga partai yang secara konsisten memperoleh dukungan masyarakat Islam Palembang secara berkesinambungan dan meraih kursi di parlemen selama pemilu di era reformasi, yaitu PAN, PPP dan PKS.

B. Faktor-Faktor yang Mendorong Perubahan Pilihan Politik Umat Islam Palembang

Lima kali pemilu di era reformasi menunjukkan bahwa tidak ada satupun partai politik yang memperoleh suara yang konsisten dan berkesinambungan secara linear. Partai politik yang merupakan pemenang pemilu di Kota Palembang muncul secara bergantian pada masing-masing momentum kontestasi. Kondisi ini merepresentasikan bahwa masyarakat pemilih di kota Palembang telah mengalami proses perubahan dan pergeseran yang secara sosiologis disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mendorong perubahan itu adalah kondisi sosial masyarakat Palembang yang semakin hari semakin terdidik sehingga muncul perilaku pemilih yang semakin terbuka dan rasional. Rasionalisasi yang terus berjalan seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Palembang mendorong mereka untuk menentukan pilihan politik yang dianggap menguntungkan dengan tanpa mempertimbangkan ideologi Islam dan nasionalis. Sekalipun mayoritas masyarakat pemilih di Kota Palembang adalah penganut agama Islam, namun dalam kenyataan sosialnya pemilu legislatif pertama tahun 1999 tetap dimenangkan oleh

partai nasionalis, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.²³⁶

Hasil pemilu legislatif di Kota Palembang selama era reformasi yang lebih banyak didominasi oleh partai-partai nasionalis merefleksikan bahwa masyarakat pemilih sudah mengalami perubahan dari pemilih ideologis kepada pemilih rasional. Perubahan ini didukung oleh kemajuan pendidikan yang membuka ruang bagi masyarakat Palembang lebih rasional dan lebih terbuka (*open minded*) dalam menentukan pilihan politik. Karena itu masyarakat Palembang secara sosiologis sangat sulit digiring kepada kelompok dan partai tertentu pada setiap Pemilihan Umum. Tokoh yang secara ideologis dan kultural dibesarkan oleh organisasi Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, misalnya, menjadi biasa sekiranya ia menentukan pilihan kepada tokoh yang diusung oleh partai lain. Rasionalisasi itu berlangsung sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin terdidik dan semakin kosmopolitannya Kota Palembang.²³⁷

Pola pilihan politik yang semakin berubah sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin terbuka dapat dicermati dari peroleh suara partai-partai Islam pada pemilihan legislatif di Kota Palembang. Dari lima kali pemilu pada era reformasi tidak ada satupun partai Islam yang mampu menyaingi dominasi partai-partai nasionalis di Kota Palembang. Partai Amanat Nasional (PAN) yang sempat memperoleh suara terbesar di antara perolehan suara partai-partai Islam di Kota Palembang pada pemilu tahun 1999, dan 2004 disalib oleh PKS, dan PKB pada pemilu tahun 2009, 2014

²³⁶KPUD Kota Palembang Tahun 1999

²³⁷Suyitno (Akademisi dan Pakar Politik UIN Raden Fatah Palembang), *Wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2020.

dan 2019.²³⁸ Kondisi semacam itu menggambarkan bahwa pemilih PAN yang semula merupakan pemilih ideologis dan psikologis karena besarnya massa Muhammadiyah di Kota Palembang mulai mengalami perubahan menjadi pemilih rasional. Elektabilitas dan perolehan kursi partai-partai Islam dalam Pemilu di era reformasi di kota Palembang tergambar dalam table dibawah ini (lihat tabel 5.7 dan 5.8).

Tabel 7.7

**Perolehan Kursi Partai Politik Islam di Kota Palembang
Hasil Pemilu Tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019**

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Kursi									
		1999		2004		2009		2014		2019	
		Kursi	%	Kursi	%	Kursi	%	Kursi	%	Kursi	%
1	PAN	6	15	5	11	2	4	3	6	6	12
2	PPP	4	11	4	8	3	6	2	4	1	2
3	PKB	0	0	1	2	2	4	5	10	6	12
4	PK/PKS	1	3	5	11	5	10	3	6	5	10
5	PBB	1	3	0	0	0	0	2	4	0	0
6	PBR	0	0	3	6	1	2	0	0	0	0
Total		12	32	18	38	13	26	15	30	18	36

Sumber: Diolah dari Data KPU

Tabel 7.8

**Perolehan Suara Partai Politik Islam di Kota Palembang
Hasil Pemilu Tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019**

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara							
		2004		2009		2014		2019	
		Suara	%	Suara	%	Suara	%	Suara	%
1	PAN	48.092	6,94	21.391	3,44	53.186	7,33	70.139	8,11
2	PPP	32.841	4,74	23.677	3,81	45.872	6,32	23.103	3,83
3	PKB	18.638	2,69	18.341	2,95	57.847	7,98	59.783	6,91

²³⁸KPUD Kota Palembang Tahun 2009 dan 2014

4	PK/ PKS	65.130	9,40	45.980	7,40	42.965	5,92	64.570	7,47
5	PBB					40.805	5,62	22.865	2,64
6	PBR	27.640	3,91	16.049	2,58				
Total		192.341	27,68	125.438	20,18	240.675	33,17	240.460	28,96

Sumber: Diolah dari Data KPU

Sekalipun PAN masih menjalin komunikasi dengan Muhammadiyah, namun proses rasionalisasi pemilih dari massa organisasi sosial keagamaan itu sulit untuk dihindarkan. Untuk sepuluh tahun terakhir, keterjarakan PAN dan massa Muhammadiyah semakin terasa sehingga banyak di antara mereka yang berubah pilihan pada pemilu tahun 2009 dan 2014.²³⁹ Pada pemilihan umum tahun 2009 di Kota Palembang PAN turun pada posisi ketiga perolehan kursi parlemen di antara partai-partai Islam. Posisi PAN pada pemilu tahun 1999 dan 2004 digantikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memperoleh 5 kursi perlemen di Kota Palembang pada pemilu 2009. Pemilu tahun 2014 PKB yang muncul sebagai pemenang pemilu di Kota Palembang dengan perolehan 5 kursi parlemen.²⁴⁰

Pada pemilu tahun 2019 dijumpai dinamika politik dan kecendrungan konstituen yang semakin rasional. Kembalinya PAN dalam memperoleh suara terbanyak di Kota Palembang pada pemilu tahun 2019 tidak dapat dipahami sebagai simbolnya menguatnya pemilih ideologis dan psikologis. PAN sangat diuntungkan oleh proses rasionalisasi pemilih yang terus berjalan di Kota Palembang. Mereka menetapkan pilihan

²³⁹Novrizal Nawawi (Wakil Ketua PWM Sumatera Selatan), Yuda (Wakil Sekretaris PWM Sumatera Selatan), dan M. Idris, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2020.

²⁴⁰KPUD Kota Palembang Tahun 2014

kepada PAN karena partai yang didirikan oleh tokoh reformasi itu merapat kepada koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden. Sosok Prabowo Subianto sangat menentukan terhadap massa Muhammadiyah yang hampir 60 % kembali memilih PAN pada pemilu 2019.²⁴¹

Sebagai partai moderat, PAN telah berhasil mengembangkan dirinya sebagai partai yang tidak condong kekanan atau kekiri. Melainkan PAN berusaha berdiri di tengah-tengah dengan menerima kubu partai Islam maupun partai nasionalis, bahkan PAN berusaha merangkul kelompok manapun tanpa membedakan dari kelompok mana berasal (baik kelompok kanan atau kelompok kiri). Secara garis besar ada kesamaan antara PAN dan PKS dalam memposisikan keberadaan dirinya dalam konteks sosio politik di masyarakat. Mereka cenderung lebih terbuka dan lebih tegas di dalam menerjemahkan ideologi partainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa ada yang harus ditutup-tutupi hanya sekedar demi mencari dukungan pemilih. Baik PAN dan PKS dalam beberapa pemilu era reformasi seringkali melibatkan anak-anak muda profesional yang kekinian untuk menjadi kadernya. Oleh sebab itu, PAN dan PKS dalam mengusung ideologi partainya dapat dengan mudah menerjemahkannya dalam kehidupan masyarakat masa kini.

Naiknya perolehan suara PAN pada pemilu 2019 di Kota Palembang menurut sekretaris PAN Kota Palembang Ruspanda adalah salah satunya dengan melakukan konsolidasi dengan Muhammadiyah Kota Palembang, serta melibatkan tokoh muda dan ulama Palembang seperti Umar Halim yang

²⁴¹Romli (Ketua PWM Sumatera Selatan), *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2020.

masih merupakan anak dari H. Halim.²⁴² Rupanya cara PAN yang konsisten menyatakan sebagai partai yang terbuka bagi semua kelompok terbukti mampu menaikkan suara pada pemilu 2019 sebesar 6 % dari pemilu 2014. Maka dari itu kendati PAN mengatakan dirinya sebagai partai Islam, namun dalam interaksinya di mata public PAN mudah diterima oleh semua kalangan tanpa melihat latar belakang ideologi partai.

Namun demikian, berdasarkan tabel 5.7 diatas, rata-rata pada partai politik Islam terjadi pergeseran kesetiaan pemilih dari satu partai kepartai lain (*volatility*).²⁴³ Jika dicermati terjadi penguapan suara PPP yang cukup besar dari pemilu ke pemilu berikutnya. Berkaitan dengan hal itu, kecenderungan penurunan suara PPP terus terjadi sampai pada pemilu tahun 2019 yang mencapai 9 %. Penguapan suara PPP tersebut bisa saja diakibatkan oleh berpindahnya suara PPP kepartai Islam lain, atau justru berpindah pada partai nasionalis. Selain itu, hampir semua partai Islam memperebutkan basis massa yang sama, yakni massa Islam. Terlepas hal tersebut berangkat dari ideologi yang berbeda.

Salah satu sebab dari rendahnya suara PPP adalah kontekstualisasi ideologi partai yang kurang intens dan tegas dalam menerjemahkannya dengan kebutuhan masyarakat era reformasi. Ideologi Islam yang dibangun PPP tidak mampu diterjemahkan dengan kebutuhan masyarakat Islam itu sendiri, justru PPP terperangkap oleh ideologi Islam yang diusungnya. Sehingga masyarakat menjadi bertanya-tanya, ideologi Islam

²⁴²Ruspanda, wawancara pada tanggal 9 Mei 2020

²⁴³*Volatility* seringkali didefinisikan sebagai gejala pergeseran kesetiaan pemilih dari satu partai ke partai lain, dari pemilihan ke pemilihan lain. Lihat, Scott Mainwaring, *Multipartism, Robust Federalism and Presidentialism in Brasil* (Englan: Cambridge University Press, 1997), hal. 61-62

seperti apa yang mereka tawarkan. Termasuk pengelolaan partai yang masih mengandalkan pola-pola kekerabatan semakin memperburuk keadaan PPP. Terlebih konflik internal ditubuh PPP antara kubu Djan Faaridz dengan kubu Romahurmuzy turut berimbas pada perolehan suara partai di Kota Palembang. Konflik tersebut mengakar sampai pada kepengurusan di tingkat daerah termasuk kepengurusan partai PPP di Kota Palembang. Bahkan yang semakin menjatuhkan suara PPP adalah ditetapkannya ketua umumnya sebagai tersangka jual beli jabatan di Kemenag tahun 2018 - 2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan fenomena tersebut, kader-kader NU yang secara structural tidak terakomodir di PPP ada kecenderungan bergabung dengan PKB, sementara kader lain yang tidak berafiliasi dengan NU kecenderungannya justru beralih pada PKS yang mengusung ideologi yang sama. Hal ini dapat dilihat dari naiknya perolehan suara PKB dari pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2019 sebanyak 10 % sedangkan suara PKS meskipun terjadi penurunan hanya dikisaran 1 %. Jika dibandingkan dengan PPP, PKB lebih diterima masyarakat Kota Palembang sebagai partai Islam yang berideologi Pancasila. Capaian suara PKB yang relative naik tentunya dikarenakan kontekstualisasi ideologi yang diusung PKB sebagai partai Islam dengan ideologi Pancasila lebih diterima. Faktor lainnya adalah strategi ganda PKB dalam memainkan perannya sebagai partai Islam dengan ideologi Pancasila juga partai Islam dengan basis massa utamanya Nahdlatul Ulama.

Adanya kecenderungan kenaikan suara PKB tersebut dikarenakan lebih luwesnya PKB dalam mengusung identitas Islamnya, yang sedikit lebih dilongarkan ketimbang PPP dan

PKS. Ideologi PKB yang lebih terbuka dalam menerjemahkan ideologi partai, bahkan cenderung lebih sekuler, dengan basis massanya dari kalangan Nahdliyin (NU), mampu menggaet massa diluar basis massa Islam. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah PKB mampu mempertahankan basis massanya dikalangan pesantren. Peran ganda PKB dalam menarik massa NU dan kalangan pesantren dibilang cukup berhasil dalam konteks Palembang.

Apabila dibandingkan dengan PPP, PKS yang secara tegas menyatakan ber-ideologi Islam lebih mampu menerjemahkan ideologi partai sesuai konteks kebutuhan masyarakat Palembang yang lebih moderat. PKS mampu menerjemahkan ideologi Islam yang cenderung normative pada konteks yang lebih mudah dipahami dan dibutuhkan masyarakat. PKS mampu menerjemahkan ideologi Islam-nya tersebut dengan mengemasnya dalam berbagai program kerja dan kebijakan melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti; gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan dengan melibatkan para pemudah (pelajar dan mahasiswa), mengadakan pengobatan gratis, kompetisi pelajar dan mahasiswa, khitanan massal, gerakan-gerakan dakwah kontemporer, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Program kerja dan kebijakan yang dijalankan PKS, bertujuan ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa, ideologi Islam yang direpresentasikan PKS dapat menjawab berbagai persoalan umat. Bukan ideologi yang selama ini ini dituduhkan oleh lawan-lawan politiknya bahwa gerakan PKS adalah gerakan mendukung Khilafah. Justru menurut Kiai Tol'at Wafa Ahmad gerakan politik PKS adalah gerakan untuk memperjuangkan dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*

demi terwujudnya kesejahteraan bersama.²⁴⁴ Bahkan menurut Iqbal Romzy PKS merupakan partai politik dengan ideologi Islam yang mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat kontemporer.²⁴⁵

Dengan demikian tingkat keterpilihan kandidat dalam kontestasi politik di Kota Palembang selain berdasarkan ideologi partai, tingkat elektabilitas partai dan kandidat, namun secara empiris juga dipengaruhi oleh politik uang²⁴⁶. Markoni dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian pemilih dalam menentukan pilihan politiknya bukan lagi didasarkan pada keunggulan program kerja, kebijakan, rekam jejak kandidat, maupun pada ideologi yang diusung partai dan kandidat. Namun lebih pada politik transaksional yang hanya memberikan keuntungan sesaat.²⁴⁷ Materi yang diberikan kandidat maupun tim sukses kepada para calon pemilih, seakan menjadi magnet yang kuat yang dapat mempengaruhi pilihan calon pemilih. Salah satu penyebabnya adalah ketatnya persaingan kandidat dalam memperebutkan calon pemilih serta mulai hilangnya kepercayaan calon pemilih kepada kandidat diakibatkan seringnya para calon setelah terpilih melupakan janji-janji politiknya.

²⁴⁴Zainuddin, *Jejak Politik Kiai: Membaca Citra Politik Kiai dan Pengaruhnya dalam Membangun Lembaga Pendidikan Islam* (Palembang: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2020), hal. 102

²⁴⁵M. Iqbal Romzi, *Wawancara* pada tanggal 19 Desember 2019

²⁴⁶M. Iqbal Romzi dalam pernyataannya mengatakan “pemodal menjadi salah satu factor penting seseorang untuk dipilih, bahkan pemodal mampu menggeser kader-kader partai untuk dipilih sebagai calon kandidat dalam kontestasi pilkada” *wawancara*, pada tanggal 19 Desember 2019

²⁴⁷Markoni, “Studi Pemetaan politik dan Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Palembang, *dalam jurnal Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga*, 12 (2) 2014.

Tidak dapat dihindari bahwa politik uang dalam berbagai bentuknya sudah menjadi fenomena umum yang seringkali ditemukan dalam pemilu, dan turut mempengaruhi pola perilaku pemilih. Terlebih kompetisi dengan system suara terbanyak justru menjadi penyebab persaingan antar kandidat semakin ketat (baik caleg dari partai yang sama maupun dari partai lain), bukan lagi persaingan antar parpol, melainkan menjadi persaingan antarpersonal dalam satu parpol yang sama. Persaingan antar kandidat ini, diakui atau tidak menyebabkan masyarakat mencari atau bahkan mendapat keuntungan terutama pada masa kampanye. Bagi mereka, kandidat atau partai yang memberikan manfaat paling banyak bagi dirinya atau lingkungan sekitarnya adalah kandidat dan partai yang layak untuk dipilih. Berdasarkan pengamatan di lapangan ada kecenderungan masyarakat untuk menunggununggu imbalan apa yang akan diberikan kandidat atau tim sukses parpol untuk menebus suara mereka dalam pemilu. Bahkan mereka seakan-akan tidak khawatir manakala jika manfaat yang didapat dari kandidat atau tim sukses parpol hanya bersifat sementara.

Trend perubahan perolehan suara partai politik di tingkat nasional ternyata tidak selalu berkorelasi secara linier dengan perolehan suara pada pemilu legislatif di Kota Palembang. Kemenangan PDIP pada tingkat nasional, tidak terjadi pada pemilihan legislatif di Kota Palembang pada tahun 2019. Sementara Partai Demokrat yang hanya menempati posisi ketujuh ternyata memiliki perolehan suara terbesar di Kota Palembang dan memperoleh sembilan kursi parlemen pada pemilu tahun 2019. Pola semacam ini merefleksikan bahwa masyarakat pemilih di Kota Palembang adalah pemilih yang terbuka (*open minded*) dan rasional yang kecenderungan

mereka tidak selamanya dipengaruhi oleh kondisi perkembangan politik di tingkat nasional.

Perubahan pilihan politik umat Islam di Kota Palembang yang didukung oleh proses rasionalisasi yang terus berjalan selama era reformasi membuat Islam politik kehilangan pesona. Ini adalah buah dari rasionalisasi pemilih terhadap partai-partai Islam yang semakin memperlihatkan keterjarakan antara realitas dan sesuatu yang sesungguhnya diperjuangkan. Realitas menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang seharusnya dipegang oleh partai Islam menjadi terkesempingkan oleh beberapa kepentingan politik praktis. Ketika persoalan semacam itu dihadapkan kepada para konstituen dan massa pemilih, mereka akan merasionalisasi ulang persepsi mereka tentang keterhubungan Islam dan partai politik. Di mata masyarakat yang semakin terbuka dan rasional tidak dijumpai perbedaan yang signifikan antara partai Islam dan nasionalis. Kehadiran seorang tokoh yang menjadi panutan, baik nasional maupun lokal, sangat menentukan perjalanan partai-partai Islam di masa depan.

Faktor kedua yang mendorong perubahan pilihan umat Islam di kota Palembang adalah ketokohan partai yang dianggap mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Dalam masyarakat yang semakin rasional sebagaimana dikatakan oleh George Ritzer dan Gouglas J. Goodman, orientasi tokoh dan sumber daya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pilihan.²⁴⁸ Orientasi tokoh mengacu pada sikap individu terhadap kepribadian kandidat itu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan identitas partai politik. Sedangkan sumber daya mengacu pada

²⁴⁸George Ritzer dan Gouglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 394

kemampuan dalam memecahkan masalah terkait tindakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.²⁴⁹

Pandangan George Ritzer dan Gouglas J Goodman mengkrystal dalam diri masyarakat kota Palembang, terutama sebelum pemilu tahun 1999. Karena itu kemenangan PDIP pada pemilu 1999 terkait dengan ketokohan Megawati Soekarnoputri yang muncul semenjak pertengahan 1980-an sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru.²⁵⁰ Secara nasional kemunculan Megawati Soekarnoputri pada pemilu tahun 1987 ternyata mampu mendongkrak perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan memperoleh 40 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Prestasi ini melahirkan kecemburuan dan kekuatiran tokoh-tokoh pendukung Orde Baru sehingga beberapa tekanan mulai diberikan kepada Megawati Soekarnoputri. Puncaknya adalah peristiwa berdarah dalam untuk merebut paksa Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI di Jalan Diponegoro Jakarta.²⁵¹

²⁴⁹David Marsh dan Gerry Stoker. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 82

²⁵⁰Megawati Soekarno Putri memiliki nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri yang lahir pada tanggal 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Ia adalah anak dari presiden pertama, Soekarno dan Fatmawati. Sumarno, *Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara* (Depok: PT. Rumpun Dian Nugraha, 2002), hal. 1-2

²⁵¹Imran Hasibuan, *Megawati Soekarnoputri: Pantang Surut Langkah* (Jakarta: ISAI, 1996), hal. 12-14. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap sebagai partai politik yang memiliki keterikatan dan keterkaitan yang kuat dengan ideologi marhaenisme yang dikembangkan oleh Soekarno. Secara kepartaian politik, memang ada tiga trah Soekarno di dalam partai politik, yaitu Sukmawati Soekarnoputri yang pernah menjadi ketua umum PNI-Marhaenisme, Rachmawati Soekarnoputri yang pernah bergabung di Partai Pelopor, Partai Nasdem dan terakhir sebagai wakil ketua umum di Partai Gerindra serta Megawati Soekarnoputri yang menjadi ikon PDI dan PDIP. Galang Gerald, "Ideologi dan Partai

Tekanan Orde Baru terhadap Megawati Soekarnoputri justru mendapat simpati masyarakat Indonesia dan semakin menguat pasca jatuhnya presiden Soeharto pada tahun 1998. Lahirnya PDIP pada tanggal 1 Februari 1999 membuka peluang Megawati Soekarnoputri sebagai simbol perlawanan yang memperoleh dukungan luas dari masyarakat Indonesia dan berhasil menjadi pemenang pertama dalam pemilu tahun 1999. Kuatnya dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri sangat terasa di berbagai kota besar di Indonesia dan salah satunya adalah Kota Palembang yang berhasil untuk memperoleh dukungan terbesar di parlemen.²⁵² Karena itu pola dan perubahan pilihan masyarakat Kota Palembang dalam pemilihan legislatif berjalan lurus dengan perolehan suara PDIP pada tingkat nasional.

Pemenang kedua pemilu legislatif di Kota Palembang adalah Partai Golkar, yaitu partai yang memiliki akar sejarah yang kuat dengan Orde Baru. Prestasi Golkar di Kota Palembang kelihatannya mengikuti pola perkembangan dan kemajuan partai secara nasional. Partai Golkar yang secara nasional menduduki posisi kedua berjalan linear dengan perolehan suara partai tersebut di parlemen Kota Palembang. Kehadiran Akbar Tanjung sebagai pimpinan Partai Golkar ketika itu yang didukung oleh tokoh-tokoh nasional lainnya juga mempengaruhi perolehan suara parlemen di Kota Palembang. Pola yang agak berbeda ditemukan pada Partai Amanat Nasional (PAN) yang hanya menduduki posisi kelima

Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS”, dalam *Jurnal Politicon: Jurnal Ilmu Politik* Vol.1 No.2, hal. 139-140

²⁵² Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Tahun 1999

di tingkat nasional, namun berhasil untuk memperoleh peringkat ketiga di Kota Palembang. Di samping dipengaruhi oleh keberadaan tokoh Amin Rais sebagai ketua umum partai juga dipengaruhi oleh massa Islam yang secara ideologi berafiliasi dengan Muhammadiyah.²⁵³

Isu negatif seperti penangkapan ketua umum sebuah partai politik yang berimbas langsung pada jebloknya perolehan suara partai tersebut di kota Palembang membuktikan bahwa isu-isu politik dan tokoh politik nasional berpengaruh perpolitikan lokal di Palembang. Konektifitas Sumatera Selatan secara umum dan juga Palembang dalam politik nasional telah dimulai sejak awal berdirinya republik Indonesia. Selain pernah menjadi saksi kemenangan Masyumi dalam Pemilu 1955, juga menjadi sejarah peristiwa PRRI di Sumatera. Tokoh PRRI seperti Maluddin Simbolon memulai gerakannya dari Sumsel, yang diikuti juga oleh beberapa ulama Sumsel.

Sebagai kota yang meliki sejarah yang cukup tua, Palembang sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Selatan, Palembang juga telah melahirkan sederet tokoh yang mengukir kiprah dalam pentas nasional. Di era awal kemerdekaan dan Orde Lama ada, pengusaha Hasyim Ning, Mayjen (Purn) Ryacudu ayah Jendral (Purn) Ryamizard Ryacudu Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Era Megawati dan Menteri Pertahan di kabinet Jokowi Jk. Pada Era Orba ada Jend (Purn) Makmun Murod Kasad Era awal Orba, Emil Salim (menteri), Alamsyah

²⁵³ Amin Rais sebagai ketua pertama PAN merupakan personifikasi tokoh nasional yang memiliki jasa besar dalam menumbang kekuasaan presiden Soeharto. Sayangnya prestasi tokoh reformasinya ini tidak sempat mengantarkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Aisah Putri Budiarti dkk, *Personalisasi Partai Politik di Indoensia Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 130-132

Ratu Prawira Negara (menteri), Sarnubi Said Tokoh Militer dan mantan Ketum PSSI. Diera reformasi ada Hatta Rajasa, Taufi Kiemas, Marzuki Alie, Said Aqil Husein Al Munawwar, Tito Karnavian, Budi Karya sumadi, Firli Bahuri, Antasari Azhar dan sederet nama lain.

Lahirnya tokoh-tokoh tersebut juga menunjukkan posisi sumsel dan Palembang dalam politik nasional. Bahkan dimasa Orba Sumsel dan juga Palembang menjadi tempat penugasan tokoh militer sebelum diorbitkan pada tingkat Nasional. Tri Sutrisno mantan Pangdam Sriwijaya yang kemudian menjadi Pangdam Jaya, Panglima TNI dan Wapres. SBY Pangdam II/Sriwijaya yang kemudian menjadi Kasospol dan Kaster TNI (ABRI), kemudian menjadi menteri dan Presiden RI pertama yang dipilih secara langsung, yang menjabat selama dua periode.

Tokoh-tokoh politik nasional asal sumsel membawa pengaruh dalam perkembangan perpolitikan di kota Palembang. Popularitas dan akses yang dimiliki sang tokoh bisa menjadi akses bagi kolega atau kerabatnya untuk meraih jabatan politik tertentu. Ketokohan Hatta Rajasa sebagai tokoh PAN, mampu menghantarkan dua saudaranya ke kursi DPR RI melalui dapil 1 dan 2 Sumsel. Taufik Kiemas juga mampu menghantarkan saudaranya ke kursi DPR RI. Popularitas Prabowo sebagai Capres juga dengan mudah menghantarkan kader-kadernya menuju Kursi DPR RI.

Pada pemilu tahun 2004 dan 2009 terjadi perubahan pilihan politik umat Islam Palembang. Partai politik yang lolos tiga besar ternyata tidak satupun dari partai Islam dan didominasi oleh partai nasionalis, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDIP. Partai Demokrat yang memiliki ideologi nasionalis yang muncul pada tanggal 9 September 2001

ternyata mampu memikat hati masyarakat Palembang dan memenangkan dua kali pemilu di era reformasi, yaitu tahun 2004 dan 2009. Kemenangan Partai Demokrat pada pemilu 2004 memiliki pola dan trend yang tidak berjalan linear dengan perkembangan dan perolehan suara partai politik secara nasional. Posisi pertama perolehan suara Partai Demokrat di Kota Palembang merupakan prestasi penting di tengah perolehan suara partai tersebut di tingkat nasional yang hanya berada pada posisi kelima pada tahun 2004.²⁵⁴

Penyebab kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2004 yang baru pertama kali diikutinya Kota Palembang diperkuat dengan kehadiran sosok Soesilo Bambang Yoedoyono (SBY) sebagai ketua umum partai. Lebih jauh popularitas di kota Palembang SBY dimulai saat menjadi Pangdam II/Sriwijaya antara tahun 1996 – 1997. Pernah menjadi Khotib Sholat Id di Masjid Agung Palembang saat masih menjadi Pangdam, kedekatannya dengan ulama kharismatik Palembang KH. M. Zen Syukri (alm) juga menjadi berkah tersendiri bagi SBY saat menjadi Capres dalam Pilpres dalam Pilprese 2004. Pada putaran pertama Pilpres 2004 SBY - JK mampu mengungguli Mega - Hasyim di Sumatera Selatan, padahal suami Megawati, Taufik Kiemal putra asli sumsel.

Suasana semacam ini muncul sejalan dengan melemahnya pandangan dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap ketokohan Megawati Soekarnoputri dan

²⁵⁴Diolah dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan KUPD Kota Palembang Tahun 2004. Partai Demokrat dipelopori oleh Soesilo Bambang Yoedoyono pada tahun 2001 dengan sifat terbuka untuk semua warga Negara Republik Indonesia, tanpa membedakan suku bangsa, ras, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lihat sifat partai ini dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat pasal 6 tentang sifat partai.

beberapa blunder politik yang dibuatnya²⁵⁵. Ketokohan SBY semakin kuat pada pemilu tahun 2009 yang relatif mempengaruhi perolehan suara Partai Demokrat sehingga keluar sebagai pemenang pertama pemilihan legislatif di Kota Palembang. Pengaruh ketokohan SBY terefleksi pula di tingkat nasional dengan keluarnya Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu tahun 2009 dengan perolehan suara sebesar 20,85 % atau 150 kursi parlemen.

Pola dan perubahan kecendrungan pemilih juga ditemukan pada pemilu tahun 2014 dan 2019. Berakhirnya jabatan kedua SBY sebagai Presiden Republik Indonesia dan beberapa kasus korupsi yang menimpa kader-kader Partai Demokrat membuat partai tersebut mengalami penurunan perolehan suara secara nasional sehingga berada posisi ketujuh pada pemilu 2014. Sementara PDIP yang mengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla mampu mengembalikan momentum dan membalikan kepercayaan masyarakat Indonesia sehingga partai tersebut keluar sebagai pemenang pertama. Nama besar Joko Widodo kembali memiliki pengaruh besar bagi perolehan suara PDIP pada pemilu tahun 2019. Partai yang didirikan oleh Megawati Soekarnoputri tersebut kembali menjadi pemenang pada pemilihan umum tahun 2019.²⁵⁶

Oleh sebab itu, sistem suara terbanyak yang diterapkan saat ini membawa pengaruh yang besar terhadap keterpilihan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kemenangan partai nasionalis di Kota Palembang seperti PDIP sangat dipengaruhi

²⁵⁵ Denny JA, *Jalan Panjang Reformasi*, Yogyakarta, LKiS, 2006, hal.80

²⁵⁶ Diolah dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan KUPD Kota Palembang Tahun 2014 DAN 2019

oleh ketokohan atau figuritas tokoh besar seperti Megawati dan Taufiq Kiemas yang notabene sebagai orang Palembang. Bahkan trah Tufik Kiemas sampai saat ini masih menempati posisi puncak pada kepengurusan partai di PDIP. Hal serupa juga terjadi pada Partai Demokrat, dimana ketokohan SBY masih memberikan dampak yang besar terhadap perolehan suara di Kota Palembang. Sementara itu, jatuhnya suara PPP juga dipengaruhi oleh buruknya citra PPP dengan ditetapkannya Romi sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Faktor lain yang tak bisa dipisahkan dalam melihat perubahan pilihan politik umat Islam Palembang adalah faktor demografis. Dalam konteks kota Palembang latar belakang demografis masih cukup mempengaruhi kontestasi pemilihan umum selama era reformasi, karena masyarakat yang tinggal di kota ini terdiri atas beragam suku bangsa, marga dan agama yang masih menjadi acuan para pemilih. Masyarakat masih banyak yang memilih kandidat tertentu berdasarkan suku dan agama yang dominan. Begitu juga sistem kekerabatan atau kekeluargaan masih menjadi pertimbangan yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Apalagi Masyarakat Palembang sangat heterogen karena adanya pendatang dari Jawa, Sulawesi dan etnis Melayu. Meskipun persoalan etnisitas dan agama sudah semakin cair sejalan dengan perkembangan rasionalisasi pemilih, namun tetap masih berpengaruh terhadap pilihan masyarakat.

Secara sosiologis dapat dilihat bahwa ada kecenderungan politik aliran yang berbenturan dengan beragam cara penjangkaran suara yang dilakukan caleg. Apabila media kampanye, cara-cara mobilisasi massa, terlebih kuatnya politik uang yang dilakukan caleg tersebut bukan merupakan bentuk politik berdasarkan ideologis atau aliran secara politis yang

dianut caleg. Pengaruh aliran menjadi bias apabila dibandingkan dengan perangkat mobilisasi dukungan lainnya yang bersifat lebih ekonomis dan pragmatis. Warga Nahdhatul Ulama, misalnya, bisa saja loyal terhadap organisasinya, namun ketika dihadapkan pada pilihan caleg dimungkinkan mereka bisa saja memilih seseorang yang bukan berasal dari warga NU apabila secara ekonomis lebih menjanjikan.

Factor lain yang tidak kalah pentingnya adalah Netralitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu, turut membawa pengaruh besar terhadap kontestasi pemilu era reformasi. Pemilu tahun 1955 dan pemilu 1999 dianggap pemilu yang paling baik menampilkan realitas yang unik. Dimana pada kedua pemilu tersebut partai-partai terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dengan masuk dalam struktur KPU. Dengan masuknya partai dalam penyelenggara pemilu maka mereka akan dapat saling menjaga kepentingannya. Dalam pemilu di era reformasi, setelah pemilu 1999 partai-partai tidak lagi terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Komisioner KPU diisi kalangan profesional dan netral. Tapi dalam realitanya perebutan pengaruh dibalik layar justru liar dan tidak menguntungkan bagi partai yang tidak memiliki pengaruh tokoh. Bahkan persaingan pengaruh itu sudah dimulai dari pemilihan dan komposisi tim seleksi.

C. Dampak Perubahan Pilihan Politik Umat Islam Palembang

Munculnya beragam partai Islam selama era reformasi mengingatkan masyarakat Sumatera Selatan pada pemilu tahun 1955 di mana partai Masyumi menjadi kekuatan politik terbesar saat itu. Sayangnya hasil pemilu selama reformasi menjelaskan bahwa partai Islam tidak berdaya ketika berhadapan dengan partai nasionalis dan mulai berguguran satu

persatu dalam kontestasi pemilihan umum. Kondisi ini merupakan salah satu dampak negatif yang diterima partai-partai Islam akibat perubahan pilihan politik masyarakat kota Palembang selama era reformasi. Data-data pemilu selama era reformasi menjelaskan bahwa partai-partai Islam semakin kehilangan pesona dan mulai ditinggalkan oleh para pemilih muslim di kota Palembang.

Sejalan dengan rasionalisasi pemilih yang terus berjalan, muncul sikap persepsi baru yang berujung pada sikap kurang percaya di kalangan pemilih muslim di kota Palembang terhadap partai-partai Islam. Sikap itu muncul dengan berbagai alasan ketika mereka melihat fenomena partai-partai Islam selama kontestasi pemilihan umum pada era reformasi. Salah satunya adalah ketidak-linearitas antara sikap moral Islam dan perilaku politik sebagai *impuls* dari agama yang terlalu ditarik ke arena politis. Manakala Islam masuk ke wilayah politik praktis di mana sisi oportunitas dan pragmatisme lebih diperlihatkan oleh partai-partai Islam ketimbang sisi moral Islam itu sendiri. Pandangan ini menemukan kebenarannya dan Islam yang dipresentasikan oleh partai Islam adalah sisi pragmatisme dan kekuasaan sehingga ideologi dan nilai-nilai yang sejatinya melandasi sikap dan perilaku partai cenderung diabaikan.²⁵⁷

Munculnya keterjarakan antara citra dan tindakan yang dialami partai Islam yang sebagai akibat dari ketidak-mampuan dalam menunjukkan bentuk dan perilaku ideal sesuai dengan semangat Islam. Kondisi semacam ini sebenarnya menyediakan ruang bagi lahirnya proses menalar ulang antara

²⁵⁷Nurus Shalihin, *Rasionalisasi Agama Dalam Arena Politik: Dari Politik Identitas ke Politik Rasional* (Padang: IAIN IB Press, 2013), hal. 87-88

agama dan partai Islam. Keterpisahan antara citra dan tindakan partai Islam secara bersamaan mentransformasikan pula persepsi masyarakat pemilih tentang keberadaan partai Islam.²⁵⁸ Peristiwa ini merupakan bagian dari buah rasionalisasi masyarakat pemilih terhadap partai Islam di kota Palembang pada masa reformasi. Ketidak-mampuan partai Islam menjadikan agama sebagai representasi dari tindakan politik adalah munculnya *stereotype* bahwa simbol-simbol Islam yang digunakan hanyalah *magnitude* atau penarik kepercayaan dan bukan didasarkan pada keinginan untuk membela nilai-nilai lewat politik.

Perpecahan yang sering terjadi di kalangan partai Islam semakin memperkuat *stereotype* itu dan masyarakat pemilih muslim di kota Palembang mulai pula meninggalkannya. Pada era reformasi bisa disaksikan kegagalan sebagian partai Islam dalam menghindarkan diri dari konflik dan perpecahan internal. Fenomena Partai Bulan Bintang Reformasi, salah satu partai Islam yang pernah duduk di DPR, adalah produk konflik internal PPP. Konflik internal yang sama berlangsung di tubuh partai-partai Islam lainnya yang kemudian melahirkan partai baru yang menggerus suara partai induk. Konflik antara Abdurahman Wahid dan Muhaimin Iskandar dalam kasus PKB tidak hanya membuat pemilih tradisional PKB berpindah kepada partai lainnya, tetapi juga berpengaruh terhadap konsolidasi internal partai itu sendiri. Perpecahan serupa pernah muncul pula di tubuh PAN yang kemudian melahirkan Partai Matahari Bangsa (PMB) meskipun gagal memperoleh suara signifikan dalam pemilu 2009.²⁵⁹

²⁵⁸Nurus Shalihin, *Rasionalisasi...*, hal. 88-89

²⁵⁹Mochammad Nurhasim (ed), *Masa Depan...*, hal. 274

Konflik dan perpecahan internal sebagian partai Islam yang terjadi pada tingkat nasional secara langsung mempengaruhi masyarakat pemilih di tingkat lokal sehingga mereka melakukan reorientasi pilihan politik baru. Sekiranya kondisi ini terus berkesinambungan tidak tertutup kemungkinan bahwa partai-partai Islam bukan hanya kehilangan pesona, tetapi terkubur bersama rasionalisasi yang terus berjalan di tengah masyarakat pemilih. Lima kali pemilihan umum selama reformasi ternyata mayoritas masyarakat pemilih di kota Palembang tidak lagi menghiraukan antara partai Islam dan partai nasionalis. Harapan politik mereka sering digantungkan kepada orientasi tokoh dan kemampuan sumber daya yang bersangkutan dalam mengatasi kesulitan dalam kehidupan masyarakat.

Hasil pemilu selama reformasi di kota Palembang menjelaskan pula bahwa partai politik Islam kelihatannya melupakan bahwa kepercayaan (*trusts*) merupakan bahan bakar partai politik yang penting fungsinya dalam keberlangsungan suatu partai politik. Bahkan lebih jauh kepercayaan (*trusts*) adalah kesadaran positif yang mampu membentuk dan menggerakkan bangunan sosial. Dalam konteks politik, kepercayaan adalah landasan pijak atau dasar legitimasi yang mengukuhkan eksistensi partai politik.²⁶⁰ Karena lunturnya kepercayaan (*trusts*), masyarakat Islam Palembang melakukan evaluasi pilihan politik mereka lewat pengamatan yang terus-menerus terhadap kredibilitas, kapabilitas dan kinerja partai-partai Islam. Mereka tidak hanya menilai, melainkan juga merasakan seberapa nyaman dan yakin dengan *image* ditawarkan oleh partai-partai Islam. Untuk kasus pemilihan

²⁶⁰Nurus Shalihin, *Rasionalisasi....*, hal. 95

umum di kota Palembang selama era reformasi terjawab sudah karena partai-partai Islam ternyata tidak mampu bersaing dengan partai-partai nasionalis.

Kemerosotan dan kemunduran partai-partai Islam sebenarnya juga berkorelasi dengan transformasi sosial dan ekonomi yang dialami oleh umat Islam dalam rentang sejarah yang panjang, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi selama masa itu muncul pula generasi kelas menengah baru di kalangan umat Islam yang tidak lagi berorientasi pada Islam politik atau formalisasi Islam dalam kehidupan politik. Cara pandang baru dan reorientasi pemikiran itu tumbuh dengan pesat, terutama di kalangan kaum terdidik muslim. Walaupun mereka tetap memandang Islam sebagai ajaran agama yang bersifat total yang mencakup politik dan agama, namun mereka melihat bahwa totalitas ajaran Islam itu tidak mesti diwujudkan melalui jalur formal negara Islam atau politik Islam. Reorientasi dan cara pandang yang banyak disebar-luaskan sejak tahun 1970-an itu senada dengan kemauan pemerintahan Orde Baru yang semakin *intens* mengakomodasi aspirasi umat Islam dalam konteks Islam kultural. Sikap akomodatif pemerintahan Orde Baru dengan umat Islam semakin menguat pada tahun 1980-an dengan jalan membangun masjid-mesjid melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Sementara dalam bidang pendidikan, pemerintah Soeharto membangun sekolah-sekolah agama hingga Perguruan Tinggi Islam.²⁶¹

Cara pandang baru dan reorientasi pemikiran umat Islam yang terbentuk selama Orde Baru turut berkontribusi terhadap stagnasi dan kemerosotan perolehan suara partai-

²⁶¹Mochammad Nurhasim (ed), *Masa Depan...*, hal. 286-287

partai Islam dari pemilu ke pemilu pada masa reformasi. Manakala partai-partai Islam menjelang dan pasca pemilu tahun 1999 tidak menawarkan sesuatu yang baru bagi umat Islam dan bangsa Indonesia, maka partai-partai Islam kehilangan momentum untuk memimpin dan mengendalikan perubahan. Memasuki pemilu-pemilu berikutnya pada era reformasi, partai-partai Islam terperangkap pada rutinitas perebutan kursi parlemen di antara para pengurus, anggota dan simpatisan partai. Hampir tidak ada evaluasi secara mendasar mengapa fenomena stagnasi dan kemerosotan elektoral selalu dialami oleh partai-partai Islam selama masa reformasi.²⁶²

Perubahan pilihan politik umat Islam di kota Palembang, di samping memiliki pengaruh yang kuat terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat pemilih kepada partai-partai Islam, memiliki pengaruh pula terhadap perolehan suara partai-partai nasionalis. Situasi itu tidak dapat dipandang sebagai bencana, melainkan sebuah konsekuensi logis dari transformasi sosial dan ekonomi yang dialami oleh umat Islam pada masa pemerintahan Orde Baru. Rezim ini relatif berhasil untuk merubah cara pandang dan orientasi politik umat Islam yang secara perlahan berubah dari wajah Islam politik ke Islam kultural.

Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah realitas politik transaksional (sebagaimana diungkap dalam penelitian Markoni) berdampak rendahnya daya saing partai Islam dan para calon legislatifnya. Pengurus dan para caleg partai Islam rata-rata bukan berasal dari kalangan pengusaha atau keluarga pejabat. Mereka rata-rata berlatar belakang aktifis mahasiswa Islam, dan aktifis masjid. Modal yang

²⁶²Mochammad Nurhasim (ed), *Masa Depan...*, hal. 287

mereka memiliki hanya jaringan social keummatan, sehinggapartai dan para caleg partai Islam akan sulit untuk melebarkan segmen basis massa pemilih dan tidak mempunyai modal melakukan politik transaksional

Iqbal Romzi mengemukakan “dua kunci dalam kamus politik di Sumatera Selatan dan khususnya Palembang yaitu tokoh dan toke (*man and money*)”.²⁶³ Tokoh dengan modal besar ketika masuk sebagai caleg dalam sebuah partai akan menimbulkan kegelisahan bagi segenap aktifis dan pengurus partai yang sudah lama memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran untuk partai. Mereka telah bergerak dari bawah untuk membesarkan partai, ketika tinggal memetik hasil diambil oleh pemodal. Kegelisahan ini bukan hanya dialami oleh partai-partai Islam, tetapi juga oleh partai-partai nasionalis. Fenomena ini tentu berdampak pada menurunnya efektifitas kinerja partai, tetapi disisi tertentu akan dapat menjamin perolehan kursi bagi partai dengan masuknya modal yang dibawa caleg tersebut.

Dampak dari politik uang/transaksional langsung dengan pemilih yang menjadikan ketua RT yang diikat dalam paguyuban dan tokoh tertentu di masyarakat sebagai operator, menjadikan partai Islam dan caleg partai Islam semakin kehilangan daya saing. Ada seorang tokoh yang mencalonkan diri sebagai caleg dari partai apapun dia akan lolos ke DPRD. Dia pernah maju dari sebuah partai Islam dan menang dengan menyisihkan caleg internal, kader tulen dan pengurus partai itu, dan hanya menjadikan caleg internal partai itu sebagai *runner up* dalam perolehan suara. Di penghujung masa jabatannya dia mengundurkan diri dari partai Islam tersebut karena merasa tidak nyaman dan bisamelakukan penetrasi kedalam

²⁶³ M. Iqbal Romzi, *Wawancara* pada tanggal 19 Desember 2019

kepengurusan partai tersebut. Kemudian dia menjadi caleg kembali dari partai lain (partai nasionalis) dan lolos kembali ke DPRD.

Wawancara dengan Kaharuddin Aziz dan Ibnu Hajar Dewantara juga menggambarkan pentingnya tokoh dalam pemilu. Pada pemilu 1955 dan juga semasa Orde Baru partai-partai Islam relative memiliki tokoh yang bisa menjadi daya tarik bagi kalangan pemilih muslim. Pada masa sekarang tokoh semakin tidak kelihatan dan yang semakin kehilangan magnetnya pesonanya.

Sebagai kota yang meliki sejarah yang cukup tua, Palembang sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Selatan, Palembang juga telah melahirkan sederet tokoh yang mengukir kiprah dalam pentas nasional. Di era awal kemerdekaan dan Orde Lama ada pengusaha Hasyim Ning, Mayjen (Purn) Ryacudu ayah Jendral (Purn) Ryamizard Ryacudu Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Era Megawati dan Menteri Pertahan di kabinet Jokowi Jk. Pada Era Orba ada Jend (Purn) Makmun Murod Kasad Era awal Orba, Emil Salim (menteri), Alamsyah Ratu Prawira Negara (menteri), Sarnubi Said Tokoh Militer dan mantan Ketum PSSI. Diera reformasi ada Hatta Rajasa, Taufi Kiemas, Marzuki Alie, Said Aqil Husein Al Munawwar, Tito Karnavian, Budi Karya Sumadi, Firli Bahuri, Antasari Azhar dan sederet nama lain.

Lebih jauh popularitas ketokohan SBY saat menjadi Pangdam II/Sriwijaya antara tahun 1996 - 1997, pernah menjadi Khotib Sholat Id di Masjid Agung Palembang saat menjadi Pangdam, kedekatannya dengan ulama kharismatik Palembang KH. M. Zen Syukri (alm) menjadi berkah tersendiri bagi SBY saat menjadi Capres dalam Pilpres dalam Pilpres 2004. Pada putaran pertama Pilpres 2004 SBY

- JK mampu mengungguli Mega - Hasyim di Sumatera Selatan, padahal suami Megawati, Taufik Kiemas putra asli Sumsel. Meski disisi lain ada isu-isu negatif tentang kebijakan presiden Megawati, blunder yang dibuatnya dan suaminya.

Faktor popularitas SBY di Palembang ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan partai Demokrat, partai baru dan baru pertama kali ikut Pemilu menjadi pemenang Pemilu di kota Palembang Tahun 2004. Bahkan menghantarkan kadernya menjadi salah satu wakil ketua di DPRD Propinsi Sumatera Selatan, tentunya hal ini sebagai sesuatu yang sangat fenomenal. Munculnya tokoh-tokoh tersebut juga menunjukkan posisi Sumsel dan Palembang dalam politik nasional. Bahkan dimasa Orde Baru, Sumsel dan juga Palembang menjadi tempat penugasan tokoh militer sebelum diorbitkan pada tingkat Nasional. Tri Sutrisno mantan Pangdam Sriwijaya yang kemudian menjadi Pangdam Jaya, Panglima TNI dan Wapres. SBY Pangdam II/Sriwijaya yang kemudian menjadi Kasospol dan Kaster TNI (ABRI), kemudian menjadi menteri dan Presiden RI pertama yang dipilih secara langsung, yang menjabat selama dua periode.

Tokoh-tokoh politik nasional asal sumsel membawa pengaruh besar dalam perkembangan perpolitikan di kota Palembang. Popularitas dan akses yang dimiliki sang tokoh bisa menjadi akses bagi kolega atau kerabatnya untuk meraih jabatan politik tertentu. Hatta Rajasa sebagai tokoh PAN mampu menghantarkan dua saudaranya ke kursi DPR RI melalui dapil 1 dan 2 Sumsel. Taufik Kiemas juga mampu menghantarkan saudaranya ke kursi DPR RI. Popularitas

Prabowo sebagai Capres juga dengan mudah menghantarkan kader-kadernya menuju Kursi DPR RI.

Kemenangan Capres Prabowo – Sandi dalam Pilpres 2019 di Kota Palembang berkorelasi positif pada penambahan perolehan suara dan kursi partai Gerindra di DPRD kota Palembang. Dalam keikutsertaannya pada dua Pemilu sebelum, yaitu Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Pada Pemilu 2009 Gerindra memperoleh 33.374 suara (5,37%) dengan 5 kursi di DPRD (10%) dan berada diperingkat ke-6 perolehan suara dan kursi. Pada Pemilu 2014 Gerindra memperoleh 82.187 suara (11,34%) berada diperingkat ke-2 perolehan suara. Mendapatkan 5 kursi di DPRD (10%) dan berada diperingkat ke-3 perolehan kursi. Pada Pemilu 2019 Gerindra mengalami kenaikan lagi dengan memperoleh 117.333 suara (13,58%) dengan 8 kursi di DPRD (16%) dan berada diperingkat ke-2 perolehan suara dan kursi di DPRD Kota Palembang.

Kekuasaan tokoh kunci partai sebagai Bupati, Walikota disuatu daerah berdasarkan data yang ada berkorelasi positif dengan perolehan kursi partai di DPRD. Walikota Palembang yang berasal dari Partai Demokrat dan pemenang Pileg di DPRD kota Palembang adalah Partai Demokrat. Hal ini dalam banyak hal terkait dengan pengaruh ketokohan dan kekuasaan yang dimiliki oleh partai tersebut.

Juga fakta lain yaitu adanya gejala politik kekeraban dalam Pemilu legislatif di kota Palembang. Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu DPRD kota Palembang dengan sembilan kursi, hampir setengahnya adalah kerabat Walikota yang sekaligus ketua Partai Demokrat Kota Palembang. Tokoh senior partai di kota Palembang juga membuat regenerasi dari kalangan keluarga di DPRD Kota Palembang. Tokoh birokrat

karir juga memasukkan kerabatnya ke dalam DPRD Kota Palembang.²⁶⁴

Berdasarkan pembahasan pada Bab-bab terdahulu maka secara umum dapat dijelaskan bahwa *Pertama*; dinamika pemilihan umum sebelum reformasi terjadi perpecahan dikalangan kelompok Islam yang menjadikan kekuatan politik Islam terpecah-pecah, dan lemah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya espektasi yang berlebihan, pandangan yang berbeda terkait ideology kelompok, terjadi perubahan orientasi pandangan politik, perpecahan dikalangan partai Islam, dan gagalnya modernisasi partai-partai Islam. *Kedua* reformasi dan kontestasi pemilihan umum terhadap pilihan politik umat Islam tidak serta merta menjadikan partai Islam mendapatkan dukungan dari mayoritas Islam. Justru partai Islam gagal (kehilangan pesona) mendapatkan suara signifikan pada pemilu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; 1) karakteristik yang melekat pada diri pemilih, 2) media masa yang turut mempengaruhi opini publik. 3). Ketokohan elit partai. *Ketiga*; perubahan pilihan politik umat Islam pasca reformasi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; *faktor sosiologis* latar belakang demografis masih cukup mempengaruhi dalam kontestasi politik, masyarakat Palembang yang terdiri atas beragam suku bangsa, etnis, marga, bahkan agama yang masih menjadi acuan para pemilih. Masyarakat memilih kandidat berdasarkan etnisitas dan agama tertentu, terlepas ia berasal dari partai Islam ataupun partai nasionalis. Selain itu, faktor kekerabatan atau kekeluargaan masih menjadi faktor intens yang mempengaruhi pilihan Palembang. Masyarakat Palembang yang sangat heterogen

²⁶⁴ Hasil wawancara dengan beberapa anggota DPRD kota Palembang.

karena adanya pendatang dari Jawa, Sulawesi, dan didominasi etnis Melayu, maka persoalan etnisitas dan agama lebih cair namun tetap berpengaruh terhadap pilihan masyarakat.

Faktor psikologis, pada masyarakat Palembang, yang notabene masyarakat kota, maka sumber informasi instan yang digunakan adalah media sosial, televisi, radio, dan surat kabar. Namun, fakta bahwa para kandidat telah banyak dipublikasikan tidak menjamin jumlah suara yang diperoleh. Ketika berhadapan dengan partai politik dan kandidat, masyarakat cenderung lebih bersifat transaksional. Masyarakat mencari untung dalam kampanye pemilu, meski pada kenyataannya masih sulit diprediksi sebelum pemungutan suara. Selain itu, masih banyak pemilih yang mempertimbangkan ketokohan kandidat dan tokoh-tokoh besar partai politik di Palembang. Oleh karena itu, untuk kontestan, sistem dengan suara terbanyak memiliki pengaruh besar pada pemilihan mereka. Berdasarkan pengamatan lapangan, tingkat pencitraan dan figuritas tokoh besar masih menjadi salah satu faktor penting untuk mendulang suara.

Faktor rasional, pemilih rasional realistik di Kota Palembang cenderung dominan dalam pemilu era reformasi. pemilih tipe ini mempertimbangkan kalkulasi untung-rugi terutama karena persoalan ekonomi. Tidak dapat dihindari bahwa politik uang dalam berbagai bentuknya sudah menjadi fenomena umum yang seringkali dijumpai dalam pemilu, dan turut mempengaruhi pola perilaku pemilih. Kompetisi dengan system suara terbanyak justru menjadi penyebab persaingan antar kandidat, bukan lagi persaingan antar parpol, melainkan menjadi persaingan antarpersonal dalam satu parpol yang sama. Persaingan antar kandidat ini, diakui atau tidak menyebabkan masyarakat mendapatkan keuntungan atau

kecipratan untung terutama pada masa kampanye. Bagi mereka, kandidat atau partai memberikan manfaat paling banyak bagi dirinya atau lingkungan sekitarnya adalah kandidat dan partai yang layak untuk dipilih. Selain tiga faktor di atas, berdasarkan temuan di lapangan. Faktor lain yang tidak kalah penting yang mempengaruhi hasil pemilu adalah netralitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu.

Maka dari itu, dampak dari rasionalisasi pemilih yang terus berjalan. Maka muncul persepsi baru pada masyarakat Palembang yang berujung pada sikap hilangnya kepercayaan pemilih muslim terhadap partai-partai Islam Palembang. Selain itu, penetrasi kekuatan politik Orde Baru telah mengubah peta politik Palembang. Tumbangnya Orde Baru, dengan munculnya gerakan reformasi tidak mengubah warna politik nasionalis kota Palembang, kembali seperti tahun 1955 yang “nasionalis – agama”. Dan hal ini berbeda dengan yang terjadi di pulau Jawa yang cenderung seperti tahun 1955. Factor lainnya adalah perpecahan dan citra buruk elit politik Islam semakin menjadikan partai-partai Islam Palembang kehilangan pesonanya bagi pemilih Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Makmun, dkk. (1984) *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Abdullah, Taufik. (1979). *Agama, Etos, Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.
- (1987). *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Abidin Amir, Zainal. (2003). *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Adrianus Fito, Toni, dkk. (2006). *Mengenal Teori Ilmu Politik*. Jakarta: Nuansa
- Al Chaidar. (1998). *Reformasi Prematur: Jawaban Islam terhadap Reformasi Total*, Jakarta: Darul Falah.
- Ali. Fachry dan Bahtiar Effendy. (1986). *Merambah jalan Baru Islam*. Jakarta: Mizan.
- Angus Campbell, Philip. E. Converse, Warren. E. Miller, & Donald E. Stokes. (1960) *The American Voter*. New York: Wiley.
- Agus Suparno, Basuki. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Kompas.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arsyad, Azhar. (2010). "The Thevelopment of Islam in Indonesia", *Presented at the Universita Di Napoli "L'Orientale"* on the 12th of May, Italy.

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azra, Azyumardi. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Bakri (ed.), Masykuri. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teritis dan Praktis*. Malang: Lembaga Penelitian UM bekerjasama dengan Visipress
- Bartels, L.M. (2012). "The Study of Electoral Behavior" dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- BPS Kota Palembang. (2019). *Indikator Tenaga Kerja dan Kesra Kota Palembang 2019*, Palembang: CV Bahtera Safety.
- BPS Kota Palembang. (2020). *Kota Palembang dalam Angka 2020*, Palembang: CV Bahtera Safety.
- BPS Kota Palembang. (2020). *Kota Palembang dalam Angka: Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan*. Palembang: CV Bahtera Safeti
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Campbell, Angus. dkk. *The American Voter*. New York: Wiley, 1960

- Crouch, Harold. (1998). *The Army and Politics in Indonesia*, USA: Cornell University Press.
- Djeoned Poeponegoro, Marwati. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan, Ahmad(2014). *Sejarah Melayu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dahlan, H.A. (1981). *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, Palembang: TP.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Faisal, Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3
- Fanani, Zainuddin. (1999). *Perlawanan Rakyat Terhadap Hegemoni Kekuasaan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Feith, Herbert. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gadjanata. (1986). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, Jakarta: UI-Press.
- Geertz, Cilfort. (1983). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Hadi, Sutrisno. (1995). *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hadi, Syamsul. Dkk. (2012). *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Hadikoemoro, Soekisno. (1995). *Tragedi Trisakti 12 Mei 1998*. Jakarta: Universitas Trisakti.

- Hamka. (1981). *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang IV.
- Hanafiah, Djohan, *Palembang Zaman Bari Citra Palembang Tempo Doelo*, Humas Pemerintah Kotamadya Palembang, 1988.
- Hanafiah, Djohan. (1995). *Melayu-Jawa Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Imran. (1996). *Megawati Soekarnoputri: Pantang Surut Langkah*. Jakarta: ISAI
- Haris, Syamsuddin. (2016) *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 Analisis Proses dan Hasil*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hubberman, A. Michael dan Matthew B. Miles. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Penj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press
- Humas Kotamadya Palembang. (1973). *Buku Penemuan Hari jadi Kota Palembang*, Pemerintah Daerah Kodya Palembang.
- Ikram, Achadiati (Ed). (2004). *Jati Diri yang Terlupakan: Naskah-naskah Palembang*, Jakarta: Yayasan Naskah nusantara (Yanasa).
- JA, Denny. (2006) *Jalan Panjang Reformasi*, Yogyakarta : LKiS.
- J. Prihatmoko, Joko. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Loman, J.C.C. (19984) “Een Kijkje in de Palembangsche Bovenlanden,” dalam *Indische Gids, III*.
- Liddle, R. William. (1977). *Islam, Politik dan Modernisasi*. Jakarta: Sinar Harapan

- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam Dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988
- Maf'ul, Arsyad. (2012). *Partai Politik pada Masa Orde Baru dan Orde Lama*, Makassar: Universitas Negeri Makasar.
- Mahfud MD, Moh.(2003). *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manah, Bagir. (2010). “Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”, *Orasi Ilmiah Diesnatalis* Universitas Padjajaran Bandung.
- Manik, Husni Kamil, dkk.(2015). *Pedoman Pendidikan Pemilu*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Mainwaring, Scoot. (1997). *Multipartism, Robust Federalism and Presidentialism in Brasil*. Englan: Cambridge University Pres
- Manshur Suryanegara, Ahmad. (1998). *Menemukan Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Markoni. (2014). “Studi Pemetaan Politik dan Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umu Kepala Daerah di Kota Palembang” dalam *Jurnal Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga*
- Marsh, David dan Gerry Stoker. (2010). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media
- Moedjanto, G. (1989) *Indonesia Abad Ke-20*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Morissan. (2005). *Hukum Tata Negara Era Reformasi*, Jakarta: Ramdina Prakarya.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996
- Muhammad Santun. (2010). Dedi Irwanto, *Venesia dari Timur: memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial*, Yogyakarta: Ombak.
- Muljana, Slamet. (tt). *Sriwijaya*, Flores: Percetakan Arnoldus Ende.
- Nurhasim (ed), Mochammad. (2016). *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-LIPI.
- Noer, Deliar (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta : Grafitipress.
- Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor. (2011). *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*, Washington DC: National Democratic Institute.
- Pabotinggi, Mochtar. (1995). *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Poerwantana. (1994). *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Poesponegoro, Marwati Djeoned. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Prihatmoko, Joko. J. (2004). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP21.
- Putri Budiarti, Aisah dkk. (2018). *Personalisasi Partai Politik di Indoensia Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

- R Wargadalem, Farida. (2017). *Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804 -1825)*. , Jakarta :Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahim, Husni. (1998). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam; Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Ciputat: PT LOGOS Wacana Ilmu.
- Ricklefs, M.C. (2001). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Riddle, R. William & Mujani, Saiful. (2007). *Leadership, Party and Religion : Explaining Voting Behavior In Indonesia*, Comparative Political Studies.
- Ritzer, George dan Gouglas J Goodman. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Riyanto, Yatim. (2001) *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC
- Roth D. (2008) *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Friderich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit.
- Sanit, Arbi. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sevenhoven, J.I. (1971). *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, terjemahan Soeganda Purbakawatja, Jakarta: Bhratara.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Shapiro, Ian. (1996). *Democracy's Place*. USA: Cornell University Press

- Shalihin, Nurus. (2013). *Rasionalisasi Agama Dalam Arena Politik: Dari Politik Identitas ke Politik Rasional*. Padang: IAIN IB Press
- Soelaiman, Munandar. (2011). *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Refika-Aditama.
- Soemardjan, Selo. (2000) *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. (1989). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- _____. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta,
- Sumarno. (2002). *Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara*. Depok: PT. Rumpun Dian Nugraha
- Suminto, Aqib. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES
- Suparno, Basuki Agus. (2012) *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Jakarta : Kompas.
- Surbakti, Ramlan. (1997) *Partai Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryanegara, Ahmad Manshur. (1998) *Menemukan Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Wardaya, Baskara T (ed). (2001). *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Wargadalem, Farida R. (2017). *Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik (1804 -1825)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Widjaja, Azwar. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada
- Wirman, Syafri dan Imron Nasri. (2003). *Merangkai Sejarah Menatap Masa Depan: Refleksi Kelahiran Partai Amanat Nasional*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Zada, Khazami. (2002). *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Zainuddin. (2020) *Jejak Politik Kiai: Membaca Citra Politik Kiai dan Pengaruhnya terhadap Masa Depan Lembaga Pendidikan Islam*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Zed, Mestika. (2003). *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Sumber-sumber lain

- Alfitri. (2019). “Perilaku Politik Transaksi Calon Legislatif dan Pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di kelurahan Sako kota Palembang” dalam *Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III*
- Aminah. (2012). “Analisis Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 1 No. 2.

- Arifin, Munawir. (2019). “Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru” dalam *Jurnal Candrasangkala* Vol. 5, No. 1
- Asikin Thalib, Nur. (2014). “Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Uji Materil Pasal 214 UU No, 10 Tahun 2008”, dalam *Jurnal Citra Hukum*, Vol. II No. 2
- Azhari, Aidul Fitriadi, (2004) ”Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi: Perspektif Ketatanegaraan” dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2.
- Bachtiar, Farahdiba Rahma. (2014). “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Representasi”, *JPP: Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3. No.1.
- Daud, M. (2015) “Indikator Perilaku Pemilih Pada Pemilu Kadek Perspektif Psikologi” dalam *Jurnal Talenta* Vol 1. No. 1
- Gigih Prasisko, Yongky. (2016). “Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia” dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.3 No. 2.
- Gerald, Galang. “Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS”, dalam *Jurnal Politicon: Jurnal Ilmu Politik* Vol.1 No.2
- Fanani, Ahmad Fuad. (2013). “Dilema Partai Politik berbasis Islam: Terpuruk dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan” dalam *Jurnal Maarif: Arus Pemikiran Islam dan social* Vol.8
- Fitriadi Azhari, Aidul. (2004). ”Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi: Perspektif

- Ketatanegaraan” dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2
- Hadi, Dwi Wahyono dan Gayung Kasuma. (2012) “Propaganda Orde Baru 1966-1980”, *Verleden: Jurnal Ilmu Sejarah*, Vol. 1. No. 1.
- Indonesia: Personalities, Parties, and Voters.” *Journal of Democracy*, Volume 21, Nomor 2, April 2010.
- Kadir. (2017). “Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015: Studi Kasus di Kecamatan Kepenuhan Hulu, dalam *Jurnal JOM Fisip*. Vol. 4 No. 2
- Kurniati Syam, Nia. (2003). “Mencari Format Sistem Pemilu Yang Berkualitas”, dalam *Jurnal*, Volume XIX No. 1
- Kemenkumham. (2014). “Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9.No. 4.
- Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia.” *Comparative Political Studies*, Volume 40 Nomor 7, Juli 2007
- Leiken, Robert S & Steve Brooke. (2007). “The Moderat Muslim Brotherhood”, dalam *Foreign Affairs Magazine*
- Maf’ul, M. Arsyad. (2010). “Partai Politik pada Masa Orde Baru dan Orde Lama”, *Supremasi Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, dan Pengajarannya*, Volume V. No. 2.
- Masyrofah. (2013). “Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi: Usulan Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No.2.

- Markoni. (2014). “Studi Pemetaan politik dan Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Palembang, dalam *jurnal Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga*
- Mujani, Saiful dan R. William Liddle. (2007). “Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia.” Dalam *jurnal Comparative Political Studies*, Volume 40 Nomor 7
-
- (2010). “Indonesia: Personalities, Parties, and Voters.” *Journal of Democracy*, Volume 21, Nomor 2
- Prasisko, Yongky Gigih. (2016). “Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.3 No. 2.
- Ramli, Lili. (2004). Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia, dalam *Jurnal Penelitian Politik* Vol.1 No.1
- Sukanto, Amos. (2013). “Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru: dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik” *Jurnal Teologi Indonesia*. Vol. 1.No. 1.
- Sumadinata, R Widya Setyabudi. (2016). “Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 2.
- Syam, Nia Kurniati. (2003) “Mencari Format Sistem Pemilu Yang Berkualitas”, *Jurnal*, Volume XIX No. 1.
- Thalib, Nur Asikin. (2014). “Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Uji Materil Pasal 214 UU No, 10 Tahun 2008”, *Jurnal Citra Hukum*, Vol. II No. 2.

Yumitro, Gonda. (2013). “Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17 Nomor 1

Yumitro, Gondo. (2013). *Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17 Nomor 1.

Anggraini, Titi. (2018). “*Suara Generasi Milenial Sangat Potensial dalam Pemilu*” dalam [www.kompas.com/07 Mei 2018/diakses 08 April 2020](http://www.kompas.com/07-Mei-2018/diakses-08-April-2020)

www.kpu.go.id.

<http://pan.or.id>

KPUD Kota Palembang Tahun 2009

KUPD Kota Palembang Tahun 2014 DAN 2019

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu